

SIMPUL

Perencana



PERJALANAN DUA TAHUN NAWA CITA DI PUSAT DAN DAERAH

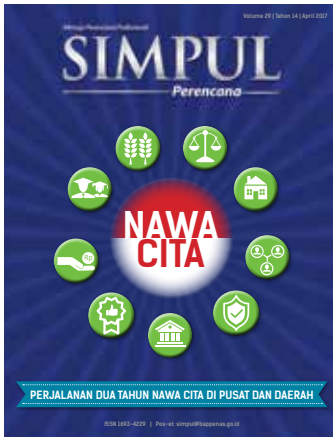


NAWA CITA

SEMBILAN PROGRAM PERUBAHAN UNTUK INDONESIA

- 1 → Menolak Negara Lemah dengan Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
- 2 → Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan.
- 3 → Memperteguh Kebhinnekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia.
- 4 → Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
- 5 → Membuat Pemerintah Tidak Absen dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratif, dan Terpercaya.
- 6 → Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia.
- 7 → Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik.
- 8 → Melakukan Revolusi Karakter Bangsa.
- 9 → Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional.





SIMPUL PERENCANA

Diterbitkan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas

PELINDUNG

Menteri PPN/Kepala Bappenas

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Kementerian PPN/
Sekretaris Utama Bappenas

PEMIMPIN UMUM

Kepala Pusbindiklatren Bappenas

DEWAN REDAKSI

Wignyo Adiyoso, Rita Miranda,
Ali Muharam, Wiky Witarni, Edy Purwanto

PEMIMPIN REDAKSI

Karyoto

EDITOR

Setio Utomo

GRAFIS DAN TATA LETAK

Hafidh Aditama

DISTRIBUSI/SIRKULASI

Eko Slamet Suratman

ADMINISTRASI/KEUANGAN

Dwiyanto Bambang P., Nita Agustin

ALAMAT REDAKSI

Pusbindiklatren Bappenas
Jln. Proklamasi No. 70, Jakarta 10320
Telp. (021) 319 28280, 319 28285,
319 28279
Pos-el: simpul@bappenas.go.id

Dari Kami

Tahun 2017 merupakan tahun ke-3 kepemimpinan nasional di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam periode 2014–2019. Pasangan presiden dan wakil presiden tersebut mengusung Nawa Cita sebagai visi dan misi. Pelaksanaan dan realisasi Nawa Cita tersebut ditunggu oleh rakyat Indonesia.

Dalam Simpul edisi 29 tahun 2017, kami ingin mengupas sekaligus memberikan gambaran, penjelasan, realisasi, serta penerjemahan Nawa Cita tersebut dalam program-program pembangunan, termasuk di daerah. Realisasi Nawa Cita di Kota Bogor akan menjadi contohnya. Dari pusat kami sajikan penerjemahan Nawa Cita secara nasional oleh Bappenas dan hasil evaluasi Bappenas terhadap penerjemahan Nawa Cita di setiap kementerian/lembaga. Sebagai rujukan, kami sajikan pula fungsi dan peran Kantor Staf Presiden dalam mengawal pelaksanaan Nawa Cita.

AP2I, sebagai wadah perencana pembangunan pemerintah, juga akan menjelaskan peran dan pandangannya terhadap Nawa Cita. Tidak lupa kami berikan pandangan dari para pihak yang kompeten untuk memprediksi realisasi Nawa Cita pada sisa tahun kepemimpinan nasional.

Semoga Simpul kali ini memberikan perspektif tentang penerjemahan Nawa Cita dalam dua tahun pelaksanaan dan rencana pada sisa tahun yang akan datang. Kami juga berharap sajian Simpul edisi kali ini akan menjadi bahan masukan, evaluasi, dan perbaikan bagi perencanaan pembangunan nasional di seluruh instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Redaksi



Foto: www.presidenti.go.id

Redaksi menerima tulisan yang berhubungan dengan perencanaan. Tulisan dapat dikirimkan kapan saja.

Tulisan yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.

CAKRAWALA



TETEN MASDUKI
Kepala Staf Presiden

Mungkin saya akan melihat dari sisi perencanaan dan penganggaran dahulu. Karena itu, untuk mengakomodasi Nawa Cita ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), harus ada perubahan paradigma perencanaan dari aparat pemerintah. // 8



ARYA BIMA SUGIARTA
Wali Kota Bogor

Perencanaan pembangunan di Kota Bogor secara normatif telah sesuai dengan UU 25 Tahun 2004 tentang SPPN. Oleh karena itu, visi dan misi yang saya usung telah ditetapkan dalam Perda No. 6 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Bogor tahun 2015–2019 yang disetujui bersama DPRD Kota Bogor. // 12



RONI DWI SUSANTO
Eks Deputy Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bappenas

Ini merupakan perencanaan pembangunan secara teknokratik. Untuk menerjemahkan Nawa Cita sebagai visi dan misi presiden dan wakil presiden 2014–2019 maka keluarlah Kepres tentang RPJMN 2015–2019. // 16



HARYANTO
Ketua Umum AP2I

Saya akan bicara secara umum dahulu. Secara teknis dalam perspektif AP2I, posisi AP2I mendorong keterlibatan para perencana pemerintah dalam menerjemahkan Nawa Cita. // 20



LIPUTAN

Rintisan Kerja Sama Pusbindiklatren Bappenas dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara Tahun 2016 // 26

Pameran Program Beasiswa: Java Education Festival 2017, Holland Scholarship Day, dan Pusediklat Edufair // 29

LIPUTAN

Sharing Session Alumni Pendidikan dan Pelatihan Komponen 3 Program SPIRIT Tahun 2016 // 32

Hasil dari Forum Diskusi Nasional AP2I // 34

Workshop Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2016 di Kota Solo // 38



SOSOK ALUMNI



NOOR AVIANTO
Planning and Budgeting antara Yogya dan Tokyo // 42



ADI KRISANTO
Antara Ungaran, Jakarta, dan Hiroshima // 44

AKADEMIKA

Tesis Terbaik S2 Dalam Negeri: Pengaruh Kepadatan Modal Manusia Terhadap Konvergensi Pendapatan Per Kapita Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2001–2013 // 46

Lesson Learned dari Diklat tentang *Scholarship Management* // 56

OPINI

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Pagu Indikatif // 59

Peranan Remitansi TKI dalam Perekonomian Nasional // 63

Kualitas dan Kuantitas Belanja Kesehatan Sebagai Suatu Kecharusan // 71

Upaya Mengembangkan Industri Lampu Gentur Cianjur // 77



SELINGAN

Menangkal HOAX // 83



Menggapai Asa Melalui Nawa Cita

Oleh : Nur Hygiawati Rahayu

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Setelah krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997/1998, sejumlah kebijakan dan reformasi struktural diterapkan untuk memulihkan kondisi perekonomian negeri ini. Hasilnya terlihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi hingga rata-rata hampir 6 persen per tahun pada tahun 2000-an. Krisis keuangan dan resesi global yang dimulai dari runtuhnya Lehman Brothers di Amerika Serikat pada tahun 2008 kembali menggoyang perekonomian Indonesia. Dengan berbagai upaya pemulihan, Indonesia kemudian bisa tumbuh sebesar 5,8 persen pada tahun 2013, meskipun menurun kembali menjadi 5,02 persen pada tahun 2014.

Ketika Indonesia bergelut untuk bangkit, di sisi lain, tahun 2014 ditandai dengan momentum penting dengan digelarnya perhelatan akbar pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode 2015–2019. Setiap pasangan calon mengusung visi dan misi yang akan dicapai dalam lima tahun. Visi dan misi presiden terpilih, Joko Widodo, dan wakilnya, Jusuf Kalla, dikenal dengan Nawa Cita, sembilan agenda strategis pembangunan untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan berlandaskan gotong royong.

Nawa Cita memperkuat rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 yang kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015. Di dalam RPJMN, Nawa Cita diwujudkan menjadi strategi yang memiliki tiga dimensi pembangunan, yaitu

Pembangunan Manusia, Pembangunan Sektor Unggulan, serta Pemerataan dan Kewilayahan. Ketiga dimensi ini didukung dengan Kondisi Perlu yang meliputi Kepastian dan Penegakan Hukum, Keamanan dan Ketertiban, Politik dan Demokrasi, serta Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi. Dengan strategi ini digantungkanlah harapan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen pada akhir tahun 2019.

Pelaksanaan RPJMN 2015–2019 hingga saat ini telah dituangkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015, 2016, dan 2017. Memasuki tahun 2017 yang berarti mengantarkan negara ini pada tahun ketiga pelaksanaan Nawa Cita dan proses penyusunan RKP 2018, sejumlah pertanyaan menyeruak. Bagaimana pencapaian target Nawa Cita selama dua tahun berjalan? Hasil apa yang telah diperoleh? Hambatan apa yang dihadapi? Langkah-langkah apa yang perlu diambil?

Evaluasi paruh waktu RPJMN 2015–2019 pun dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Hasil evaluasi dapat menjadi masukan dalam penyusunan RKP 2018 dan 2019 sehingga ditargetkan sasaran pembangunan terpenuhi pada akhir tahun 2019.

Dari aspek perencanaan, telah diidentifikasi bahwa dengan sumber pendanaan yang terbatas, diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat. Salah satunya adalah penerapan *money follows program*, yaitu alokasi anggaran difokuskan pada program pembangunan prioritas, bukan berdasarkan struktur

“Konsep Nawa Cita dan prioritas pembangunan nasional sudah sejalan dengan komitmen tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Yang perlu kita lakukan adalah menjalankan prioritas nasional secara baik dan efektif.”

PRESIDEN JOKO WIDODO

[Sumber: www.presidentri.go.id]

organisasi pemerintah (*money follows function*) yang selama ini dijalankan. Upaya lain yang ditempuh adalah dengan perencanaan yang bersifat holistik, terintegrasi, tematik, dan spasial. Pendekatan ini menjadikan sinergi antara pembangunan pusat dan daerah, sektor dan wilayah, dengan memfokuskan pada sejumlah prioritas. Selain itu, dilakukan upaya untuk menyinergikan antara perencanaan dan penganggaran, termasuk upaya pencarian sumber-sumber pendanaan di luar anggaran pemerintah.

Ditinjau dari sisi pelaksanaan, masih ditemukan permasalahan dari sisi peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih. Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah di berbagai sektor di tingkat tapak masih belum jelas. Beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana karena keterbatasan anggaran. Kantor Staf Presiden (KSP) memandang pemerintah belum memanfaatkan pendanaan dari pihak swasta sehingga beban anggaran pemerintah masih tinggi. Pemerintah juga perlu didorong pada kegiatan yang bersifat atraktif terhadap investasi.

Untuk menilai hasil pembangunan yang telah dicapai, sejumlah indikator makro termasuk pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur. Tentu saja dalam menilai perkembangan suatu negara tidak dilihat dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi ada sejumlah indikator makro ekonomi penting lainnya, seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, rasio gini, penerimaan pajak, serta pertumbuhan ekspor dan impor. Dibandingkan dengan target di RPJMN, realisasi indikator makro

belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 mencapai 5,1 persen, jauh di bawah target sebesar 6,6 persen. Sejalan dengan itu, tingkat kemiskinan dan pengangguran juga masih belum memenuhi sasaran yang ingin dicapai.

Isu global yang terjadi dalam kurun beberapa tahun terakhir juga memengaruhi pencapaian target pembangunan. Di kawasan Eropa, terjadi krisis yang hingga kini belum pulih dan memengaruhi ekspor Indonesia. Harga komoditas dunia pun cenderung menurun yang berdampak pada ekspor dan investasi di negara ini. Selain itu, efek negatif proses normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat tidak sepenuhnya dapat diredam.

Dengan kondisi yang terjadi di dalam dan di luar negeri, tantangan penyusunan RKP 2018 untuk mendorong perwujudan Nawa Cita menjadi lebih besar. Penajaman prioritas pembangunan merupakan hal penting, yang kemudian perlu diperkuat dengan penetapan sasaran yang tepat dengan mengintegrasikan sumber daya yang ada. Dalam rentang waktu yang tersisa diperlukan langkah-langkah strategis, terobosan yang inovatif, kerja keras seluruh pihak, baik pada saat proses perencanaan, pelaksanaan, maupun ketika pemantauan. Sinergi dan harmoni antarpelaku serta komitmen para pemangku kepentingan akan memberi kekuatan dalam menggapai asa melalui Nawa Cita secara bersama, yaitu kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. ■

TETEN MASDUKI

Kepala Staf Presiden

Untuk Mewujudkan Nawa Cita Harus Ada Perubahan Paradigma dalam Perencanaan Pembangunan

Tahun 2017, perjalanan presiden dan wakil presiden telah memasuki tahun ke-3 dari lima tahun masa jabatannya (2014–2019). Bagaimana pelaksanaan Nawa Cita, sebagai visi misi presiden dan wakil presiden dalam kurun dua tahun ini? Apa saja yang dicapai? Apa kendala di lapangan? Bagaimana rencana pada sisa masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam mewujudkan Nawa Cita? Berikut penuturan Teten Masduki, Kepala Staf Presiden kepada Simpul di ruang kerjanya.

“Ego sektoral sangatlah kuat. Jika perencanaan (dimulai) dari bawah maka akan terlihat banyaknya biaya yang habis untuk membiayai "mesin birokrasi" supaya fungsi birokrasi tetap berjalan, sedangkan program prioritas (justru) tidak terlihat.”

Simpul (S): *Bagaimana KSP melihat kinerja pelaksanaan Nawa Cita selama dua tahun ini sebagai visi-misi presiden dan wakil presiden 2014–2019?*

Teten Masduki (T): Mungkin saya akan melihat dari sisi perencanaan dan penganggaran dahulu. Karena untuk mengakomodir Nawa Cita ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), harus ada perubahan paradigma perencanaan dari aparat pemerintah. Untuk mewujudkan Nawa Cita, perencanaan pembangunan harus *top down* dan tematik, dan

itu menjadi program prioritas. Saya melihat saat ini perencanaan masih dimulai dari bawah sehingga *money follows program* belum maksimal. Saya harap RKP 2018 bisa lebih baik. Oleh karena itu, menurut saya, paradigmanya harus diubah karena Nawa Cita itu tematik dan terintegrasi. Jadi, jika di kementerian/ lembaga (K/L) itu perencanaan pembangunannya tidak tematik dan terintegrasi maka tidak akan sesuai dengan Nawa Cita. Jika dilihat dari sisi *input*, bisa saja terlihat ada kesesuaian dengan Nawa Cita. Namun, jika dilihat di lapangan, hal tersebut tidak terintegrasi.

S: Apa contohnya?

T: Misalnya pembangunan infrastruktur untuk mengurangi biaya logistik agar kita punya daya saing dan produk-produk kita bisa unggul. Namun, apakah sudah terintegrasi dengan sektor industri atau pariwisata? Ternyata belum. Contoh lain, soal membangun ketahanan pangan, pembangunan bendungan dan irigasi kadang tidak terintegrasi, meskipun di atas kertas sudah terbangun. Sawah di sini, embung di sana. Oleh karena itu, kuncinya di perencanaan. Nawa Cita merupakan konsep besar yang memerlukan kerja sama antar K/L dan harus menjadi program strategis.

Yang disampaikan oleh Menteri Keuangan pada saat evaluasi pembangunan sangat benar. Menurutnya, pembangunan infrastruktur sekarang ini lebih dinikmati oleh kelas menengah dan perlu koreksi. Adapun penurunan indeks gini terjadi karena konsumsi kelas menengah naik, tetapi yang miskin belum berubah, ini belum menjawab Nawa Cita. Mudah-mudahan ada perubahan dalam mengatasi kesenjangan dan kemiskinan dalam kebijakan ekonomi yang akan datang. Nawa Cita harus tematik, baik multisektor atau *multiyears*, dalam pelaksanaannya.

S: Bagaimana rencana integrasi perencanaan dan penganggaran yang saat ini digagas pemerintah?

T: Ego sektoral sangatlah kuat. Jika perencanaan (dimulai) dari bawah maka akan terlihat banyaknya biaya yang habis untuk membiayai "mesin birokrasi" supaya fungsi birokrasi tetap berjalan, sedangkan program prioritas (justru) tidak terlihat. Perencanaan program prioritas dalam mewujudkan Nawa Cita harus *top down* dan membutuhkan sinergi antar-K/L. Jika penganggaran dipisah dengan perencanaan maka satu pihak akan melihatnya dari sisi hasil dan pihak lain akan melihatnya dari "kalkulator". Ini bisa menyebabkan pemangkasan anggaran yang tidak tepat. Menyatukan perencanaan dan penganggaran merupakan upaya tepat, meskipun ini sudah terlambat. Kita beruntung punya dua menteri di perencanaan dan penganggaran yang paham persoalan tersebut. Saya kira ini bagus dan kita harus berubah ke *money follows program* supaya program prioritas terjawab.

S: Bagaimana pelaksanaannya?

T: Ini memang tidak mudah karena berbeda dengan swasta yang mudah melakukan perubahan dan fleksibilitas. Di pemerintah sangat susah, lambat, dan kurang fleksibel sehingga tetap harus membiayai fungsi-fungsi birokrasi. Jika seperti ini maka akan sangat susah untuk menjawab tantangan ke depan. Oleh karena itu, perlu ada fleksibilitas struktur di setiap K/L. Selain itu, penempatan mobilisasi SDM yang fleksibel dan reorganisasi dalam K/L sesuai dengan prioritas juga diperlukan. Kita mungkin harus melakukan ini supaya bisa "lincah". Namun, ini baru pembicaraan. Jika birokrasi statis, akan sangat susah. Itu menjadi dilema. Wacana pernah ada untuk tidak bergantung pada rumpun Kementerian Koordinator (Kemenko). Kebutuhan fleksibilitas K/L sudah nyata.

S: Dalam implementasi integrasi perencanaan dan penganggaran, apa yang ingin dicapai?

T: Kami ingin memastikan bahwa Nawa Cita terakomodasi dalam RKP K/L. Oleh karena itu, kami mencoba intervensi dalam proses perencanaan di K/L. Kami mulai sejak bulan Desember dan K/L mulai presentasi tentang rencana mereka, termasuk implementasi Nawa Cita. Kementerian perlu menerjemahkan Nawa Cita dalam rencana kerja dan menko mengoordinasikan program-program secara terpadu dan terintegrasi. Adapun fungsi Bappenas adalah mengintegrasikan program strategis yang pasti lintas K/L dan *multiyears* serta menjaga keberlanjutannya. Bappenas dapat mengoordinasikan penyusunan program dengan isu yang strategis terpadu bersamaan dengan penganggarnya. Mudah-mudahan tahun 2018 dapat berjalan dengan baik. Kita akan mengawal implementasinya dan ini harus cepat, termasuk sisi regulasinya.

S: Bagaimana pelaksanaan Nawa Cita selama dua tahun ini dan bagaimana dengan di daerah?

T: Dalam dua tahun ini, kita memang lebih banyak pada pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan tol laut, pelabuhan, dan bandara. Tidak ada hambatan, termasuk di daerah, dan mereka juga senang. Namun, dalam hal pembangunan desa masih belum seperti yang diharapkan. Pembangunan desa yang terpadu antara K/L dan Pemerintah Daerah masih belum maksimal. Program prioritas lain, salah satunya paket deregulasi untuk memangkas prosedur, sangat sulit diterapkan di daerah. Apalagi itu bagian dari pemasukan PAD. Di K/L, hal tersebut relatif lebih mudah. Izin usaha dan lainnya juga tidak mudah di daerah. Dalam pembangunan bidang SDM, kita lebih banyak menyerahkan ke bidang pendidikan.

S: Bagaimana dengan kontrol daerah?

T: Sekarang kita lebih banyak mengelompokkan dalam kelompok isu, seperti isu lingkungan yang berkaitan dengan Amdal, kita menyerahkan

“Kita harus berubah ke *money follows program* supaya program prioritas terjawab.”

ke KLHS. Jadi lebih banyak koordinasi per-isu. Pemerintah Pusat tidak punya kekuasaan langsung. Jika tidak ada kaitannya dengan anggaran, agak susah. Wilayah investasi ada di daerah. Kalau di daerah banyak regulasi yang panjang, tentu susah sekali menarik investor. Oleh karena itu, harus ada komitmen bersama agar dapat menarik investasi. Kita harus menyederhanakan regulasi dan daerah juga yang akan mendapat keuntungan. Di luar negeri, pemerintahnya sudah lebih maju dengan menyediakan lahan, *financial model*, dan lain-lain. Di negara kita, urusan pembebasan lahan saja masih lama. Dengan menyederhanakan regulasi, investor bisa lebih cepat mengambil keputusan. Termasuk BUMN juga harus mengubah *mind set* dan bersedia masuk dalam bidang yang tidak dimasuki swasta.

Penggunaan anggaran juga harus disesuaikan dengan prioritas dan menteri keuangan akan melakukan hal-hal seperti ini. Presiden minta APBN diorientasikan untuk daerah pinggiran, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan. Selibuhnya, swasta diharapkan dapat berperan dalam hal ini. BUMN dan kementerian tidak boleh melihat swasta sebagai pesaing. Seperti PLN, dengan dana sendiri tentu tidak akan mampu membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt sehingga PLN harus membuka peluang kepada swasta. Kita harapkan swasta dan pemerintah saling bersinergi dan saling melengkapi. Aparat pemerintah harus memahami ini. Presiden ingin kita bisa mengejar ketertinggalan.

S: Bagaimana dengan bidang SDM?

T: Presiden minta supaya bidang SDM memiliki pemetaan. Dengan demikian, kebutuhan dalam bidang SDM akan terinci, kemudian kami menyesuaikan kebutuhan tersebut dan menyediakannya. Anggaran pendidikan harus sesuai untuk meningkatkan SDM kita. Pentingnya alokasi anggaran untuk kegiatan pendanaan *vocational* supaya mereka memiliki keahlian dan bisa kompetitif di pasar kerja ASEAN. Kita harus bisa memanfaatkan pasar kerja yang luas di dunia. Kementerian perindustrian dan kementerian tenaga kerja sedang

merevitalisasi kegiatan di SMK, termasuk perluasan pemberian beasiswa LPDP. Kita harus melakukan *assessment* untuk kebutuhan SDM 5–10 tahun ke depan. Dengan demikian, kebutuhannya menjadi jelas dan pengembangannya menjadi tepat. *Vocational* harus disusun sesuai dengan kebutuhannya sebagai hasil *assessment* dan itu yang dilakukan di luar negeri.

S: Bagaimana dengan sisa dua tahun ke depan dalam realisasi Nawa Cita?

T: Kalau perencanaan masih (dimulai) dari bawah maka agak susah karena program prioritas tidak terlihat dan tidak sejalan. Akibatnya, kegiatan hanya dicocok-cocokkan dengan Nawa Cita.

S: Bagaimana mengatasinya?

T: Kami sudah berbicara dengan para menteri dan para menko terkait Nawa Cita yang harus diterjemahkan dulu oleh para menteri. Lalu Bappenas yang menjahitnya, terutama program prioritas, lintas sektor, dan *multiyears*. Ini momen yang tepat untuk menyinergikan perencanaan dan penganggaran. Hal ini sesuai dengan Nawa Cita dan akan berjalan pada tahun 2018. Program apapun akan sulit jika anggarannya habis hanya untuk "mesin birokrasi". Di sisi lain, pelibatan swasta harus disegerakan dan K/L harus rela melepaskan beberapa program kepada swasta agar bisa dilakukan percepatan. Ini tidak mudah dalam pelaksanaannya karena tidak semua K/L atau BUMN rela melepas beberapa hal kepada swasta. BUMN juga harus masuk dimana swasta tidak mau masuk. Jangan sampai swasta sudah berjalan, kemudian BUMN ikut masuk. Bukan berarti tidak nasionalis. Masih banyak yang harus kita dibenahi di Indonesia.

S: Apakah ada kendala politis dalam pelaksanaan Nawa Cita?

T: Untuk akselerasi pembangunan memang ada beberapa kendala yang menghambat, seperti penggunaan dana dalam BUMN yang belum disetujui oleh parlemen. Saya kira perubahan pola pikir menjadi sangat penting untuk mempercepat pembangunan. ■

ARYA BIMA SUGIARTA

Wali Kota Bogor

Visi dan Misi Kota Bogor Sesuai dengan Agenda Nasional

Kota Bogor tidak terlalu jauh dari Ibu Kota Jakarta. Bahkan Istana Presiden yang terletak di Kota Bogor juga dijadikan sebagai tempat tinggal dan sekaligus tempat kerja Presiden Joko Widodo, selain Istana Negara di Jakarta. Bagaimana Kota Bogor melaksanakan pembangunannya dalam rangka mendukung tujuan pembangunan nasional? Berikut penuturan Wali Kota Bogor, Arya Bima Sugiarta kepada Simpul.

“Sebagian misi Kota Bogor bertautan langsung dengan beberapa agenda prioritas nasional. Dengan demikian, capaian misi Kota Bogor juga merupakan capaian Nawa Cita.”

Simpul (S): *Bagaimana proses perencanaan pembangunan dalam menerjemahkan Visi dan Misi Bapak di Kota Bogor?*

Arya Bima Sugiarta (A): Perencanaan pembangunan di Kota Bogor secara normatif telah sesuai dengan UU 25 Tahun 2004 tentang SPPN. Oleh karena itu, visi dan misi yang saya usung telah ditetapkan dalam Perda No. 6 Tahun 2014 Tentang RPJMD Kota Bogor tahun 2015–2019 yang disetujui bersama DPRD Kota Bogor. Dengan demikian, visi-misi tersebut menjadi amanah bagi semua pihak dalam pencapaiannya karena proses pembangunan daerah melibatkan unsur pemerintah dan DPRD, masyarakat, serta pelaku usaha/swasta.

S: Bagaimana kesesuaian dengan Nawa Cita?

A: Secara umum visi Kota Bogor, yakni “Kota Bogor yang nyaman, beriman, dan transparan”, telah sesuai dengan agenda prioritas nasional atau Nawa Cita. Secara khusus misi Kota Bogor, “menjadikan Bogor kota yang cerdas”, bertautan dengan Nawa Cita dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan produktivitas rakyat. Lalu misi Kota Bogor “mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan” serta “mewujudkan masyarakat madani” bertautan dengan Nawa Cita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, melakukan reformasi sistem yang bebas korupsi dan terpercaya, serta mempertahankan kebhinekaan dan restorasi sosial Indonesia.

S: Dalam kurun dua tahun perjalanan kepemimpinan nasional, apakah ada perubahan dalam siklus, model, atau sistem perencanaan pembangunan?

A: Siapa pun presidennya, perencanaan pembangunan harus mengacu pada UU 25 Tahun 2004 tentang SPPN yang mengatur siklus, model, dan sistem perencanaan pembangunan nasional atau daerah. Yang berbeda kemungkinan fokusnya, yang saat ini diterapkan *money follows program* sebagai pendekatan penganggaran yang fokus pada program yang berkaitan dengan prioritas nasional. Belanja tidak lagi dibagi secara merata kepada setiap tugas dan fungsi (*money follows function*).

S: Bagaimana pelaksanaan di lapangan?

A: Di satu sisi, pendekatan ini menambah dana transfer dari pusat ke daerah sehingga dapat mengurangi beban pendapatan daerah yang masih minim. Namun, di sisi lain, ada beberapa unit kerja

Foto (repro): <http://photobucket.com/>

yang beban kerja dan anggarannya terlampau besar karena kewajiban menuntaskan prioritas nasional. Selain itu, banyak pihak yang berbondong-bondong pindah ke unit kerja yang memiliki anggaran besar karena melaksanakan proyek prioritas nasional.

S: Bagaimana dengan hasil evaluasinya?

A: Di Kota Bogor, dalam tahun ini kami akan melakukan evaluasi dan revisi RPJMD Kota Bogor 2015–2019. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah, perubahan kewenangan Pemkot Bogor, dan perubahan urusan pemerintahan Kota Bogor sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Revisi ini dimaksudkan untuk menjamin sinergi pencapaian target pembangunan setiap tahun pada tiap-tiap OPD dan urusan yang sesuai dengan kewenangannya. Hal ini juga mengingat pada akhir tahun 2016, pencapaian target pembangunan sebagian besar telah mencapai hasil

yang baik dan mendapat predikat “ B” dari hasil penilaian LKIP Kota Bogor .

S: Apa rencana ke depan dalam merealisasikan Nawa Cita pada sisa kepemimpinan Bapak?

A: Sebagian misi Kota Bogor bertautan langsung dengan beberapa agenda prioritas nasional di dalam Nawa Cita. Saya akan fokus merealisasikan seluruh misi Kota Bogor dalam pencapaian target sasaran dari tiap-tiap misi tersebut. Dengan demikian, capaian misi Kota Bogor juga merupakan capaian Nawa Cita.

S: Apakah ada kendala dalam proses pengerjaan Nawa Cita di Kota Bogor?

A: Implementasi Nawa Cita pada program dan kegiatan di seluruh daerah tentu menghadapi kendala dan ini tergantung kondisi daerah masing-masing. Contoh, program Kartu Indonesia Pintar dan

Kartu Indonesia Sehat akan menghadapi kendala yang besar ketika diterapkan di daerah dengan kondisi geografis di pedalaman, pulau terluar, atau perbatasan. Ini juga terkait dengan budaya dan kebiasaan masyarakat yang berbeda-beda. Kota Bogor pun menghadapi kendala makin banyaknya kaum urban yang datang tanpa dilengkapi KTP yang jelas sehingga kami kesulitan untuk memfasilitasi mereka dalam mendapatkan layanan nasional berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan.

S: Bagaimana dalam pelaksanaannya?

A: Kami memulai dengan perencanaannya. Usulan perencanaan pembangunan dapat bersumber dari masyarakat (*bottom up*), melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), atau usulan saat reses DPRD. Setiap tahun, Pemkot Bogor melaksanakan Musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai kota. Karena begitu banyak usulan yang terbentur dengan keterbatasan anggaran maka usulan tersebut dibatasi hanya pada yang prioritas. Di satu sisi, reses DPRD

mudah merealisasikan usulan rencana pembangunan yang terkadang tidak sesuai dengan usulan warga kebanyakan dalam Musrenbang. Akibatnya, banyak warga yang putus harapan untuk mengajukan usulan pembangunan dalam Musrenbang.

S: Bagaimana mengatasinya?

A: Kami mengatasi hal tersebut melalui penggunaan teknologi. Kami membangun Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (Simral). Pemkot, DPRD dan masyarakat sepakat bahwa setiap usulan perencanaan pembangunan di input dalam Simral dengan batas waktu tertentu. Dengan demikian, secara otomatis semua usulan yang telah di-*input* akan terkunci dan menjadi bahan penyusunan APBD. Hal ini mencegah adanya usulan tambahan yang datang tiba-tiba untuk kepentingan sekelompok orang. Kami sudah memulai sistem ini dalam menyusun RKPd 2018 dan APBD 2018. Semoga sistem ini mampu menjaga harapan warga untuk menatap cerah masa depan pembangunan kota. ■





RONI DWI SUSANTO

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi,
dan Pengendalian Pembangunan Bappenas

(Periode 2015–2017)

Perlunya Memperkuat Sinergi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan Pembangunan

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bappenas memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan evaluasi pembangunan secara nasional untuk menghasilkan rekomendasi dan perbaikan bagi pelaksanaan pembangunan selanjutnya. Bagaimana sebenarnya kedeputian ini melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya? Berikut penuturan Roni Dwi Susanto, selaku Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bappenas Periode 2015–2017, kepada Simpul.

“Tidak ada masalah antara perencanaan pembangunan yang teknokratis dan politis.”

Simpul (S): *Bagaimana evaluasi dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya? Bagaimana pula peran Bappenas dalam menerjemahkan Nawa Cita yang sudah berjalan selama dua tahun?*

Roni Dwi Susanto (R): Kita mulai dari perencanaannya, dengan melihat koridor undang-undang mulai dari UU No. 25 Tahun 2004 hingga UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN. Ini merupakan perencanaan pembangunan secara teknokratis. Untuk menerjemahkan Nawa Cita sebagai visi dan misi presiden dan wakil presiden 2014–2019, keluarlah kepres tentang RPJMN 2015–2019. Mengenai peran Bappenas, bisa dikatakan Bappenas sudah berhasil menerjemahkan

hal tersebut. Dalam dimensi pembangunan, Nawa Cita dipetakan ke dalam berapa sektor yang sesuai. Contohnya Nawa Cita butir ke-5 yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan, Nawa Cita butir ke-7 tentang pembangunan wilayah dari pinggiran, dan sebagainya. Di dalam prioritas pembangunan terdapat Kondisi Perlu yang kemudian dibungkus menjadi RPJMN. Di situlah keberhasilan Bappenas. Perencanaan pembangunan disusun bersama kementerian/lembaga (K/L). Karena target-target indikator di tiap-tiap K/L masuk maka *leveling*-nya menjadi berbeda-beda, ada level mikro, makro, proses, *output*, dan *impact*. Dengan demikian, indikator pembangunan menjadi sulit untuk dimonitor. Tidak ada ekspose, tetapi ada target. Ini yang membuat Bappenas sulit menerjemahkannya dalam perencanaan dan pelaksanaan sehingga dikunci dalam RPJMN. Apabila ada ketidaksesuaian perencanaan dan anggaran, akan disesuaikan melalui RKP sehingga tidak perlu dilakukan perubahan RPJMN. Hal ini berhasil, tetapi di lapangan tidak terintegrasi.

S: *Untuk indikator, input, output, dan impact yang berbeda ke tingkat yang lebih besar, bagaimana menerjemahkan kegiatan dan programnya?*

R: Antara bidang dan janji presiden berbeda. Itu masalah utama yang pernah saya sampaikan dalam RAPIM terbatas. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa sulit sekali masuk ke dalam teknisnya; berarti saya mengevaluasi Dokumen Perencanaan, bukan mengevaluasi pelaksanaan. Akhirnya ditemukan bahwa ada target-target yang sangat tinggi yang tidak mungkin tercapai, misalnya kebutuhan 35.000 MW yang dibutuhkan negara ini sampai dengan tahun 2019. Ini pasti tidak akan tercapai karena di RPJM I dan RPJM II, kita masih mempunyai hutang

7.000 MW. Hal ini semakin tidak mungkin karena masalah transmisi dan pembebasan lahan belum juga selesai.

Kendala lain, misalnya untuk pencapaian target 1 juta hektare lahan. Saat ini, target 200.000 hektare lahan saja tidak tercapai. Berarti, dalam sisa tiga tahun ke depan, bagaimana upayanya? bagaimana ketersediaan lahannya? atau bagaimana dengan jumlah petaninya? Saya juga pernah bertanya ke Menteri Agraria/Kepala BPN, Sofyan Djalil, jika kita membuka 1 juta hektare lahan di Papua, apakah petaninya ada? apakah mereka biasa bertani? Jangan-jangan hal itu hanyalah pelampiasan orang-orang di sektor pertanian. Di daerah, kita menemukan rata-rata petani berumur 50 tahun dan tidak ada anak muda yang tertarik di sektor pertanian. Sementara itu, data dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa produksi kita terpenuhi, tetapi di sisi lain ekspor kita naik. Oleh karena itu, kami berani mengeluarkan hasil evaluasi bahwa target tidak tercapai. Hasil evaluasi tersebut membuat Kementerian Pertanian marah. Ini baru uji coba, Bappenas menyatakan tidak berhasil.

Saat ini Kementerian Pertanian membuat pasar-pasar murah yang sebenarnya tugas Kementerian Perdagangan. Itu sebenarnya merupakan strategi yang berbeda, yang pernah saya pegang di sektor makro: indikator sektor ekonomi, pengangguran dan tenaga kerja, rasio, IPM, inflasi, kemiskinan, dan kesenjangan antarwilayah.

S: Bagaimana dengan kesenjangan di daerah?

R: Kesejangan antarwilayah kita di provinsi sudah turun 0,01. Namun, di kabupaten/kota, kesenjangan antarwilayah justru meningkat. Jadi, jika tujuh indikator (sektor makro), yang saya sebutkan sebelumnya, tercapai maka Nawa Cita berhasil. Ketimpangan akan terlihat, misalnya saat kita mengunjungi Jawa Timur maka akan ditemukan jalan-jalan yang lebar dan

mulus, tetapi di Jawa Barat akan berbeda. Dengan demikian, strateginya pun akan berbeda-beda. Bappenas sulit mengevaluasi secara detail. Sebagai contoh Nawa Cita butir ke-5, tentang kesejahteraan hidup, pendidikan, dan kesehatan; apa saja K/L yang terkait? Misalnya, Kementerian Kesehatan ingin masuk, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pun demikian. Lalu, kami memetakan kembali dimensi pembangunannya, misalnya masuk dimensi pembangunan I (kemanusiaan), tetapi masih belum jelas untuk memakai peraturan tahun 2017 atau 2018. Nawa Cita mengarah ke sana, tetapi kami tidak pernah mendapatkan dokumen perencanaannya. Kami mengevaluasi dengan memetakan sendiri kesesuaian antarsektor.

S: Bukankah ada program prioritas?

R: Belum lagi program prioritas. Program prioritas dulu ada 88, sekarang ada 30. Untuk tahun 2018 belum ada kejelasan program prioritas dari tiap-tiap K/L. Seperti di Bappenas, program prioritas hanya ada empat: perencanaan pembangunan, pembangunan lingkungan, manajemen pembangunan, serta sarana dan prasarana. Kementerian Pertanian dengan kedaulatan pangan

bisa kami cantumkan pada prioritas ke-6, yaitu meningkatkan kualitas hidup rakyat dan daya saing internasional. Di program kami, adanya program ketahanan pangan sehingga tidak akan ketemu. Di Kementerian Pertanian juga ada program irigasi, tetapi di program prioritas tidak ada karena di dokumen perencanaan tidak ada program prioritas. Yang terjadi justru program K/L inilah yang melekat di eselon, yang kemudian menimbulkan masalah: bagaimana proses *monitoring*-nya? bagaimana dengan level-nya, *output* atau subkomponen?

S: Masalah awalnya di mana?

R: Masalah awalnya adalah tidak sinkronnya sinergi K/L mengenai perencanaan dan penganggaran.

“Perlu kodifikasi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.”

Sekarang dirataskan sesuai PP 40/90. Sikronisasi dan penyusunannya harus bersama dan kalau bisa ada kodifikasi. Saat ini, Nawa Cita sampai dengan kegiatan tidak ada kodifikasinya sama sekali. Oleh karena itu, Menteri Keuangan dan Waka Keuangan saat ini sedang merataskan *e-planning*. Secara sederhana, saya minta adanya kodifikasi tanpa perlu mengubah PP. Misalnya, kodifikasi Nawa Cita I (negara hadir), masuk dimensi pembangunan I (kemanusiaan), lalu diturunkan dalam prioritas pembangunan kemanusiaan 001. Bagaimana jika menggunakan prioritas dari program tiap-tiap K/L? Misalnya, penanggulangan kemiskinan, hanya ada di program prioritas dari Kementerian Sosial. Namun, ketika BPK masuk untuk pemeriksaan, harusnya penanggulangan kemiskinan ada di semua K/L.

S: Bagaimana perencanaan teknokratis dan politis disusun?

R: Perencanaan teknokratis dan politis pertama kali disusun oleh presiden melalui DPR dengan tidak boleh menyalahi RPJMN. Hasil politik tidak dimasukkan ke dalam undang-undang karena itu merupakan visi-misi presiden yang kami anggap sebagai proses politik. Kami tidak pernah membahas RPJM dengan presiden, tetapi kami membahas RKP dengan DPR. Itu mulai terjadi, karena RKP kami dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan.

S: Apakah ada masalah ketika awal perencanaan teknokratis dan politis?

R: Tidak ada masalah

S: Bagaimana dengan Tim KSP?

R: Itu beda lagi karena banyak nomenklatur. Mereka langsung menggunakan pola Trisakti. Jadi, keluarannya bukan prioritas nasional, tetapi program aksi. KSP juga mengevaluasi 100 hari janji presiden, di kami tidak ada evaluasi 100 hari janji presiden. Kami pernah ditanya tentang 100 hari janji presiden. Saya minta Pak Dading untuk menjawab posisi 100 hari janji presiden di kedeputan, ternyata ada di subkomponen, kemudian bersambung di

level kegiatan. Jadi *leveling* 100 janji presiden pun berbeda-beda. Tata kelola pemerintahan yang baik WTP berada di level *impact*. Jadi memetakan itu saja, kami kesulitan. KSP melakukan itu, kalau mau digabung harus kita duduk bersama. Tidak perlu dimensi pembangunan. Nawa Cita, program aksi, dan kegiatan-kegiatan tentang janji presiden berkembang jadi 526 tahun ini. Dengan perubahan itu, apakah harus mengubah sistem pendekatan perencanaan pembangunan?

Dalam rangka perubahan dari *moneys follows fuction* menjadi *money follows program*, pendekatannya menjadi teknokratik, holistik, parsial, dengan *mazhab* membangun titik wilayah. Untuk memetakan ini perlu kode dan holistik. RPJMN perlu memastikan jumlah RTRW yang dipatuhi rencana dan memastikan perencanaan yang dibuat tidak menyalahi RTRW. Ini yang belum pernah dievaluasi.

Contohnya, saat kami mengikuti kegiatan presiden yang menghadiri *groundbreaking* di Bandara Kualanamo, Medan, Bupati tidak berani mengeluarkan izin RTRW karena lahan di lapangan dimiliki oleh PT Inalum. PT Inalum tidak mengizinkan. Jika kami mengeluarkan izin, kami akan menyalahi kewenangan PT Inalum. Kementerian Perhubungan mempunyai kereta api, tetapi jalurnya milik PT Inalum dan belum dibebaskan. Bappenas harus berani sampai ke hal detail, jika tidak, kami akan ditinggal K/L karena tidak berani bermain di teknis. Jadi, *trust* harus dibangun. Kementerian Keuangan mengeluarkan standar biaya, kami mengeluarkan komponennya.

S: Bagaimana kesepakatan Indikator keberhasilan pembangunan dengan K/L? Apakah ada kendala atau kesulitan?

R: Mudah, indikatornya dimasukkan, lalu K/L mendapatkan anggaran. Bila dicek indikatornya, level kami berada di proses, yaitu melakukan sosialisasi hingga pemetaan. Setelah pemetaan tersebut jadi, kami tidak tahu mengenai penggunaannya, termasuk dalam hal keuangan, seperti penyaluran anggaran DAK. ■

HARYANTO

Ketua Umum AP2I

Para Perencana Pemerintah Harus Dilibatkan dalam Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kerjanya Masing-Masing

Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) menjadi wadah penting bagi para perencana pemerintah untuk terus berbagi dan meningkatkan kemampuannya melalui berbagai kegiatan yang ada di organisasi. Bagaimana AP2I melihat perencanaan pembangunan saat ini dikaitkan dengan Nawa Cita? Apa saja hal yang dilakukan oleh AP2I untuk meningkatkan para perencana pemerintah yang tersebar di seluruh Indonesia? Ketua AP2I, Haryanto, menyampaikan pandangannya kepada Simpul.

“Saya akan mencoba membangun peran perencana yang signifikan, nanti kita akan mulai dengan pendirian Lembaga Standardisasi Perencana.”

Simpul (S): *Bagaimana AP2I melihat jalannya perencanaan pembangunan saat ini dikaitkan dengan Nawa Cita?*

Haryanto (H): Saya akan bicara secara umum dahulu. Secara teknis dalam perspektif AP2I, posisi AP2I mendorong keterlibatan para perencana pemerintah dalam menerjemahkan Nawa Cita. Kami akan melihat dulu posisi tiap-tiap perencana. Mungkin harapan saya sangat besar. Apabila rekan-rekan perencana diajak serius dalam keterlibatan menerjemahkan Nawa Cita, mereka dapat berperan dalam perencanaan dengan luar biasa.

S: Bagaimana posisi perencana pemerintah (JFP) saat ini?

H: Posisi perencana ini agak margin, dalam arti jika satu tenaga perencana tidak ada, proses perencanaan tetap berjalan. Berbeda dengan dosen dan struktural, keduanya tidak bisa saling hilang atau harus ada. Jika dekan tidak ada maka dosen juga tidak jalan; begitupun jika ada dosen, tetapi tidak ada dekan, tidak ada yang akan mengurus administrasi. Berbeda dengan perencanaan. Jika tidak ada Jabatan Fungsional Perencana (JFP), perencanaan tetap berjalan. Sebaliknya, bila tidak ada pejabat struktural, JFP tidak akan jalan karena tidak ada yang mengurus AK dan lain-lain.

Bagaimana jika dikaitkan dengan Nawa Cita? Nawa Cita tidak melihat pelakunya, yang penting perencanaan yang mampu menjabarkan Nawa Cita. Nawa Cita sebenarnya ada tiga inti, yaitu pembangunan dari pinggiran, revolusi mental, dan negara hadir. Ketiganya dijabarkan dalam tujuh misi Nawa Cita. Di Bappenas, ketiga inti pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam Buku I RPJMN 2015–2019. Di dalamnya tercantum arah kebijakan umum, yaitu norma pembangunan dan agenda pembangunan. Ada tiga agenda pembangunan, yaitu manusia, sektor unggulan, dan kewilayahan yang di bawahnya ada Kondisi Perlu. Nawa Cita diselaraskan ke dalam dimensi pembangunan tersebut dan benang merahnya dituangkan ke dalam kebijakan dan program prioritas nasional, kemudian baru diterjemahkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan lembaga. Implementasi Nawa Cita adalah meletakkan landasan yang kukuh terhadap tiga fokus pembangunan pada tahun pertama, yaitu mengubah ekonomi berbasis konsumsi ke produksi,

subsidi yang tepat sasaran, dan mendorong pembangunan yang merata di luar Pulau Jawa. Ini merupakan yang pertama. Saya melihat subsidi tahun 2014 sekitar 3.000 triliun, yang kemudian dikurangi sekitar 90 triliun untuk direalokasi ke hal-hal produktif demi mendorong produktivitas.

Misalnya, selama ini premium dibeli dengan harga yang murah, tetapi saat ini tidak lagi dan dialihkan untuk kegiatan yang mendorong produktivitas, seperti listrik atau kesehatan. Mungkin perlu dilihat referensi pembangunan tahun 2015. Data menunjukkan angka kemiskinan menurun, walaupun pertumbuhan ekonomi tumbuh sekitar 5,1%. Namun, apabila dibandingkan dengan negara di kawasan Asia Timur, pertumbuhan kita relatif tinggi dengan kondisi ekonomi global yang tidak jelas. Termasuk apabila dilihat kondisi di Yunani, Eropa, dan Amerika, kita jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 2,5%. Selain itu, tingkat ketimpangan juga menurun dibandingkan tahun 2014–2015, dari 0,4 menjadi 0,39 sekian. Tren terlihat sudah membaik, walaupun belum sesuai dengan harapan dua digit atau sekitar 3% lebih baik.

S: Bagaimana dengan peran perencana di instansi daerah dan di pusat?

H: Di Bappenas, saya merasa sudah sangat bagus. Perencana diawali dengan tidak ada eselon IV, begitu masuk langsung menjadi perencana. Hal ini bagus jika diterapkan di K/L dan Pemerintah Daerah. Jadi nanti akan menjadi suplemen, bukan substitusi; bukan saling menggantikan, tetapi saling melengkapi. Ketika saling melengkapi maka fungsi kedua-duanya akan signifikan antara fungsional dan struktural. Fungsional tanpa struktural, tidak akan bisa berbuat banyak. Ke depan arahnya akan seperti itu. Saya akan mencoba membangun peran perencana yang signifikan, nanti kita akan mulai dengan pendirian Lembaga Standardisasi Perencana. Mudah-mudahan tahun ini dapat

terrealisasi. Konteks perencana untuk berperan dalam Nawa Cita belum berdampak signifikan karena pekerjaan masih didominasi oleh pejabat struktural. Kecuali di Bappenas, Perencana Pertama dan Perencana Muda menjadi tulang punggung. Perencanaan Ekonomi, misalnya, yang membuat *running* metode makro ekonomi adalah rekan-rekan Perencana Pertama dan Perencana Muda. Jadi, apabila mereka tidak ada, mungkin kualitasnya menjadi kurang baik, kira-kira seperti itu.

“Apa yang dilakukan AP2I adalah membangun solidaritas, karena dengan kondisi seperti ini kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.”

Namun, rekan-rekan di daerah dan kementerian cukup bervariasi. Sebagian dari mereka ada yang tidak dilibatkan dalam koordinasi perencanaan pembangunan, misalnya tidak mendapatkan undangan Musrenbang atau tidak diberi tahu ketika ada Musrenbangdes. Meskipun demikian, di beberapa daerah, perencana selalu dilibatkan. Misalnya, di Jawa Tengah, RKP harus dikerjakan oleh perencana di

Bappeda. Fungsional perencana mempunyai tugas dan fungsi menyusun RKP dan semua hal substantif, sedangkan struktural hanya bertugas *me-review*, memfasilitasi pertemuan-pertemuan, termasuk mengadakan *focus group discussion* (FGD). Di beberapa daerah juga sudah seperti itu, tetapi di kementerian masih bervariasi.

S: Bagaimana komposisinya?

H: Komposisi perencana relatif. Di LIPI, jumlah JFP sekitar 70 orang, sedangkan di Kementerian Agama jumlah JFP sekitar 200 orang. Namun, Kementerian Agama tidak melakukan perencanaan. Apakah tugas Kementerian Agama tidak jalan? Tidak juga, karena peran perencana hanya sebatas menyusun RKKL, peran di kanwil-kanwil tidak signifikan. Di BPPT, peran perencana juga belum signifikan. Di daerah, misalnya di Provinsi Jawa Barat, juga bukan tidak berfungsi dengan baik dengan adanya penghilangan eselon IV. Orang-orang di situ pindah ke unit kerja lain dan tidak ingin mengubah perencanaan yang

lebih baik. Ini kejadian yang nyata, misalnya ada kebijakan pimpinan yang bukan mengutamakan Perencana Pertama dan Perencana Muda, tetapi lebih mengutamakan struktural atau unit kerja lain. Intinya, sangat berat membina perencana saat ini.

S: Apa yang dilakukan AP2I melihat kondisi ini?

H: Apa yang dilakukan AP2I adalah membangun solidaritas karena dengan kondisi seperti ini, kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Saya mencoba untuk mengoordinasikan dan sekarang sudah terdata sekitar 1.200 orang dalam waktu kurang dari satu tahun, mulai bulan Mei 2016 sampai dengan sekarang. Mereka dengan sukarela bergabung dengan AP2I, sebelum saya masuk dan belum mempunyai anggota. Saat ini kami juga mencoba untuk membangun situs (*website*) sebagai sarana komunikasi antaranggota AP2I. Setiap hari, sampai hari ini pun, ada yang mendaftar AP2I, mulai dari 2 orang, 5 orang, hingga 10 orang. Bahkan setelah pertemuan, ada 20 orang sekaligus mendaftar sehingga terkumpul 1.200 orang anggota dengan data lengkap mulai dari nama, NIP, unit kerja, nomor telepon, nomor HP, pos-el (*e-mail*), dan lain-lain. Saya mencoba untuk merangkul semuanya.

S: Apa harapan dan motivasi mereka dalam AP2I?

H: Kami pernah coba menanyakan motivasi mereka mendaftar, sekadar iseng atau memang mau berinteraksi dalam komunitas. Saat kami mengadakan Forum Diskusi Nasional (FDN) di Jakarta, saya memperkirakan peserta yang mengikuti hanya sekitar 350 orang, tetapi yang hadir justru sekitar 650 orang, luar biasa. Itu berarti banyak perencana yang merasa tidak optimal dalam perencanaan. Hal ini terbukti di sesi kedua acara, mereka banyak yang mengeluhkan ketidakefektifan pemanfaatan mereka di unit kerja masing-masing, seperti tidak diberikan pekerjaan dan lain-lain. Dalam diskusi tersebut, kami mengusulkan agar dibuat mekanisme kerja antara struktural dan fungsional perencana. Hal ini tidak hanya berlaku di Bappenas, tetapi juga secara nasional sehingga peran perencana menjadi lebih optimal.

Perencana dibayar sangat mahal oleh negara, mereka berpendidikan S1, dan mereka bukan lagi mengerjakan teknis. Hal ini akan direkomendasikan dan sekarang masih digodok.

S: Apa rekomendasinya?

H: Kami merekomendasikan antara lain:

1. Terkait dengan review Kemenpan 16/2001 tentang JFP dan Angka Kreditnya, yang sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan kebijakan, dimana sekarang sudah ada UU ASN, UU 17, UU 25, UU 23, untuk mengubah agar perencana dapat terlibat dalam pembangunan;
2. Tunjangan tahun 2007 belum disesuaikan, harus ditinjau kembali;
3. Mekanisme kerja Struktural dan Fungsional Perencana dan sinergi perencanaan dan anggaran.

S: Apa rencana ke depan AP2I?

H: Ke depan, kami akan merumuskan SKPI. Perencana harus memiliki Standar Kompetensi. Saat ini, Renstra dan RPMD disusun oleh konsultan yang belum tentu terjamin penguasaannya terhadap perencanaan. Oleh karena itu, kami akan mencoba melalui keputusan menteri untuk melakukan sertifikasi terhadap konsultan yang menyusun Renstra dan RPMD sebagai jaminan. Begitu juga perencana, misalnya Perencana Madya harus mempunyai sertifikat L1 L2 dan sebagainya. Dengan demikian, apabila perencanaan dibuat oleh perencana yang tidak mempunyai sertifikat maka perencanaan tersebut menjadi tidak sah. Seperti halnya pengadaan barang dan jasa, apabila disusun oleh yang tidak bersertifikat maka tidak sah. Dengan demikian, dalam mendorong Nawa Cita, perencana akan berpikir kesesuaian perencanaan tersebut dengan Nawa Cita. Di situlah peran perencana dalam implementasi Nawa Cita akan semakin kuat. Yang terjadi selama ini masih elitis.

S: Apakah ada kendala selama ini termasuk dalam rencana ini ?

H: Kendalanya adalah pemahaman para perencana. Sebenarnya pemahaman para pimpinan struktural juga perlu di-*reform*, diubah, dan diperbarui. Jadi, pimpinan struktural harus sadar bahwa ada struktural dan fungsional dan kedua-dua merupakan komplemen, bukan substitusi. Itu merupakan pandangan secara khusus. Secara umum, perencana tidak kompeten, anggapan fungsional perencana sebagai "orang yang posisinya marginal" masih melekat di kalangan struktural. Anggapan tersebut juga terbentuk oleh perilaku kurang baik dari rekan-rekan perencana, walaupun tidak semua. Misalnya, tidak mampu bekerja dengan cepat, lambat dalam merespons instruksi atasan, kualitasnya tidak bisa dipakai, bekerja hanya untuk mendapatkan angka kredit, dan lain-lain. Itu yang harus diubah menjadi orang yang cekatan, produktif, dan profesional, Caranya menggunakan sertifikasi tadi.

S: *Bagaimana dari sisi regulasi?*

H: Kerangka Regulasi AP2I menyebutkan bahwa dalam rangka mendorong profesi, peran, dan fungsi perencana maka instansi pembina perencana membentuk asosiasi. Hal itu dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) sehingga asosiasi perencana sangat kuat keberadaannya. Memang kami belum masuk dalam UU No. 25. Mungkin jika ada revisi UU No. 25, kami akan memasukkan klausul yang menyinggung peran asosiasi dalam menjaga kaidah-kaidah keilmuan di bidangnya. Norma dan kode etik perencana nantinya akan dilarikan ke sana. Oleh sebab itu, posisi perencana sudah kuat dengan adanya Kepmen dan UU ASN yang menguatkan perencana fungsional. Peran organisasi profesi perencana pun sudah jelas, bahkan sudah diamanatkan dalam PP. Saat ini, tinggal kemauan orangnya atau komunitasnya untuk digerakkan ke sana. Saya mencoba untuk mengubah semua ini, walaupun tidak bisa dalam waktu 1–2 tahun. Untuk sekarang, secara bertahap, AP2I membangun sebuah sistem agar perencana lebih optimal.

S: *Apakah AP2I juga melakukan peningkatan kompetensi perencana, di samping dilakukan oleh*

Bappenas (karena mungkin tidak semua daerah dapat mengikuti pelatihan dalam peningkatan kompetensi)?

H: Kami tidak bisa keluar dari AD/RT. Peningkatan kapasitas perencana juga masuk dalam AD/RT AP2I, dan memang kami lakukan tanpa menduplikasi yang dilakukan pembina. Kami menyampaikan informasi kepada anggota asosiasi mengenai kegiatan peningkatan kompetensi yang dilakukan pembina, termasuk beasiswa Diklat Gelar dan Diklat Non-Gelar. Tugas AP2I menjadi pelengkap yang dilakukan oleh pembina. Contoh kongkretnya adalah aplikasi e-Dupak yang kami kembangkan. Ini sangat membantu anggota AP2I, yang kebetulan aplikasi ini belum dikembangkan oleh Instansi Pembina. Kami melakukan sosialisasi tentang e-Dupak dan animonya cukup luar biasa. Angkatan I sekitar 80 orang masuk, angkatan II sekitar 40 orang masuk, dan angkatan III sekitar 38 orang, dan beberapa permintaan sosialisasi dari instansi misalnya KKP, Perpustakaan, dan BPOM di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kegiatan tersebut tidak membebani Instansi Pembina, sangat fungsional, dan sangat membantu. Contoh lain adalah tentang pengumpulan angka kredit. Instansi Pembina hanya melakukan Diklat Pengumpulan Angka Kredit (AK) yang syaratnya Gol. III C ke atas dan itupun bagi tim penilai. Bagaimana yang Gol. III A dan III B? Kami melakukan diklat pengumpulan AK bagi mereka, tetapi bukan tim penilai, melainkan perencana. Kami menyusun pengumpulan AK Fungsional Perencana dengan e-Dupak. Jadi, kami saling melengkapi, bukan mengambil peran Instansi Pembina.

S: *Apakah ada hal lainnya?*

H: Kami berpikir mengenai hal-hal yang belum dilakukan oleh Instansi Pembina (terhadap perencana); termasuk melakukan advokasi terhadap masalah perencana, misalnya terkait dengan pengangkatan yang tidak diakui oleh BKN, penilaian AK yang tidak utuh (dari 100 yang diajukan, hanya diakui 20), tidak diberikan pekerjaan oleh atasan, dan-lain-lain. Di situ kami mengoptimalkan peran perencana di unit kerjanya sesuai dengan tupoksi.

Kebijakan di Pemerintah Pusat sangatlah cepat. RKP 2018 dan kebijakan baru kami informasikan tanpa birokrasi, yaitu melalui situs (*website*) AP2I. Karena Bappenas tidak melakukan sosialisasi secara nasional dan perencana juga tidak diundang dalam musrenbangprov dan musrenbangnas, di sini peran AP2I dalam membantu menyosialisasikan.

S: Apakah AP2I pernah mengevaluasi peran perencana, baik di pusat maupun daerah?

H: Kalau dalam hitungan persentase kami belum mempunyai data, tetapi kalau *by case* di Bappenas, peran Perencana Pertama dan Perencana Muda sangat menonjol. Hal tersebut saya amati sendiri, misalnya di Kedeputusan Ekonomi. Peran Perencana Pertama dan Perencana Muda di Jawa Tengah dan Kuningan juga sudah bagus. Meskipun demikian, ada 1–2 unit yang masih merasa dimarginalkan, tetapi saya tidak percaya begitu saja. Setelah saya cek ke strukturalnya, ternyata memang terjadi dilema, karena perencana tersebut kurang baik dalam bekerja (tidak cepat dalam mengerjakan tugas dan lain-lain).

Hal kedua yang *urgent* dilakukan pembina adalah *review* Permen PAN No. 16 Tahun 2001, karena sudah tidak sesuai dengan UU ASN, UU No. 17, UU No. 25, dan UU No. 23. Kami sempat berdiskusi dengan KemenPAN bahwa Perencana Madya dan Perencana Utama *output* kerjanya haruslah *outcome*, yaitu proses. Mungkin ke depan bukan lagi butir-butir kerja, tetapi *output*-lah yang diinginkan oleh KemenPAN.

Berikutnya tentang tunjangan yang dari 2007 belum diubah, sambil menunggu PP turunan dari UU ASN. Selanjutnya tentang mekanisme kerja struktural dan fungsional. Nuansanya jangan membidik fungsional, tetapi membidik struktural. Jadi, jangan sampai struktural tidak tahu yang dilakukan oleh fungsional. Selama ini penyusunan mekanisme kerja fungsional perencana di Bappenas masih berfokus pada fungsional sehingga struktural tidak mau membaca. Padahal hal itu merupakan pembagian pekerjaan: pembinaan kepegawaian di Biro Kepegawaian,



Foto: <http://cdn.business2community.com/>

pembinaan teknis di tingkat direktur, dan pembinaan struktural di Kapus. Bila struktural tidak membaca maka tidak akan berjalan.

Pengembangan *capacity building* juga diutamakan untuk diberikan kepada fungsional perencana, misalnya pada Diklat *Training of Trainer* (ToT). Selanjutnya, *database* perencana juga perlu diperbaiki sehingga Pusbindiklatren dapat memetakan kebutuhan diklat bagi perencana dengan lebih pasti (bukan hanya perkiraan), misalnya jumlah orang yang akan didiklatkan untuk kebutuhan kenaikan pangkat, lama seseorang berada di JFP, dan lain-lain. AP2I siap membantu karena *database* sangat penting, alokasi anggaran pun dibuat berdasarkan *database* tersebut. Jangan sampai perencana yang akan naik jabatan harus mengantre hingga dua tahun. Aplikasi e-Dupak juga akan menjadi penting karena dapat digunakan untuk melihat jumlah AK terakhir dan lain-lain.

S: Dari pemantauan yang dilakukan Pusbindiklatren, mengapa peserta diklat dari JFP masih rendah, hanya sekitar 10% dari total peserta?

H: Salah satu kendalanya karena Pusbindiklatren tidak mempunyai *networking* dengan Fungsional Perencana. Oleh karena itu, Pusbindiklatren bisa bekerja sama dengan AP2I ketika mengadakan diklat. ■



Rintisan Kerja Sama Pusbindiklatren Bappenas dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara Tahun 2016

Penulis: Reza Satria Arjakusuma

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 556 mencantumkan bahwa salah satu fungsi Bappenas adalah *capacity building*, yaitu meningkatkan kapasitas institusi perencanaan di Indonesia melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia di dalamnya. Selanjutnya fungsi ini didelegasikan ke salah satu unit eselon II, yaitu Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas.

Sejak tahun 1984, Pusbindiklatren Bappenas telah memfasilitasi dan menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan (Diklat) Gelar di dalam negeri maupun di luar negeri yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi staf perencana, baik di pusat maupun di daerah. Penyelenggaraan program diklat gelar Pusbindiklatren Bappenas dilaksanakan melalui kerja sama dengan 20 (dua puluh program) studi di 11 (sebelas) perguruan tinggi negeri di Indonesia dan Universitas Jepang melalui beasiswa Pusbindiklatren Bappenas, yaitu *Professional Human Resources Development*

(PHRD) *phase* IV (IP-535) yang bersumber dari pinjaman JICA (pemerintah Jepang). Program diklat gelar yang ditawarkan adalah program S2/S3 Dalam Negeri, S2 *Linkage* di Indonesia dan Jepang, serta S2/S3 Luar Negeri di Jepang.

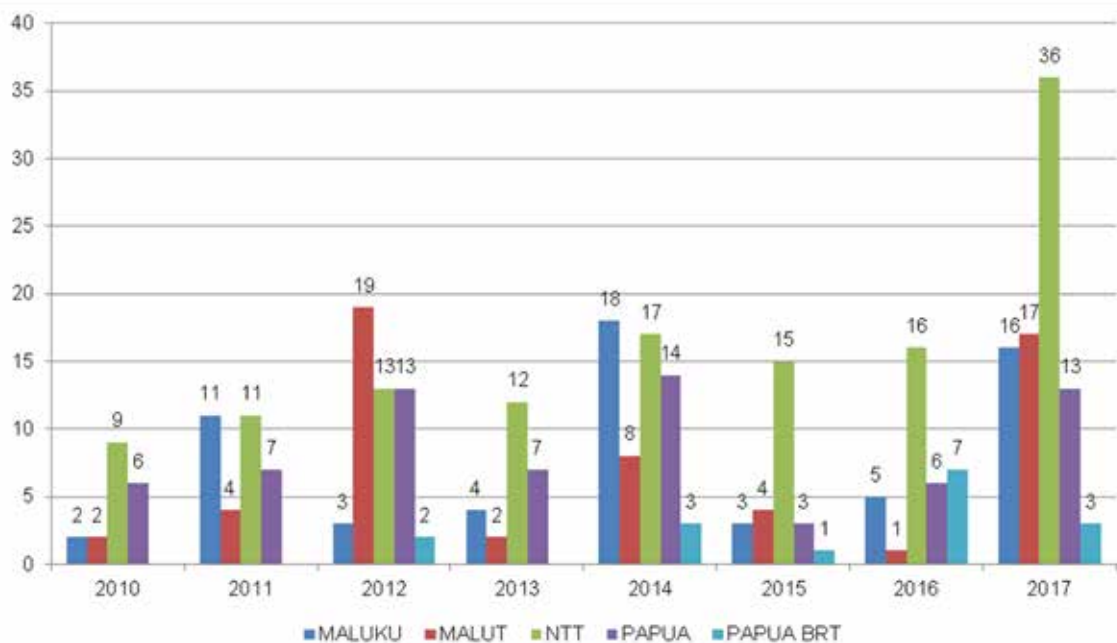
Proses penyelenggaraan Diklat Gelar Pusbindiklatren Bappenas didahului oleh proses penawaran beasiswa Pusbindiklatren Bappenas melalui surat Kepala Pusbindiklatren Bappenas yang ditujukan kepada

1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga di Pemerintah Pusat;
2. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota; dan
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tindak lanjut surat penawaran ini adalah daftar nama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diusulkan oleh lembaga pemerintah yang bekerja di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengikuti proses seleksi beasiswa Pusbindiklatren Bappenas. Surat

usulan ini harus ditandatangani oleh pejabat penanggung jawab kepegawaian dan/atau pejabat lain serendah-rendahnya eselon II di masing-masing Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Meskipun demikian, selama penyelenggaraan PHRD *phase* III (tahun 2006–2013), Pusbindiklatren menemukan ketidakseimbangan usulan ASN dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, khususnya ASN yang berasal dari wilayah Indonesia Timur (Provinsi NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat) seperti yang tercantum dalam grafik di atas. Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa usulan nama ASN yang berasal dari wilayah Indonesia Timur jumlahnya sangat sedikit. Gejala ini menjadi perhatian khusus Pusbindiklatren Bappenas karena sangat penting dalam kaitannya dengan peningkatan kapasitas institusi pemerintah. Dalam proses pembangunan nasional, pada tahap tertentu, seluruh lembaga pemerintah harus berinteraksi dan berkoordinasi satu sama lain untuk melaksanakan proses pembangunan nasional. Untuk menjamin proses koordinasi yang lancar dan berkualitas, dibutuhkan standar kompetensi kemampuan (pengetahuan dan keterampilan) yang setara dari tiap-tiap lembaga pemerintah tersebut.



Sehubungan dengan dimulainya PHRD IV sejak tahun 2014, yang akan berlangsung hingga tahun 2023 dan dalam rangka mengenali penyebab dan/atau hambatan para ASN di Provinsi Maluku dan Maluku Utara untuk mengakses beasiswa Pusbindiklatren Bappenas, diperlukan kegiatan rintisan pembentukan unit koordinasi di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Untuk keperluan tersebut, Pusbindiklatren Bappenas telah melakukan kunjungan serta pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan Maluku Utara dalam rangka mengumpulkan masukan dari kantor Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di kedua provinsi tersebut.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan rintisan unit koordinasi Diklat Gelar Pusbindiklatren Bappenas, baik di Provinsi Maluku maupun Maluku Utara, dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan pada tanggal 25–27 Mei 2016, yaitu tahap



survei. Pada tahap ini, Bidang Perencanaan Diklat Pusbindiklatren Bappenas mengadakan pertemuan dengan Bappeda Provinsi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi, dan Sekretariat Daerah (Sekda) Provinsi. Maksud pertemuan pendahuluan ini adalah untuk menyamakan persepsi Pusbindiklatren Bappenas dengan ketiga unit kerja tersebut mengenai tujuan pelaksanaan kegiatan rintisan unit koordinasi Diklat Gelar. Berdasarkan hasil koordinasi dengan ketiga unit kerja tersebut, dapat disepakati bahwa akan dilaksanakan Rapat Konsinyering antara Pusbindiklatren Bappenas dengan Provinsi Maluku pada tanggal 14–16 Agustus 2016 dan antara Pusbindiklatren Bappenas dengan Provinsi Maluku Utara pada tanggal 18–20 Agustus 2016.

Pelaksanaan Konsinyering Rintisan Unit Koordinasi Diklat Gelar di Provinsi Maluku dihadiri oleh Dr. Ujir Halis selaku Asisten II Sekretariat Daerah, Provinsi Maluku dan Marije Lopulalan, S.H. selaku Ketua Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Provinsi Maluku. Selain kedua pejabat di atas, pertemuan ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat dan ASN di lingkup Provinsi Maluku. Pada kesempatan ini, Pusbindiklatren Bappenas dan Pemerintah Provinsi Maluku mencapai kesepakatan mengenai prosedur pengusulan ASN Provinsi Maluku untuk mengikuti seleksi Pusbindiklatren yang dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan Bersama (NKB).

Pelaksanaan Konsinyering Rintisan Unit Koordinasi Diklat Gelar di Provinsi Maluku Utara dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur, Dr. Labayoni dan Kepala BKD Provinsi Maluku Utara, Bapak Jamdi T. Selain kedua pejabat di atas, pertemuan ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat dan ASN di lingkup Provinsi Maluku Utara. Pada kesempatan ini, Pusbindiklatren Bappenas dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencapai kesepakatan mengenai prosedur pengusulan ASN Provinsi Maluku Utara untuk mengikuti seleksi Pusbindiklatren yang dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan Bersama (NKB). Dengan NKB ini diharapkan keikutsertaan ASN dalam mengikuti proses beasiswa bisa meningkat yang pada akhirnya meningkatkan kompetensi ASN di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. ■

"Education Reform to Enhance Nation Competitiveness"

Jogjakarta, 14 -15 Januari 2017. | Jogja Expo Center



Pameran Program Beasiswa: *Java Education Festival 2017, Holland Scholarship Day, dan Pusdiklat Edufair*

Penulis: Dwiyanto Bambang Purwanto

Pusbindiklatren Bappenas mempunyai tugas utama melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) serta mengadakan program pendidikan dan pelatihan kepada staf Kementerian PPN/ Bappenas serta institusi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Salah satu kegiatan untuk melaksanakan Tugas Pusbindiklatren Bappenas adalah dengan memberikan informasi sebanyak banyaknya dan seluas-luasnya kepada para Aparatur Sipil Negara

(ASN) baik di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain dengan mengadakan sosialisasi ke beberapa daerah di Indonesia yang dilakukan setiap tahunnya, Pusbindiklatren Bappenas juga mengikuti berbagai pameran program beasiswa yang dilaksanakan oleh kedutaan negara sahabat maupun instansi serta lembaga donor pemberi beasiswa.

Pada tahun 2017, Pusbindiklatren Bappenas telah mengikuti tiga kegiatan pameran program beasiswa atas undangan dari kedutaan dan instansi pemberi beasiswa.

1. *Java Education Festival 2017 (JEF 2017)*

Pameran yang dilaksanakan pada tanggal 14–15 Januari 2017 ini adalah festival pendidikan tinggi, beasiswa, dan budaya yang bukan hanya terbesar di Yogyakarta, tetapi juga sangat eksklusif dan strategis. JEF 2017 adalah media yang sangat efektif dan efisien untuk menyebarkan informasi pendidikan kepada masyarakat terutama para Aparatur Negeri Sipil (ASN) yang sedang mencari perguruan tinggi dan beasiswa. Selain sebagai media promosi dan komunikasi aktif bagi para penyelenggara pendidikan, keberadaannya juga menjadi sarana edukasi dan konsultasi bagi calon peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sesuai dengan keinginan, kemampuan, dan kebutuhan.

Festival pendidikan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas SDM bangsa yang dapat menjawab segala tantangan zaman,

baik yang berskala nasional, regional, maupun global. Antusiasme pengunjung terhadap keikutsertaan Pusbindiklatren Bappenas pada setiap pameran pendidikan sangat tinggi, hal ini menunjukkan bahwa program-program Pusbindiklatren Bappenas sangat disambut baik dan sangat bermanfaat bagi pengembangan kapasitas pribadi maupun instansi perencanaan.

2. *Holland Scholarship Day*

Pameran ini dilaksanakan oleh Kedutaan Belanda di Jakarta, yang dilangsungkan pada Sabtu, 21 Januari 2017. Selain Pusbindiklatren Bappenas, pameran tersebut juga diikuti oleh berbagai lembaga dan instansi pemberi beasiswa diantaranya NESO, TIAS, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Indonesia Nederland Youth Society, AAS, Vrije Universiteit Amsterdam, Universitas of Amsterdam, Maastricht School fo Management, Leiden University, University





of Groningen, Wageningen university, IHS, dan STUNED. Walaupun beasiswa Pusbindiklatren Bappenas hanya diperuntukan untuk ASN, pengujung pameran yang mendatangi *stand* Pusbindiklatren cukup banyak, yaitu sekitar 80 orang dari berbagai kalangan.

Kegiatan dilakukan mulai dari pukul 11.00 dan berakhir pada pukul 16.00. Selain membuka *stand*, Pusbindiklatren Bappenas juga menyampaikan pemaparan oleh Wignyو Adiyoso, S.Sos, M.A., Ph.D. (Kepala Bidang Pengkajian Program Informasi dan Layanan Perencana) yang mewakili Kapusbindiklatren. Pemaparan tentang program beasiswa yang dikelola Pusbindiklatren Bappenas tersebut dihadiri sekitar 100 (seratus) pengujung.

3. Pusdiklat *Edufair*

Pameran ini diselenggarakan oleh Pusdiklat Kementerian Luar Negeri pada Senin, 23 Januari 2017, di Aula Pusdiklat Kementerian Luar Negeri. Dalam acara ini, selain Pusbindiklatren yang diundang dan disiapkan tempat pameran, juga terdapat Institute

Francais Indonesia, USINDO, STUNED, AAS, dan KOICA. Karena Peserta hanya sebatas pegawai Kementerian Luar Negeri pengujung di *stand* Pusbindiklatren hanya sekitar 50 (lima puluh) orang. Kapusbindiklatren membuka pameran sekaligus memberikan memaparkan tentang Program Beasiswa yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas.

Ada beberapa tujuan Pusbindiklatren Bappenas mengikuti Pameran Beasiswa tersebut.

1. Pusbindiklatren Bappenas dapat menginformasikan secara masif tentang Program Beasiswa yang dikelolanya;
2. Pameran beasiswa tersebut dapat menjadi ajang silaturahmi antara Pusbindiklatren Bappenas sebagai pengelola beasiswa dengan calon peserta penerima beasiswa.

Semoga acara semacam ini akan dapat terus dilakukan karena manfaat yang didapat sangat banyak dan informasi mengenai beasiswa akan lebih cepat tersebar. Informasi beasiswa Pusbindiklatren Bappenas juga bisa didapatkan secara *online* melalui situs www.pusbindiklatren.bappenas.go.id ■



Sharing Session Alumni Pendidikan dan Pelatihan Komponen 3 Program SPIRIT Tahun 2016

Penulis: Karyoto

Selain mengelola program beasiswa *Professional Human Resources Development* (PHRD) yang dibiayai pinjaman dari Pemerintah Jepang melalui JICA, Pusbindiklatren Bappenas juga mengelola program beasiswa *Scholarship Program for Strengthening the Reforming Institution* (SPIRIT) yang merupakan pinjaman dari Bank Dunia.

Pelaksanaan program beasiswa (pembiayaan diklat) SPIRIT terbagi dalam tiga komponen.

1. **Degree Scholarships for Ministry of Finance**, merupakan pembiayaan diklat yang dikhususkan bagi *Participating Agencies* (PA) dari Kementerian Keuangan.
2. **Degree and Non-Degree Scholarship for Other Participating Agencies (PA)**, merupakan pembiayaan diklat yang diberikan kepada 10 (sepuluh) PA selain Kementerian

Keuangan, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

3. **Program and Project Support**, merupakan pembiayaan diklat yang meliputi pengadaan konsultan, jasa, dan pendidikan pendukung bagi pengelola program SPIRIT. Penggunaan Komponen 3, khususnya bagi pembiayaan Diklat Non-Gelar untuk Pengelola Program SPIRIT Tahun 2016, telah dilaksanakan dan dikoordinir oleh *Project Management Unit* (PMU). Adapun peserta yang mengikuti Diklat

Komponen 3 adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dari Project Implementation Unit (PIU), dan 11 (sebelas) kementerian yang tergabung dalam Program SPIRIT, termasuk Kementerian Keuangan.

Pelaksanaan Diklat Komponen 3 Tahun 2016, diikuti 123 orang dengan lima topik diklat yang dilaksanakan di empat negara (lihat tabel).

Adapun staf Pusbindiklatren Bappenas yang mengikuti diklat tersebut sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang. Setiap peserta yang mengikuti Diklat Komponen 3 diwajibkan untuk memberikan pengalaman dan mentransfer ilmu yang didapat melalui acara *sharing session* di depan seluruh pimpinan dan staf Pusbindiklatren Bappenas.

Tujuan diadakannya *sharing session* ini adalah

1. membagi pengalaman dan ilmu pengetahuan yang didapat selama mengikuti diklat di Luar Negeri;
2. mengukur kemampuan para peserta dalam memahami dan mengerti materi diklat; serta

3. berkontribusi kepada Pusbindiklatren Bappenas dalam implementasi hasil ilmu pengetahuan yang didapat selama mengikuti diklat melalui *action plan* tiap-tiap peserta.

Acara *sharing session*, diatur dengan menyesuaikan jadwal Kapusbindiklatren, yaitu setiap Jumat dalam kurun Januari 2017 sampai dengan awal Februari 2017. Ini dilakukan agar tidak mengganggu tugas dan pekerjaan tiap-tiap peserta.

Selama pelaksanaan *sharing session*, peserta dapat mengikuti dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Kapusbindiklatren. Para peserta sangat antusias dalam mengikuti acara tersebut. Pemaparan, diskusi, sampai dengan penyusunan *action plan* dilakukan dengan sangat baik dan memenuhi harapan Kapusbindiklatren. Hal ini dikarenakan *action plan* yang disusun oleh para peserta benar-benar *action plan* yang akan digunakan untuk mendukung dan melengkapi sistem kerja di Pusbindiklatren Bappenas sehingga tugas dan fungsi Pusbindiklatren Bappenas dapat tercapai dengan baik. ■

No.	Topik Diklat	Tempat Diklat	Negara	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	<i>Financial Administration and Management for Sustainable Public Procurement in Indonesia</i>	MacQuire University	Sydney, Australia	29 Agustus–9 September 2016	25
2	<i>Strategic Human Capital Development Plan and Leadership</i>	Moscow State University	Moscow, Rusia	19–30 September 2016	22
3	<i>Management of Trainings</i>	AIM-UWA	Perth, Australia	3 Oktober–14 Oktober 2016	25
4	<i>Management of Scholarships</i>	University of Maryland	New York, USA	31 Oktober–11 November 2016	24
5	<i>Project Management for HRD</i>	JICE	Tokyo, Japan	7–18 November 2016	27



Hasil dari Forum Diskusi Nasional AP2I

Penulis: Hening Surya Bayu Anggoro

SEKRETARIS JENDERAL PENGURUS NASIONAL AP2I

Sesuai peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012, pada Pasal 556 tercantum bahwa salah satu fungsi Bappenas adalah *capacity building*, yaitu meningkatkan kapasitas institusi perencanaan di Indonesia melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia di dalamnya. Selanjutnya fungsi ini didelegasikan ke salah satu unit eselon II, yaitu Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas.

Tidak banyak masyarakat dan aparatur pemerintah yang sudah mengenal Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I). AP2I berdiri dalam rangka memenuhi amanat penjelasan Pasal 3

huruf b, PP RI Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disempurnakan melalui PP Nomor 40 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil bahwa organisasi profesi dibentuk dan menjadi wadah bagi para pejabat fungsional sesuai dengan rumpun jabatan fungsional yang bersangkutan. Untuk itu, Bappenas sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana, sesuai Pasal 1, Keputusan Menteri PAN Nomor 16 Tahun 2001, telah memfasilitasi pendirian organisasi profesi perencanaan dengan nama Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I).

Hingga saat ini, jumlah anggota AP2I sudah mencapai 1.105 orang: 16 orang Perencana Utama,

263 orang Perencana Madya, 349 orang Perencana Muda, 324 orang Perencana Pertama, dan 153 orang Pejabat Struktural Perencana, Dosen, dan Para Praktisi Perencanaan Pembangunan. Sementara itu, jika dilihat dari asal institusi, para anggota AP2I ini berasal dari Kementerian/Lembaga (513 orang), Pemerintah Provinsi (269 orang), Pemerintah Kabupaten (183 orang), Pemerintah Kotamadya (53 orang), serta Perguruan Tinggi dan institusi lain (83 orang). Dengan komposisi anggota AP2I tersebut, sudah saatnya AP2I merealisasikan perannya dalam mendorong peningkatan kapasitas dan produktivitas unit perencana di pusat dan daerah dengan merumuskan berbagai alternatif pemikiran terkait isu-isu strategis kebijakan publik nasional terkini.

Untuk itu, dalam rangka menjadikan satu rumusan gagasan-gagasan alternatif pemikiran yang terkait isu-isu strategis kebijakan publik nasional, Pengurus Nasional AP2I menyelenggarakan Forum Diskusi Nasional (FDN) Perencana Se-Indonesia Tahun 2016. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 5–6 Desember 2016 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.

FDN Perencana 2016 mengambil tema "Mengkaji Isu-Isu Strategis Kebijakan Publik, Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan". Tema ini menyoroti dua isu besar terkait kebijakan publik, yaitu isu sinergi perencanaan dan penganggaran serta isu implementasi UU ASN. Isu yang mendasari pemilihan tema diskusi di atas adalah munculnya sebuah fenomena baru yang sangat menarik, yaitu bahwa para pembuat kebijakan publik saat ini selalu dihadapkan pada dualisme antara pro dan kontra serta pada kondisi masyarakat yang semakin kritis, partisipatif, dan transparan.

FDN Perencana 2016 dihadiri oleh 650 peserta yang terdiri atas 375 orang Pejabat Fungsional Perencana (PFP)/Struktural Perencana dari Kementerian/ Lembaga, 117 orang PFP/Struktural Perencana di Provinsi, 87 orang PFP di Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, dan 64 orang dosen/praktisi/tamu undangan lain. Forum diskusi

tersebut menghadirkan tiga *keynotes speaker*, yaitu Ecky Awal Mucharam, S.E., M.Ak. (Anggota Komisi XI DPR RI), Asman Abnur, S.E., M.Si. (Menteri PAN dan RB), dan Dr. Ir. Imron Bulkin, M.U.P. (Sesmen PPN/ Sestama Bappenas yang mewakili Menteri PPN/ Kepala Bappenas). Selain menghadirkan pembicara kunci, Pengurus Nasional juga menghadirkan para pembicara yang kompeten di bidangnya, baik dari para praktisi/pejabat publik (Kantor Staf Presiden, Kementerian Keuangan, dan Bappenas), maupun para pengamat di bidang perencanaan dan kebijakan publik (Prof. Muhammad Ikhsan/FEB UI).

Isu yang dibahas dalam FDN Perencana mencakup 4 (empat) subtema:

1. Sinergi Perencanaan dan Penganggaran;
2. Sinergi Perencanaan Nasional dan Daerah;
3. Peran Perencana dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA); dan
4. Peningkatan Peran Pembina Perencana dalam Meningkatkan Kinerja Perencana di Pusat dan Daerah.

Pada masa lalu ketika para pemangku kebijakan dihadapkan pada kondisi semacam ini mereka bisa menggunakan pendekatan. Berbagai kalangan yang mencoba untuk berposisi sebagai antitesa sebuah produk kebijakan dapat diberangus, demonstran dipenjara, dan media kritis dibredel. Tapi saat ini, demokratisasi makin membesar, dan dilema-dilema kebijakan disikapi secara arif, sehingga kemampuan manajemen dan teknologi politik bagi para politisi saat ini jauh lebih tinggi dari pada masa otoritarianisme.

Acara FDN Perencana 2016 terselenggara atas dukungan seluruh anggota AP2I beserta lembaga-lembaga *sponsorship*, diantaranya Bank Sinarmas, Star Energy, PT. Unilab Perdana, Geo Dipa Energi, CNN Indonesia, TVRI, BRI, Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Koperasi Bappenas, serta Kementerian Agama RI.

Adapun butir-butir Rekomendasi Kebijakan Forum Diskusi Nasional (FDN) Perencana Se-Indonesia 2016 sebagai berikut.



1. Sinergi Perencanaan dan Penganggaran

Pemisahan antara fungsi perencanaan dan penganggaran berpotensi menimbulkan deviasi antara yang direncanakan (RKP) dengan yang dianggarkan (RKA). Deviasi berpotensi mengakibatkan inefisiensi keuangan negara dan cenderung mengikis pencapaian target-target pembangunan yang merupakan penjabaran dari Nawa Cita. Oleh karena itu, forum merekomendasikan kepada Pemerintah RI (Bappenas bersama Kementerian Keuangan) dan/atau bersama-sama DPR RI Komisi XI untuk menginisiasi skema sinergi perencanaan dan penganggaran dalam bingkai kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

Tujuan utama dalam tahap perencanaan pembangunan adalah menghindari korupsi, inefisiensi, dan ketidakefektifan program-program pemerintah dari tahapan/proses perencanaan, yang disebabkan oleh beberapa hal: (a) dokumen perencanaan yang tidak fokus dalam menjawab kebutuhan publik; (b) proses pelaksanaan yang tidak sejalan dengan rencana jangka menengah; (c) sering terjadinya pemahaman yang keliru terkait RPJMD yang dipandang sebagai dokumen yang tidak dapat diubah; dan (d) lemahnya

sinergi antara instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk itu, forum merekomendasikan kepada Pemerintah RI (Bappenas, Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan Kementerian Keuangan) untuk menginisiasi skema regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah (bukan sekadar surat edaran bersama) beserta turunannya mengenai Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.

3. Penguatan Peran Perencana dan Badan Perencana dalam Menghadapi MEA

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mensyaratkan adanya penghapusan aturan-aturan yang sebelumnya menghalangi perekrutan tenaga asing, termasuk tenaga ahli di bidang perencanaan pembangunan. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan daya saing dan kualitas profesi perencana pembangunan, forum merekomendasikan kepada Pemerintah RI (Bappenas dan BNSP) bersama-sama dengan AP2I untuk merumuskan instrumen sertifikasi profesi perencana sebagai dasar pengakuan kompetensi perencana dalam bentuk sertifikasi profesi bagi para calon pemangku profesi bidang perencanaan pembangunan.

4. Keputusan Menteri PAN Nomor 16 Tahun 2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana

dan Angka Kreditnya beserta peraturan turunannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebijakan publik, khususnya bila dikaitkan dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Untuk itu, forum merekomendasikan kepada Pemerintah RI (Bappenas, Menteri PAN-RB, dan BKN) untuk meninjau kembali dan menyempurnakan Keputusan Menteri PAN Nomor 16 Tahun 2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya beserta peraturan turunannya.

5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kinerja dan kebutuhan untuk berkinerja bagi profesi perencana saat ini. Untuk itu, forum merekomendasikan kepada Pemerintah RI (Bappenas dan Menteri PAN-RB) untuk meninjau kembali dan merumuskan penyempurnaan Peraturan Presiden tentang Perbaikan Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana.
6. FDN Perencana 2016 banyak menerima masukan dari para Pejabat Fungsional Perencana Pusat dan Daerah bahwa besarnya *grade* tunjangan kinerja bagi pemegang Jabatan Ahli Perencana, baik pada tingkat Muda (IIIc, IIId), Madya (IVa, IVb dan IVc), maupun Utama (IVd dan IVe) masih di bawah *grade* tunjangan kinerja bagi pemegang jabatan struktural eselon IV (IIIb dan IIIc). Untuk itu, forum merekomendasikan

kepada Pemerintah RI (Bappenas dan Menteri PAN-RB) untuk memformulasikan kesetaraan *grade* tunjangan kinerja antara Jabatan Fungsional Keahlian dengan jabatan struktural (administrasi dan pimpinan tinggi) dengan mempertimbangkan tingkat pengalaman kerja, kesetaraan golongan, dan tingkat pencapaian keahlian sehingga deviasi *grade* tunjangan kinerja (antara jabatan keahlian dan jabatan struktural) pada golongan/pengalaman kerja/keahlian yang setingkat/setara tidak terlalu jauh. Formulasi penyetaraan *grade* tersebut perlu pula diikuti formulasi penyetaraan beban kerja di antara ASN pada tingkat golongan/pengalaman kerja/keahlian yang setara.

7. Sebagian besar kementerian/lembaga/Pemda belum dapat mengoptimalkan peran perencana. Hal ini disebabkan tidak adanya mekanisme kerja yang jelas antara fungsional dan struktural dalam unit kerja perencanaan di pusat dan daerah dan kurangnya dukungan unit kerja dalam kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas bagi perencana dan pengembangan profesi perencana. Untuk itu, forum merekomendasikan agar Bappenas segera menyusun Peraturan Kepala Bappenas tentang mekanisme kerja antara jabatan fungsional dan jabatan struktural serta melakukan imbauan secara tertulis kepada biro perencanaan di K/L dan Bappeda di provinsi/kabupaten/kota untuk mengalokasikan dukungan kegiatan bagi penguatan kapasitas perencana dan pengembangan profesi perencana. ■



Solo, 26-28 September 2016

PUSAT PEMB
BADAN

Workshop Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2016 di Kota Solo

Penulis: Rita Miranda

Dengan adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), para pemangku jabatan fungsional perencana semakin memiliki peran penting sebagai aparatur negara dalam bidang perencanaan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, para perencana dituntut memiliki profesionalisme dan integritas yang tinggi, mempunyai kemampuan berpikir strategis, selalu berorientasi pada kualitas perencanaan, dan juga memiliki kemampuan untuk membangun jejaring kerja sehingga *output* dan *outcome* yang dihasilkan benar-benar dapat bermanfaat dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan semakin berkembangnya dinamika perencanaan dalam proses pembangunan yang berkesinambungan, tidak bisa dihindari bahwa perkembangan dinamika tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap para pemangku jabatan fungsional perencana. Dalam hal melakukan pekerjaan perencanaan, bisa saja terjadi masalah yang sangat krusial terhadap kompetensi seorang pejabat fungsional perencana jika tidak diiringi dengan perhitungan yang cermat. Masalah-masalah krusial dimungkinkan terjadi apabila ketika melakukan kegiatan perencanaan, kaidah-kaidah dalam setiap tahapan atau proses kegiatan perencanaan tidak dihiraukan. Karena dalam setiap proses tersebut, kompetensi

seorang perencana benar-benar dibutuhkan dan diuji agar dapat menghasilkan *output* yang bisa dipertanggungjawabkan. *Output* yang dihasilkan bisa berupa rumusan kebijakan maupun rekomendasi bagi pengambil kebijakan. Adapun bagi pemangku jabatan fungsional perencana bisa mendapatkan *reward* berupa angka kredit sebagai hasil dari kegiatannya apabila diajukan untuk dinilai.

Dari hasil penilaian angka kredit yang dilakukan oleh para tim penilai, baik di pusat maupun di daerah, masih banyak dijumpai hal-hal yang kurang tepat dalam menilai Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK), seperti adanya perbedaan sudut pandang dalam penilaian, kurang kompetennya tim penilai, bahkan adanya faktor subjektivitas terhadap penilaian. Hasil pemantauan selama kurun waktu tahun 2016, melalui pertanyaan-pertanyaan yang masuk baik lewat telepon, *Whatsapp*, SMS, pos-el, maupun kunjungan langsung ke kantor Pusbindiklatren, banyak diterima keluhan

seputar penilaian DUPAK perencana, terutama dari daerah. Untuk menunjang peningkatan peran perencana dan para tim penilai, sekaligus mendorong profesionalismenya perlu didukung dengan kegiatan-kegiatan *workshop* tim penilai, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di dalam *Workshop* Tim Penilai Angka Kredit Perencana diharapkan keluar sumbangan pemikiran dari para narasumber berupa pengalaman selama menjadi tim penilai jabatan fungsional perencana serta *sharing* pengalaman yang konstruktif dalam rangka peningkatan kinerja para tim penilai jabatan fungsional perencana di pusat dan daerah.

Workshop Tim Penilai Angka Kredit Perencana Instansi Pusat dan Daerah diadakan dengan maksud agar menjadi wadah bagi para tim penilai instansi, baik di pusat maupun daerah, untuk saling bertukar pengalaman dan wawasan sehingga akan mendorong peningkatan profesionalisme dalam melakukan kegiatan penilaian Jabatan Fungsional Perencana.





Workshop Tim Penilai Angka Kredit Perencana Instansi Pusat dan Daerah ini bertujuan untuk

1. mencari informasi dan kendala dalam melakukan penilaian kepada para pejabat fungsional perencana yang mengajukan DUPAK;
2. menggali masukan dan alternatif kebijakan berdasarkan pengalaman pelaksanaan pemecahan masalah apabila terjadi komplain dari pejabat fungsional perencana; dan
3. menyusun rekomendasi kebijakan dari hasil *workshop*.

Tema dari kegiatan *workshop* tahun 2016 ini adalah “Penyusunan Standar Proses dan Hasil Penilaian Angka Kredit Perencana”. Jumlah peserta yang menghadiri kegiatan tersebut sekitar 200 peserta. *Workshop* ini dihadiri juga oleh enam narasumber, yaitu: Dr. Ir. Leonard V. H. Tampubolon, M.A.

(Deputi Bidang Ekonomi Bappenas), Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, M.Si. (Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bappenas), Dr. Guspika, M.B.A. (Plt. Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana), Ir. Ahyani, M.A. (Kepala Bappeda Kota Solo), Prof. Dr. Ir. Dwi Eny Djoko Setyono, M.Sc. (Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti LIPI), dan Dr. Haryanto, S.E., M.A. (Perencana Utama di Deputi Bidang Ekonomi Bappenas).

Penyelenggaraan *workshop* ini juga dilatarbelakangi oleh adanya subjektifitas tim penilai dalam melakukan penilaian angka kredit perencana. Dengan adanya kegiatan *workshop* ini diharapkan subjektivitas penilaian dapat dihindari. Kegiatan yang digelar di Kota Solo ini juga diharapkan mampu membuka mata tentang jabatan fungsional perencana. ■

DIKLAT GELAR & NON-GELAR

PUSBINDIKLATREN BAPPENAS



Pusbindiklatren Bappenas memberikan kesempatan kepada para perencana atau ASN yang bekerja di unit perencanaan untuk mengikuti **Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)**. Kegiatan ini akan diadakan pada setiap tahun.

WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan diklat tentatif antara bulan Maret–November 2017 setiap tahunnya. Kepastian waktu pelaksanaan dan institusi pelaksana akan diinformasikan melalui situs resmi Pusbindiklatren Bappenas. Diklat akan dilaksanakan selama 2 minggu atau 12 hari, dengan hari efektif selama 10 hari kerja.

PEMBIAYAAN

Biaya diklat ditanggung Pusbindiklatren Bappenas. Biaya transportasi dari instansi asal ke lokasi diklat ditanggung instansi pengirim.

JENIS DIKLAT GELAR

- S2 Dalam Negeri
- S2 Luar Negeri
- S2 *Linkage*
- S3 Dalam Negeri
- S3 Luar Negeri



JENIS DIKLAT NON-GELAR

- **Diklat Substantif:**
Perencanaan Pembangunan Daerah-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PPD-RPJMD), Perencanaan Lingkungan dalam Pembangunan, Pengelolaan Bencana (*Disaster Management*), *Public Private Partnership* (PPP), *Local Economic Resource Development* (LERD), Perencanaan dan Penganggaran, *Monitoring* dan Evaluasi (Monev), Kelayakan Proyek (*Project Assessment*), dan topik-topik terkait lainnya.
- **Diklat Jabatan Fungsional Perencana** (Pertama, Muda, Madya, dan Utama)
- **Workshop Pendukung Jabatan Fungsional Perencana** (*Workshop* Penilaian Angka Kredit dan *Workshop* Administrasi Penilaian Angka Kredit)
- **Jenis Lainnya** (Magang Dalam Negeri, Magang Luar Negeri/*Staff Enhancement*, dan Konferensi Internasional)



Informasi selengkapnya dapat dilihat di situs Pusbindiklatren Bappenas:
www.pusbindiklatren.bappenas.go.id



Noor Avianto

Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas

Alumni ToT *Planning and Budgeting* Bappenas

di Universitas Gadjah Mada dan GRIPS Tokyo Jepang Tahun 2016

Planning and Budgeting Antara Yogya dan Tokyo

Tahun 2016 saya berkesempatan mengikuti *Training of Trainer (ToT) Planning and Budgeting* yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren Bappenas di dua kampus, yaitu UGM tanggal 23–27 Mei 2016 dan GRIPS Jepang tanggal 17–30 Juli 2016. Peluang yang sangat berharga bagi saya, karena tidak hanya memperoleh materi *training* yang mendukung tugas saya di Bappenas, tetapi sekaligus memperoleh pengalaman untuk menimba ilmu kepada pemateri yang mumpuni. Hal yang sangat berarti juga bagi saya ketika dapat berinteraksi dengan sesama peserta dari Bappenas dan beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Mungkin sedikit berbeda dengan pembelajaran tekstual, *training* ini terasa lebih menarik karena diikuti oleh pemateri dan peserta yang “terjun langsung” dengan materi tersebut sehingga kasus yang digulirkan terasa “lebih hidup”, bukan sekedar tataran teori semata.

Meskipun bagi saya materi *training* merupakan hal yang relatif baru karena lebih menyangkut perencanaan di level daerah, tetapi justru itulah yang menjadi keunggulan dari *training* tersebut.

Sejauh ini, saya lebih banyak membantu tugas-tugas perencanaan di level nasional sehingga aspek makro lebih banyak disinggung. Dengan adanya *training* ini, setidaknya membuka pemahaman saya mengenai yang telah terjadi pada level daerah, mengerti akan permasalahan dan tantangan yang dihadapi, dan selanjutnya mengetahui yang seharusnya dilakukan ke depan. Hal ini menjadi penting karena menyambungkan yang direncanakan di level nasional dengan yang direncanakan di daerah bukanlah sesuatu yang mudah. Terlebih lagi, yang dikerjakan di level nasional tentunya juga harus dapat juga diterjemahkan di daerah.

Sebagai sebuah perbandingan adalah pelaksanaan perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Jepang, baik di pusat maupun di daerah. Peraturan di sana cukup simpel dan tidak mudah diubah. Selain itu, pemerintah lokal bersifat independen, meskipun sumber pendanaan tetap mendapat anggaran dari pusat. Itu merupakan dua hal yang saya catat sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan di Jepang. Sebenarnya konsep tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah kita,



juga membeli camilan untuk menumpuk kalori kembali.

Puas menikmati keindahan *local wisdom* Yogyakarta, saya dan teman-teman *training* terpuaskan juga dengan keindahan teknologi di Prefektur Tokyo. Berdesak-desakan di Shinjuku adalah suatu yang wajib bagi peserta *training*. Belanja elektronik adalah ibadah malam bagi kami, sehingga rencana yang matang pun telah kami persiapkan sebelumnya, termasuk denah/

tetapi kita memang masih membutuhkan waktu dan proses untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Untuk itu, melihat hal yang cukup baik di Jepang merupakan salah satu cara efektif untuk memotivasi kita untuk menjadi lebih baik.

Training yang menarik tersebut tentunya tidak melupakan saya untuk menikmati pengalaman dan kesempatan menikmati Kabupaten Sleman, DIY serta Prefektur Tokyo dan sekitarnya. Menyusuri dua beringin “keramat” di alun-alun kidul keraton dan berjubel di becak berlampu adalah momen indah tak terlupakan bagi angkatan saya. Setelah makan malam, berjalan menyusuri alun-alun dalam “ketegangan” karena takut membelok 90 derajat dari jalur beringin adalah cara jitu untuk membakar kalori yang ada. Meskipun pada akhirnya, kami tetap

peta dan anggarannya. *Yen* serasa tidak menjadi masalah bagi kami karena Pusbindiklatren Bappenas sudah mencukupinya. Para peserta *training* perencanaan dan penganggaran ini benar-benar menjalankan konsep rencana dan anggaran yang dipelajari.

Terakhir, kesan saya akan *training* ini sungguh bermanfaat dan berwarna. Kaya materi dan sejuta pengalaman menyenangkan adalah hal yang kami peroleh. Oleh karena itu, penawaran *training* dari Pusbindiklatren Bappenas yang begitu beragam tampaknya jangan sampai disia-siakan. Mendaftar, terpilih, dan nikmati pengalaman belajar dan bersantai bersama peserta *training* lain adalah sebuah pilihan yang perlu dicoba bersama.

“Selamat mencoba dan sukses selalu...” ■



Adi Krisianto

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang
Alumni Beasiswa Pusbindiklatren Program S2 *Linkage* PPIE di Universitas Indonesia dan Hiroshima University Jepang Tahun 2014

Antara Ungaran, Jakarta, dan Hiroshima

Setahun setelah lulus kuliah pada tahun 2005, saya mulai bekerja sebagai PNS di Kota Ungaran, Kabupaten Semarang, pada dinas teknis yang sesuai dengan pendidikan saya sebelumnya. Pada awalnya, pekerjaan terasa menyenangkan karena lebih banyak diberikan tugas teknis yang sesuai dengan keahlian saya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, banyak juga pekerjaan kantor yang berhubungan dengan perencanaan kebijakan dan evaluasi program pemerintah yang sering kali banyak menggunakan perhitungan dan analisa ekonomi. Berawal dari kejadian itu, muncul suatu keinginan untuk memperdalam pengetahuan tentang ilmu ekonomi demi menunjang pelaksanaan pekerjaan kantor.

Pada tahun 2013, saya mengikuti seleksi beasiswa gelar yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren Bappenas. Setelah melewati tes TPA dan TOEFL, akhirnya pada suatu siang, pertengahan bulan Februari 2014, tiba-tiba ada sebuah panggilan masuk dari nomor Jakarta. Di ujung telepon, ada seorang staf dari Universitas Indonesia yang menyampaikan bahwa saya diterima program PPIE UI program *linkage* Jepang melalui program beasiswa Pusbindiklatren

Bappenas dan diharapkan segera melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Puji Tuhan.

Singkat cerita, proses pengurusan izin tugas belajar berjalan dengan lancar, bahkan mendapat dukungan dari atasan di Pemda Kabupaten Semarang. Akhirnya, pada bulan April 2014 berangkatlah saya dari Ungaran ke Jakarta untuk mengikuti program Pelatihan Bahasa Inggris (EAP) selama kurang lebih 5,5 bulan.

Selanjutnya, saya mengikuti perkuliahan tahun pertama di Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi (PPIE), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Perkuliahan dilaksanakan secara dinamis antara teori, metode, aplikasi, serta analisis ekonomi yang lebih banyak berkaitan dengan kebijakan publik. Di sini saya mengetahui bahwa proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pemerintah banyak menggunakan pendekatan dan analisis ekonomi.

Setelah mengikuti serangkaian proses seleksi dan wawancara dengan beberapa universitas di Jepang, saya diterima di Graduate School for International Development and Cooperation (IDEC) Hiroshima

University, Jepang, untuk perkuliahan tahun kedua. Jadilah pada tanggal 29 September 2015, saya berangkat dari Jakarta menuju Hiroshima.

Sehari kemudian, sampailah saya di Saijo, kota kecil di timur Hiroshima tempat Hiroshima University berada. Begitu menginjakkan kaki di Saijo, saya merasa jatuh cinta dengan kota ini. Bagaimana tidak? Kota kecil ini memiliki fasilitas publik yang sangat lengkap dengan kombinasi suasana pedesaan yang tenang dan nyaman. Sangat cocok untuk belajar. Saya senang sekali bersepeda berkeliling kota menikmati keindahan dan bersihnya kota serta menghirup udara yang segar.



Di Negeri Sakura ini, saya belajar di bawah bimbingan Prof. Shinji Kaneko, seorang ahli *environmental economics* terkemuka di Jepang. Beliau seorang yang *smart*, simpel, penuh semangat, dan tentunya perfeksionis seperti layaknya profesor Jepang. Di bawah bimbingan beliau, proses penulisan tesis terasa menyenangkan karena beliau selalu memberi arahan yang jelas serta memberikan solusi atas semua permasalahan yang timbul. Sampai akhirnya saya dinyatakan lulus program master (S2) dari Hiroshima University pada tanggal 20 September 2016. Saya bahkan mendapat penghargaan sebagai *Best Master Thesis Award for 2016 Spring Semester* dari IDEC, Hiroshima University.

Kesempatan untuk belajar di Negeri Sakura juga memberikan pengalaman yang luar biasa. Saya sungguh takjub melihat bersihnya seluruh lingkungan yang saya jelajahi selama di Jepang. Kesadaran untuk menjaga kebersihan sudah ditanamkan kepada masyarakat Jepang sejak kecil. Mereka bahkan menyimpan sampah dalam saku jika tidak menemukan tempat sampah di sekitar

mereka. Saya juga belajar tentang hal-hal positif dari cara hidup orang Jepang. Mereka sangat disiplin, toleransi, ramah, dan suka bekerja keras.

Pada tanggal 24 September 2016 adalah hari terakhir perjalanan saya di Jepang. Setelah menyelesaikan perkuliahan di Jepang, saya harus kembali ke Jakarta untuk menuntaskan program S2 *Linkage* saya. Singkat cerita, saya akhirnya dinyatakan lulus dari PPIE UI pada acara Wisuda Universitas Indonesia yang digelar pada tanggal 4 Februari 2017. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan atas kelancaran studi selama ini.

Akhir dari perjalanan saya melalui program beasiswa Pusbindiklatren Bappenas adalah perjalanan dari Jakarta kembali ke Ungaran, kembali bekerja sebagai PNS di Kabupaten Semarang. Saya berharap ilmu yang saya dapatkan ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi serta instansi tempat saya bernaung dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Terima kasih Indonesia. ■

Foto: <http://icfo.co.in/>

TESIS TERBAIK S2 DALAM NEGERI

Pengaruh Kepadatan Modal Manusia Terhadap Konvergensi Pendapatan Per Kapita Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2001–2013

Penulis: Gun Gun Nugraha

Studi ini bertujuan menyelidiki pengaruh kepadatan modal manusia (*density of human capital*) terhadap perkembangan konvergensi pendapatan per kapita antarkabupaten/kota di Indonesia tahun 2001–2013. Kepadatan modal manusia (*density of human capital*) dicurigai turut memengaruhi laju konvergensi karena dalam “perjalanannya”, variabel ini terbentuk akibat adanya kepadatan tenaga kerja (*employment density*) dan

tingkat modal manusia (*human capital*) regional. Teknik estimasi yang digunakan adalah *first-difference generalized method of moments* (FD-GMM) pada model konvergensi dinamis. Hasil studi membuktikan kepadatan modal manusia (*density of human capital*) berpengaruh secara nyata terhadap konvergensi pendapatan per kapita kabupaten/kota di Indonesia dengan tingkat kontribusi kelajuan konvergensi mencapai 5,78 persen.

Pengantar

Ketimpangan pendapatan per kapita antarwilayah merupakan salah satu isu sentral bagi negara berkembang seperti Indonesia terutama dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan. Meskipun dijelaskan dalam teori pertumbuhan neoklasik bahwa pada suatu saat secara alamiah ketimpangan pendapatan per kapita antara wilayah yang lebih maju dan wilayah yang lebih tertinggal lambat laun akan semakin menyempit dan cenderung sama akibat terjadi proses konvergensi, peran pemerintah dalam mengupayakan proses percepatan pemerataan tersebut harus terus didorong. Oleh sebab itu, perlu dideteksi faktor-faktor yang dapat memengaruhi laju konvergensi pendapatan per kapita antarwilayah di Indonesia guna membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan strategis.

Pentingnya peranan sumber daya manusia (SDM) atau modal manusia (*human capital*) dalam suatu ruang spasial dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan wilayah cukup menarik untuk dibahas. Teori pertumbuhan endogen (*endogenous growth*) telah menjelaskan bahwa endogenitas teknologi salah satunya dipengaruhi oleh kekuatan *human capital* (lihat Romer, 2006). *Human capital* dapat menciptakan dan memanfaatkan eksternalitas melalui sektor *research and development* (R & D) (Romer, 1986, 1990) dan kegiatan *learning by doing* (Arrow, 1962; Lucas, 1988) guna meng-upgrade faktor teknologi dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi terutama dalam jangka panjang. Secara empiris, pembuktian pengaruh signifikan *human capital* terhadap pertumbuhan ekonomi telah dilakukan oleh Denison (1962), Barro (1991), serta Mankiw, Romer, dan Weil (1992).

Faktor lain yang dicurigai dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan dalam suatu ruang spasial di Indonesia adalah kepadatan tenaga kerja (*employment density*). Kepadatan tenaga kerja (*employment density*) dalam beberapa studi ekonomi regional dan perkotaan telah terbukti turut memengaruhi produktivitas (*output per labor*) dan

mendorong laju pertumbuhan ekonomi wilayah. Studi empiris di Amerika Serikat dan kawasan Uni Eropa membuktikan ketika kepadatan tenaga kerja (*employment density*) ditingkatkan menjadi dua kali lipat, produktivitas (*output per labor*) kedua wilayah tersebut dapat mengalami peningkatan antara 4,5–6,0 persen (lihat Ciccone dan Hall, 1996; Ciccone, 2002). Dua wilayah atau lebih ketika memiliki jumlah tenaga kerja yang sama akan menghasilkan nilai *output* yang berbeda. Hal ini terjadi akibat kepadatan yang dimiliki wilayah-wilayah tersebut berbeda. Wilayah yang lebih padat tenaga kerjanya akan lebih produktif karena proses komunikasi, duplikasi, replikasi, serta pertukaran informasi, *skill*, dan pengetahuan menjadi lebih mudah dan lebih tinggi dibandingkan wilayah yang kurang padat (lihat Combes et al., 2008, 2010).

Teori aglomerasi juga menjelaskan bahwa dua faktor, yaitu modal manusia (*human capital*) dan kepadatan tenaga kerja (*employment density*) --sebagai dampak dari proses *learning and knowledge spillovers*-- dapat menjadi pendorong (*booster*) produktivitas (*output per labor*) dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Wilayah dengan kualitas modal manusia (*human capital*) dan tingkat kepadatan tenaga kerja (*employment density*) yang lebih tinggi akan memiliki tingkat produktivitas (*output per labor*) dan akselerasi pertumbuhan yang lebih baik. Hal ini disebabkan intensitas interaksi antarmasyarakat yang memiliki keterampilan lebih tinggi (*interaction of highly-skilled people*) dalam wilayah tersebut lebih besar sehingga menghasilkan dorongan energi produktivitas (*output per labor*) yang lebih kuat dan akan sangat mudah menghasilkan inovasi dibandingkan dengan wilayah yang memiliki tingkat keterampilan masyarakatnya lebih rendah. Dalam studi ini, modal manusia (*human capital*), kepadatan tenaga kerja (*employment density*), dan interaksi antara keduanya selanjutnya disebut sebagai kepadatan modal manusia (*density of human capital*).

Indonesia sebagai negara dengan *geographical space* yang unik dan bervariasi memiliki tingkat kepadatan penduduk, kualitas *human capital*, dan tingkat pendapatan per kapita yang

beragam antarwilayah. Pada tahun 2001–2013, tingkat kesenjangan pendapatan per kapita antarkabupaten/kota di Indonesia masih tergolong tinggi. Besaran indeks Williamson pada periode tersebut berkisar antara 0,79–0,72. Kondisi Indonesia ini menarik untuk dikaji lebih jauh dalam menjawab apakah kepadatan modal manusia (*density of human capital*) antarkabupaten/kota di Indonesia memiliki efek terhadap tingkat konvergensi pendapatan per kapita.

Studi empiris yang melihat secara spesifik hubungan kepadatan modal manusia (*density of human capital*) terhadap pertumbuhan ekonomi dan konvergensi di Indonesia belum ada. Studi-studi sebelumnya yang mengangkat isu pengaruh *human capital* dan kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan dilakukan secara parsial dalam struktur model empirisnya. Studi Firdaus dan Zulkornain (2009) menunjukkan pengaruh modal manusia (menggunakan level pendidikan) cukup nyata terhadap konvergensi pertumbuhan antarprovinsi di Indonesia. Sementara Vidyattama (2010) menunjukkan efek positif antara indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai indikator modal manusia serta desentralisasi terhadap konvergensi regional dan ketimpangan regional

pada level provinsi di Indonesia. Studi yang fokus melihat hubungan antara tingkat kepadatan tenaga kerja (*employment density*) dengan pertumbuhan ekonomi dan konvergensi pendapatan per kapita di Indonesia juga masih sangat jarang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh kepadatan modal manusia (*density of human capital*) terhadap konvergensi pendapatan per kapita kabupaten/kota di Indonesia dalam rentang tahun 2001–2013. Analisis yang digunakan adalah model konvergensi data panel dinamis.

Hasil dan Analisis

Perkembangan Pendapatan Perkapita Kabupaten/ Kota di Indonesia

Pendapatan per kapita tahunan Indonesia dari 2001 hingga 2013 terus meningkat. Pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2001 mencapai 6,05 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2013 mencapai 9,88 juta rupiah atau mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4,09 persen selama periode tersebut (13 tahun). Secara regional, pada periode tahun 2001–2013 pendapatan per kapita Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia



Foto: <https://i.kinja-img.com/>

(KTI) juga turut mengalami tren yang sama dengan tren nasional. Pendapatan per kapita KBI antara tahun 2001–2013 tercatat antara 6,25 hingga 10,36 juta rupiah dengan besar rata-rata pertumbuhan 4,21 persen atau lebih tinggi 0,12 persen dari pertumbuhan nasional. Untuk KTI, pendapatan per kapita mencapai 4,40 juta rupiah pada tahun 2001 hingga 6,40 juta rupiah pada tahun 2013 dengan besar rata-rata pertumbuhan 3,13 persen atau lebih rendah 0,96 persen dari pertumbuhan nasional.

Peningkatan pertumbuhan pendapatan per kapita antarpulau di Indonesia juga turut mengalami tren yang sama dengan tren nasional kecuali untuk Pulau Papua. Pada periode tahun yang sama, Pulau Kalimantan memiliki nilai pendapatan per kapita paling tinggi di Indonesia (8,16–12,85 juta rupiah dengan rata-rata laju pertumbuhan mencapai 3,83 persen), disusul Pulau Jawa (6,49–10,91 juta rupiah dengan rata-rata laju pertumbuhan mencapai 4,32 persen), Sumatera (5,44–8,90 juta rupiah dengan rata-rata laju pertumbuhan mencapai 4,10 persen), Papua (13,09–8,35 juta rupiah dengan rata-rata laju pertumbuhan mencapai -3,75 persen), Sulawesi (4,22–7,40 juta rupiah dengan rata-rata laju pertumbuhan mencapai 4,68 persen), serta Bali, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku (3,39–4,66 juta rupiah dengan rata-rata laju pertumbuhan mencapai 2,96 persen).

Pendapatan per kapita digunakan sebagai indikator kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu wilayah (*standard of living*). Wilayah dengan tingkat pendapatan per kapita yang tinggi menggambarkan bahwa *standard of living* wilayah tersebut juga tinggi. Oleh sebab itu, berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa *standard of living* KBI cenderung lebih baik dibandingkan KTI. Di lingkup KBI, Pulau Kalimantan memiliki tingkat kemakmuran yang lebih baik dibandingkan Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sementara di lingkup KTI, Pulau Papua sesungguhnya memiliki potensi yang baik namun seiring perkembangan waktu justru terus mengalami penurunan. Hal ini disinyalir bahwa naik-turunnya pendapatan per kapita di Papua sangat bergantung pada naik-

turunnya produksi sektor pertambangan sebagai sektor andalan wilayah tersebut. Tren peningkatan positif ditunjukkan oleh Pulau Sulawesi, Maluku, dan NTT, meskipun jika dilihat dari nilai masih di bawah Pulau Papua.

Adanya tren peningkatan pendapatan per kapita KBI dan KTI serta antarpulau di Indonesia berimplikasi terhadap tren pendapatan per kapita provinsi dan kabupaten/kota yang secara umum memiliki pola sama. Meskipun pendapatan per kapita provinsi dan kabupaten/kota menunjukkan tren yang terus meningkat, besarnya keragaman nilai dan rata-rata laju pertumbuhan pendapatan per kapita membuktikan adanya disparitas dan konvergensi pendapatan per kapita antarkabupaten/kota di Indonesia. Disparitas pendapatan per kapita antarkabupaten/kota yang tergolong tinggi pada tahun 2001–2013 ditunjukkan oleh besaran angka indeks Williamson yang mencapai 0,72–0,78.

Konvergensi Beta Absolut (*Absolute Convergence*) dan *Conditional* (*Conditional Convergence*)

Beta (β) *convergence* digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tingkat konvergensi ketika sigma (σ) *convergence* yang menunjukkan terjadinya konvergensi. Beta (β) *convergence* terdiri atas konvergensi beta absolut (*absolute convergence*) dan konvergensi beta *conditional* (*conditional convergence*). Konvergensi beta absolut (*absolute convergence*) digunakan untuk mendeteksi pendapatan per kapita periode awal (*initial income*) suatu wilayah berpengaruh terhadap konvergensi pendapatan per kapita. Alasannya adalah besarnya perbedaan pendapatan per kapita periode awal (*initial income*) antarkabupaten/kota dapat dipastikan menentukan laju konvergensi lebih cepat atau lebih lambat. Adapun konvergensi beta *conditional* (*conditional convergence*) digunakan untuk mendeteksi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat konvergensi selain pendapatan per kapita periode awal (*initial income*).

Studi ini menggunakan dua model konvergensi beta *conditional* (*conditional convergence*). Model pertama (pada hasil estimasi disebut model 2), diset tanpa memasukkan interaksi kepadatan tenaga kerja

(*employment density*) dan modal manusia (*human capital*) seperti dinyatakan dalam persamaan (21). Artinya, variabel-variabel independen yang dianggap berpengaruh terhadap konvergensi pendapatan per kapita hanya kepadatan (*density*) dan modal manusia (*human capital*). Sementara itu, pada model kedua (pada hasil estimasi disebut model 3) seperti dinyatakan dalam persamaan (22) diset dengan memasukkan kepadatan (*density*), modal manusia (*human capital*), dan interaksi keduanya. Hal ini bertujuan untuk melihat perubahan respon laju konvergensi (λ) dan waktu yang dibutuhkan untuk menutup setengah dari kesenjangan awalnya (*halftime*) (τ).

Tabel 1 menunjukkan hasil estimasi menggunakan teknik *Ordinary Least Square* (OLS) untuk data *cross section* tahun 2001–2013. Teknik ini digunakan untuk membandingkan hasil estimasi dengan teknik lain pada ketiga model ketika variabel

waktu (t) dianggap tidak memberikan dampak terhadap variabel dependen. Variabel dependen pada ketiga model adalah pendapatan per kapita kabupaten/kota pada tahun terakhir pengamatan (ln y2013). Pada model 1, variabel independen adalah pendapatan per kapita kabupaten/kota pada periode awal (*initial income*) (ln y2001), sedangkan pada model 2 dan 3, variabel independennya terdiri atas kepadatan (*density*), modal manusia (*human capital*), dan interaksi keduanya.

Hasil estimasi model 1 menunjukkan bahwa pendapatan per kapita kabupaten/kota pada periode awal (*initial income*) (ln y2001) berpengaruh secara signifikan terhadap konvergensi pendapatan per kapita kabupaten/kota. Hal ini dapat dilihat pada koefisien ln y2001, $\gamma = 0,9267$ dengan nilai *p-value* (prob.) = 0,000 pada taraf nyata 1%. Pada model 2, variabel independen terdiri atas pendapatan per kapita kabupaten/kota pada periode awal

TABEL 1. HASIL ESTIMASI OLS DATA CROSS-SECTION (2001–2013)

Variabel dependen: in y2013	Model 1		Model 2		Model 3	
	Coef.	Prob.	Coef.	Prob.	Coef.	Prob.
Konstanta	1,0274*** (0,3128)	0,001	0,9116*** (0,2766)	0,001	1,2631*** (0,4720)	0,008
ln y2001	0,9267*** (0,3778)	0,000	0,8831*** (0,0407)	0,000	0,8796*** (0,0415)	0,000
ln <i>density</i>			0,0251*** (0,0054)	0,000	-0,0310 (0,0399)	0,439
ln <i>human capital</i>			0,1109*** (0,0304)	0,000	0,0086 (0,0755)	0,910
<i>Interaction term</i>					0,0174 (0,0126)	0,167
<i>F-statistic</i>		601,85		497,62		574,98
<i>Prob. F-statistic</i>		0,000		0,000		0,000
R2		0,8711		0,8868		0,8874
<i>Implied</i> λ (%)		0,63		1,04		1,07
<i>Implied</i> τ^* (tahun)		109,26		66,91		64,84
Jumlah observasi		422		422		42

Keterangan: *p < 0,1, **p < 0,05, ***p < 0,01, dalam kurung (.) menunjukkan *robust std. error*

TABEL 2. HASIL ESTIMASI *FIXED EFFECT* (FE) DATA PANEL 2001–2013 (TIGA TAHUNAN)

Variabel dependen: $\ln y_{i,t}$	Model 1		Model 2		Model 3	
	Coef.	Prob.	Coef.	Prob.	Coef.	Prob.
Konstanta	2,5978*** (0,6220)	0,000	3,4543*** (0,6165)	0,000	4,1499*** (0,7106)	0,000
$\ln y_{i,t-1}$	0,8384*** (0,0403)	0,000	0,7169*** (0,0399)	0,000	0,6922*** (0,0424)	0,000
$\ln density$			0,0851 (0,0854)	0,319	-0,0001 (0,0889)	0,999
$\ln human\ capital$			0,1777*** (0,0308)	0,000	0,0607 (0,0503)	0,229
<i>Interaction term</i>					0,0295** (0,7106)	0,003
R2		0,9670		0,8642		0,8289
<i>F-statistic</i>		433,06		370,19		419,90
Prob. <i>F-statistic</i>		0,000		0,000		0,000
<i>Implied λ (%)</i>		1,47		2,77		3,07
<i>Implied τ^*(tahun)</i>		47,19		24,99		22,61
Jumlah observasi		1.688		1.688		1.688
Jumlah grup		422		422		422
Jumlah periode		4		4		4

Keterangan: * $p < 0,1$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$, dalam kurung (.) menunjukkan *robust std. error*

(*initial income*) ($\ln y_{2001}$), kepadatan (*density*), dan modal manusia (*human capital*). Secara teknis, data kepadatan (*density*) dan modal manusia (*human capital*) yang digunakan adalah nilai rata-rata data tahun 2001 sampai 2013. Hasil estimasi model 2 menunjukkan bahwa ketiga variabel dependen berpengaruh secara signifikan terhadap konvergensi pendapatan per kapita kabupaten/kota dengan nilai *p-value* (prob.) pada masing-masing variabel dependen berada di bawah taraf nyata 1%. Perubahan perilaku model terjadi ketika memasukkan variabel kepadatan modal manusia (*density of human capital*) pada model 3. Hasil estimasi model 3 menunjukkan bahwa ketika variabel kepadatan modal manusia (*density of human capital*) dimasukkan ke dalam model, hanya variabel pendapatan per kapita kabupaten/kota

pada periode awal (*initial income*) yang berpengaruh secara signifikan terhadap konvergensi pendapatan per kapita pada taraf nyata 1%. Koefisien $\ln y_{2001}$ pada masing-masing model berdampak terhadap laju konvergensi (λ) dan waktu yang dibutuhkan untuk menutup setengah dari kesenjangan awalnya (*halftime*) (τ).

Tabel 2 dan Tabel 3 menunjukkan hasil estimasi menggunakan model *fixed effect* (FE) dan *first-difference generalized method of moments* (FD-GMM) pada data panel. Variabel dependen pada ketiga model adalah pendapatan per kapita kabupaten/kota pada waktu (t) pengamatan ($\ln y_{i,t}$) dengan variabel independen pada model 1, 2, dan 3 masing-masing sama seperti dijelaskan pada Tabel 1.

TABEL 3. HASIL ESTIMASI FD-GMM ARELLANO-BOND DATA PANEL DINAMIS 2001–2013 (TIGA TAHUNAN)

Variabel independen: $\ln y_{i,t}$	Model 1		Model 2		Model 3	
	Coef.	Prob.	Coef.	Prob.	Coef.	Prob.
Konstanta	4,1693*** (0,8296)	0,000	4,8769*** (0,7755)	0,000	6,5130*** (0,9038)	0,000
$\ln y_{i,t-1}$	0,7366*** (0,5383)	0,000	0,5564*** (0,0598)	0,000	0,4997*** (0,0605)	0,000
$\ln density$			0,2532** (0,1267)	0,046	0,0528 (0,1309)	0,686
$\ln human\ capital$			0,2294***	0,000	-0,0430 (0,0411)	0,471
<i>Interaction term</i>					0,0675*** (0,9038)	0,000
<i>Sargan test</i>	1.036,32***	0,000	811,30***	0,000	789,16***	0,000
<i>Chi2-statistic</i>		187,19		787,45		942,17
<i>Prob. Chi2-statistic</i>		0,000		0,000		0,000
<i>Implied λ (%)</i>		2,55		4,89		5,78
<i>Implied τ^*(tahun)</i>		27,21		14,19		11,99
Jumlah observasi		1.266		1.266		1.266
Jumlah grup		422		422		422
Jumlah periode		4		4		4

Keterangan: * $p < 0,1$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$, dalam kurung (.) menunjukkan *robust std. error*

Hasil estimasi variabel independen pendapatan per kapita kabupaten/kota pada periode awal (*initial income*) ($\ln y_{i,t-1}$) pada ketiga model, baik menggunakan estimasi FE maupun FD-GMM, terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap konvergensi pendapatan per kapita kabupaten/kota dengan nilai *p-value* (prob.) = 0,000 berada di bawah taraf nyata 1%. Variabel kepadatan (*density*) pada model 2 dan 3 dengan menggunakan estimasi FE terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap konvergensi pendapatan per kapita kabupaten/kota dengan masing-masing nilai *p-value* (prob.) berada di atas taraf nyata 10% (0,319 dan 0,999).

Ketika menggunakan teknik estimasi FD-GMM variabel kepadatan (*density*) pada model 2 terbukti berpengaruh secara signifikan pada taraf nyata 5%

dengan nilai *p-value* (prob.) mencapai 0,046. Namun, kondisi tersebut tidak berpengaruh secara signifikan pada model 3 atau ketika interaksi antara kepadatan (*density*) dan modal manusia (*human capital*) dimasukkan pada model 2. Variabel modal manusia (*human capital*) pada model 2 baik menggunakan estimasi FE maupun FD-GMM menunjukkan berpengaruh secara signifikan pada taraf nyata 1% terhadap konvergensi pendapatan per kapita kabupaten/kota dengan nilai *p-value* (prob.) = 0,000. Ketika variabel interaksi antara kepadatan (*density*) dan modal manusia (*human capital*) dimasukkan pada model 2 dan model 3, baik menggunakan estimasi FE maupun FD-GMM, variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap konvergensi pendapatan per kapita kabupaten/kota di Indonesia pada taraf nyata masing-masing 5% dan 1%.

Penjelasan mengenai perbandingan laju konvergensi pada ketiga model dengan menggunakan teknik estimasi OLS, FE, dan FD-GMM ditunjukkan pada Tabel 4. Pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa laju konvergensi pada model konvergensi kondisional (*conditional convergence*) selalu lebih baik daripada model konvergensi absolut (*absolute convergence*) pada semua teknik estimasi. Dalam model konvergensi kondisional (*conditional convergence*), variabel interaksi dimasukkan antara kepadatan (*density*) dan modal manusia (*human capital*) (model 3). Jika dibandingkan menggunakan variabel kepadatan (*density*) dan modal manusia (*human capital*) saja (model 2) terlihat laju konvergensi yang lebih baik pada teknik estimasi OLS, FE, dan FD-GMM. Di samping itu, teknik estimasi FD-GMM Arellano-Bond menunjukkan hasil yang lebih optimal dibandingkan menggunakan teknik estimasi OLS atau FE.

Simpulan

Selama periode 2001–2013, ketika otonomi daerah sudah berlangsung, terbukti adanya konvergensi pendapatan per kapita antarkabupaten/kota di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari signifikansi nilai koefisien γ pada model beta *convergence*. Kepadatan modal manusia (*density of human capital*) yang diindikasikan memengaruhi pendapatan per

kapita terbukti secara signifikan mampu memacu laju konvergensi pendapatan per kapita lebih cepat pada tingkatan 5,78 persen dengan *halftime* mencapai 12 tahun. Hal ini berbeda ketika hanya memasukkan variabel kepadatan (*density*) dan modal manusia (*human capital*) pada model yang membuat laju konvergensi hanya mencapai 3,07 persen dengan *halftime* mencapai 22 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki tingkat kepadatan yang cukup tinggi dan diiringi oleh kualitas modal manusia (*human capital*) yang baik dapat meningkatkan tingkat produktivitas dan *output* sehingga dapat mendorong laju konvergensi untuk segera menyusul wilayah-wilayah yang lebih kaya.

Kepadatan modal manusia (*density of human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam memacu perekonomian, terutama *output* regional. Konsentrasi penduduk dengan tingkat kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tinggi dapat menjadi *booster* dalam mengakselerasi kemajuan ekonomi dan kemakmuran sebuah wilayah. Seorang ekonom peraih Nobel dari Universitas Chicago, Robert Lucas, menyatakan bahwa eksternalitas SDM adalah faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Meskipun dari sisi perspektif demografis kepadatan penduduk terkesan lebih banyak memiliki dampak negatif, ketika

TABEL 4. KOMPARASI ESTIMASI LAJU KONVERGENSI

Model	OLS	FE	FD-GMM
Konvergensi Absolut:			
Model 1			
• Laju konvergensi (λ) (%)	0,63	1,47	2,55
• <i>Halftime</i> (τ) (tahun)	109,26	47,19	27,21
Konvergensi Kondisional:			
Model 2			
• Laju konvergensi (λ) (%)	1,04	2,77	4,89
• <i>Halftime</i> (τ) (tahun)	66,91	24,99	14,19
Model 3			
• Laju konvergensi (λ) (%)	1,07	3,07	5,78
• <i>Halftime</i> (τ) (tahun)	64,84	22,61	11,99

pemerintah mampu menyelaraskan antara tingkat kepadatan dan kualitas SDM yang tinggi maka sesungguhnya pemerintah sedang menyiapkan salah satu potensi yang besar dalam mendorong kemajuan perekonomian. Konsep kebijakan yang perlu diperhatikan pemerintah dalam hal ini adalah langkah-langkah untuk menghasilkan kepadatan penduduk yang berkualitas.

Perilaku alamiah modal manusia (*human capital*) dan kepadatan (*density*) juga perlu diwaspadai oleh pemerintah. Kedua variabel ini memiliki kecenderungan saling mengisi. Modal manusia (*human capital*) suatu wilayah mudah dipengaruhi oleh kekuatan konsentrasi wilayah lain. Tenaga kerja yang memiliki kualitas SDM yang lebih baik cenderung mencari wilayah yang lebih padat aktivitas perekonomiannya dengan tujuan agar ia bisa mendapat tingkat kesejahteraan yang lebih baik. *Human capital* juga dapat berdifusi secara spasial ke wilayah mana pun tanpa memandang batas (*borderless*). Akibatnya, sulit bagi suatu wilayah untuk mempertahankan tenaga kerja yang memiliki kualitas SDM lebih unggul secara permanen dalam wilayahnya. Terakhir, secara alamiah perilaku *human capital* memiliki kecenderungan berkelompok secara homogen. *Human capital* pada level yang lebih tinggi cenderung terkonsentrasi pada wilayah-wilayah aglomerasi dan perkotaan sebagaimana dijelaskan Fu (2007) dan Karlsson (2009). Akibat dari karakteristik alamiah tersebut justru akan membuka peluang wilayah yang lebih kaya untuk menjadi semakin maju sehingga proses konvergensi akan semakin menjauh. ■

Daftar Pustaka

- Abel, J. R., Dey, I., & Gabe, T. M. (2011). *Productivity and the Density of Human Capital*. New York: Federal Reserve Bank of New York.
- Abramovitz, M. (1985). *Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behind*. *Journal of Economic History*, Vol. XLVI, No. 2, June, 385–406.
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). *Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations*. *Review of Economic Studies*, Vol. 58, 277–297.
- Arrow, K. J. (1962). *The Economic Implications of Learning by Doing*. *The Review of Economic Studies*, Vol. 29, No. 3, June, 155–173.
- Baltagi, B. H. (2013). *Econometric Analysis of Panel Data*, 5th Edition. Chichester, UK: Wiley.
- Barro, R. J. (1991). *Economic Growth in a Cross Section of Countries*. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 106, No. 2, May, 407–443.
- Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (1992). *Convergence*. *Journal of Political Economy*, Vol. 100 (2), 223–251.
- Carlino, G. A., & Voith, R. (1992). *Accounting for Differences in Aggregate State Productivity*. *Regional Science and Urban Economics*, Vol. 22, No. 4, 597-617.
- Carlino, G. A., Chatterjee, S., & Hunt, R. M. (2007). *Urban Density and the Rate of Invention*. *Journal of Urban Economics*, Vol. 61 (3), 389–419.
- Ciccone, A. (2002). *Agglomeration Effects in Europe*. *European Economic Review*, Vol. 86, No. 1, 213–227.
- Ciccone, A., & Hall, R. E. (1996). *Productivity and the Density of Economic Activity*. *American Economic Review*, Vol. 86, No. 1, 54–70.
- Combes, P. P., Duranton, G., & Gobillon, L. (2008). *Spatial Wage Disparities: Sorting Matters!* *Journal of Urban Economics*, Vol. 63, No. 2, 723–742.
- Combes, P. P., Duranton, G., Gobillon, L., & Roux, S. (2010). *Estimating Agglomeration Economic with History, Geology and Worker Effects*. Chicago, US: University of Chicago Press.
- Denison, E. F. (1962). *The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives Before Us*. *The Economic Journal*, Vol. 72, No. 288, Dec, 935–938.
- Firdaus, M. (2011). *Aplikasi Ekonometri untuk Data Panel dan Time Series*. Bogor: IPB Press.
- Firdaus, M., & Zulkornain, Y. (2009). *Dynamics Analysis of Regional Convergence in Indonesia*. *International Journal of Economics and Management*, Vol. 3 (1), 73–86.
- Fischer, M. M. (2010). *A Spatial Mankiw-Romer*

- Weil Model: Theory and Evidence*. Annual Regional Science, Vol. 47, 419–436.
- Fu, S. (2007). *Smart Cafe Cities: Testing Human Capital Externalities in the Boston Metropolitan Area*. Journal of Urban Economics, Vol. 66 , 86–111.
 - Glaeser, E. L. (1999). *Learning in Cities*. Journal of Urban Economics, Vol. 46, No. 2 , 254–277.
 - Hall, R. E., & Jones, C. I. (1999). "Why do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker than Others?". Quarterly Journal of Economics, Vol. 111, No. 1, 83–116.
 - Islam, N. (1995). *Growth Empirics: A Panel Data Approach*. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 110, No. 4, Nov , 1127–1170.
 - Islam, N. (2003). *What Have We Learnt from The Convergence Debate?* Journal of Economics Surveys, Vol. 17, No. 3 , 309–362.
 - Jacobs, J. (1969). *The Economy of Cities*. New York: Vintage.
 - Karlsson, C., & Andersson, M. (2009). *The Location of Industry R&D and the Location of University R&D– How Are They Related?* New Directions in Regional Economic Development , 267–290.
 - Knudsen, B., Florida, R., Stolarick, K., & Gates, G. (2008). *Destiny and Creativity in U.S. Regions*. Annals of Association of American Geographers, Vol. 98, No. 2, 461–478.
 - Layard, R., & Nickell, S. J. (1986). *Unemployment in Britania*. Economica, Vol. 53 , 5121–5169.
 - Lucas, R. E. (1988). *On The Mechanics of Economic Development*. Journal of Monetary Economics, Vol. 22, July , 3–42.
 - Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). *A Contribution to the Empirics of Economic Growth*. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 107, No. 2 (May, 1992) , 407–437.
 - Marques, A., & Elias, S. (1998). *Per Capita Income Convergence Across Countries and Across Region in the European Union: Some New Evidence*. International Meeting of European Economy. Lisbon: CEDIN (ISEG).
 - Marshall, A. (1890). *Principles of Economics*. London: Macmillan.
 - Moomaw, R. L. (1981). *Productivity and City Size: A Critique of the Evidence*. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 96, No. 4 (Nov., 1981), 675–688.
 - Onder, A. O., Karadag, M., & Deliktas, E. (2007). *The Effect of Public Capital on Regional Convergence in Turkey*. Turkey: Ege University.
 - Quiroga, P. A. (2007). *Theory, History and Evidence of Economic Convergence in Latin America*. La Paz, Bolivia: School of Economics and Management, University of Aarhus.
 - Ramsey, F. P. (1928). *A Mathematical Theory of Saving*. Economic Journal, Vol. 38, 543–559.
 - Romer, D. (2006). *Advanced Macroeconomics 4th Edition*. New York: McGraw-Hill.
 - Romer, P. M. (1990). *Endogenous Technological Change*. Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 5 , 71–102.
 - Romer, P. M. (1986). *Increasing Return and Long-Run Growth*. The Journal of Political Economy, Vol. 94, No. 5, 1002–1037.
 - Rosenthal, S. S., & Strange, W. C. (2008a). *The Attenuation of Human Capital Spillovers*. Journal of Urban Economics, Vol. 64, No. 2 , 373–389.
 - Schmitt, C., & Starke, P. (2011). *Explaining Convergence of OECD Welfare States: A Conditional Approach*. Journal of European Social Policy, Vol. 21, No. 2 , 120–135.
 - Solow, R. M. (1956). *A Contribution to the Economic Growth*. Quarterly Journal of Economics, Vol. 70, 65–94.
 - Sveikauskas, L. A. (1975). *The Productivity of Cities*. Quarterly Journal of Economics, Vol. 89, No. 3 , 383–413.
 - Vidyattama, Y. (2010). *A Search for Indonesia's Regional Growth Determinants*. Journal of Economics, Vol. 27, No. 3, 281–294.

++ Penulis merupakan pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu dan telah menyelesaikan pendidikan S2 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia dengan beasiswa dari Pusbindiklatren Bappenas

SCHOLARSHIP APPLICATION

Foto: www.aaja.org

Lesson Learned dari Diklat tentang *Scholarship Management*

Penulis: Zamilah Chairani

Kesempatan mengikuti Diklat *Scholarship Management* di University of Maryland, Amerika Serikat, memberikan wawasan baru dan pengalaman bagi para peserta. Semakin banyak tersedianya beasiswa di lingkup institusi pemerintahan membutuhkan pengelolaan yang baik. Selain pemain-pemain lama, seperti Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), beberapa kementerian lain mengikuti dalam sepuluh tahun terakhir, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU). Beasiswa tersebut dapat diakses oleh publik maupun sejumlah institusi pemerintah lainnya yang memberikan beasiswa khusus untuk meningkatkan kompetensi staf mereka.

Pengantar

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan dan pengelolaan beasiswa cukup menimbulkan tantangan tersendiri bagi para pengelolanya. Prinsip-prinsip keterbukaan atau transparansi menjadi salah satu prasyarat pengelolaan beasiswa yang baik, selain akuntabilitas, pertanggungjawaban kinerja keuangan, dan teknis pelaksanaan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, Pusbindiklatren (Bappenas) selaku *Project Implementing Unit* (PIU) dari *Scholarship Program for Strengthening Reforming Institution* (SPIRIT), telah menyelenggarakan Diklat *Scholarship Management* yang diperuntukan bagi para pengelola di lingkup

Participating Agency (PA) maupun PIU pada tanggal 31 Oktober–12 November 2016 di University of Maryland, Amerika Serikat. Diklat *Scholarship Management* diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengelola beasiswa, baik staf yang bertugas di PA maupun PIU. Diklat *Scholarship Management* ini dirancang untuk membekali dan mengembangkan pemahaman dan pengetahuan kritis dari para profesional yang terlibat dalam pengembangan staf, serta manajemen pembelajaran organisasi dan perubahan dengan menyediakan pengetahuan dan pemahaman yang menyeluruh tentang pengelolaan program beasiswa.

Tujuan dan Proses Diklat

Tujuan diklat ini terdiri atas tiga hal:

1. membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan peserta mampu mengemban tanggung jawab dalam merancang dan menyelenggarakan diklat yang efektif;
2. membangun kemampuan untuk melakukan pengelolaan dan kebijakan diklat, serta memanfaatkan diklat agar dapat menunjang secara efektif rencana-rencana reformasi di pemerintahan; dan
3. meningkatkan kemampuan untuk melakukan evaluasi diklat dan melakukan analisis kebutuhan diklat (*training needs analysis*).

Diklat ini diikuti oleh 24 peserta, yang berasal dari 10 (sepuluh) PA, PIU Bappenas, dan PIU Kemenkeu. Materi Diklat *Scholarship Management* secara garis besar adalah membekali peserta dengan pemahaman konsep-konsep dan proses-proses yang harus dilakukan staf dalam pengelolaan beasiswa. Dalam rangka perbandingan, pada awal diklat disampaikan informasi tentang pendidikan tinggi dan proses melamar ke program pascasarjana di Amerika Serikat, selanjutnya diikuti dengan beberapa informasi sebagai berikut.

1. Proses perekrutan
2. Model pengelolaan program yang tradisional maupun yang baru
3. Pengelolaan program beasiswa dari sudut pandang sector swasta maupun publik

4. Pengelolaan Program Beasiswa: *Leadership Management Tools and Skills*
5. Penentuan kriteria seleksi
6. Konsep monitoring, evaluasi dan pelaporan selagi program berjalan dan setelah program selesai
7. Mengukur *outcome* dan *impact*
8. Pengelolaan alumni
9. *Lesson learned* dari pengelola beasiswa Sri Lanka, Peru, Prestasi, dan Fullbright

Diklat *Scholarship Management* terlaksana dengan cukup baik. Seluruh pengajar sangat kompeten dan menguasai materi mata diklat yang diajarnya. Para praktisi yang diundang untuk mengisi sesi sebagian besar sangat kompeten sehingga diskusi dapat berjalan dengan lancar dan dinamis. Demikian pula kunjungan lapangan yang sangat bermanfaat dalam arti peserta mendapatkan kasus (*best practices*) yang dapat dijadikan contoh atau rujukan bagi pengelolaan beasiswa di unit kerja peserta.

Konsep-konsep yang disampaikan mengenai proses *monitoring and evaluation (monev)* sangat baik, mengingat proses *monev* ini cukup berat untuk dilakukan dengan sempurna. Meskipun demikian, proses *monev* ini menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sebuah program beasiswa. Melalui proses *monitoring* yang baik, dapat diketahui perkembangan studi dari penerima beasiswa termasuk tindakan antisipatif yang harus diambil oleh pengelola beasiswa dalam rangka memastikan penerima beasiswa dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Proses *monev* ini harus dilaksanakan di setiap tahap proses penyelenggaraan beasiswa, mulai dari proses perencanaan, seleksi, penempatan dan proses pengembalian penerima beasiswa ketika telah menyelesaikan studinya. Dengan demikian, peserta mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya melakukan proses *monitoring* yang menyeluruh agar mendapat data yang lebih berkualitas sehingga proses evaluasi pun menjadi lebih bermutu.

Hal lain yang diperoleh dari Diklat *Scholarship Management* ini adalah pentingnya mengelola

alumni penerima beasiswa. Selama ini, pengelolaan alumni penerima beasiswa lebih banyak dilakukan oleh lembaga atau pemerintah asing yang menyediakan sumber dana bagi sebuah beasiswa, Contohnya yang dilakukan dua penyedia beasiswa dari pemerintah lain, yaitu Australian Awards Scholarship (AAS) dari Pemerintah Australia dan StuNed dari Pemerintah Belanda. Ternyata dari diklat ini peserta mendapat pemahaman betapa pentingnya mengelola para alumni karena masukan yang diperoleh dari para alumni akan sangat berharga untuk pengembangan pengelolaan beasiswa selanjutnya. Peserta juga belajar membuat keputusan-keputusan mengenai hal atau proses yang perlu dipertahankan, ditingkatkan, atau bahkan dibuang. Selain dari data dan informasi yang diperoleh dari proses evaluasi, masukan-masukan dari lapangan sangat perlu dan penting bagi proses perencanaan skema beasiswa selanjutnya.

Evaluasi Pelaksanaan

Proses pelaksanaan Diklat *Scholarship Management* secara garis besar cukup baik. Pengusulan nama hingga ketentuan dokumen yang dibutuhkan sudah diketahui oleh peserta jauh-jauh hari (delapan minggu sebelum diklat). Dengan demikian, peserta dapat mempersiapkan berkas dokumen yang dibutuhkan dengan tepat waktu.



Foto: <https://capacitycanada.ca/>

Kendala yang sedikit dirasakan ketika proses pelaksanaan diklat adalah masalah proses melengkapi dokumen. Kondisi jaringan internet yang tidak menentu terkadang membuat proses unggah (*upload*) menjadi bermasalah. Meskipun demikian, hal ini dapat ditanggulangi dengan memberikan

kesempatan untuk melengkapi dokumen *hard copy* sehingga kelengkapan dokumen dapat terpenuhi sesuai jadwal. Selain dari hal tersebut, tidak dirasakan ada kendala lain selama pelaksanaan diklat dari pelamaran sampai dengan kepulangan.

Sedikit masukan yang dapat disampaikan adalah dalam hal pemilihan *provider*, sebaiknya dipilih yang sudah mempunyai pemahaman tentang keorganisasian di Indonesia, khususnya mengenai organisasi pemerintahan. Jika dirasa sulit menemukan *provider* yang sudah mempunyai pemahaman tentang organisasi pemerintahan di Indonesia, akan lebih baik jika *provider* tersebut diberikan bahan-bahan yang terkait dengan pengetahuan keorganisasian di Indonesia.

Kesimpulan

Diklat sejenis ini sangat bermanfaat bagi staf teknis yang sehari-hari menangani masalah-masalah operasional lapangan. Selain meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep-konsep secara teoretis, diklat seperti ini juga meningkatkan keterampilan staf yang akan bermanfaat dalam penyelesaian tugas sehari-hari. Selain itu, diklat yang diikuti oleh peserta yang homogen, dalam hal ini yang memiliki tugas sehari-hari yang sama, dapat menjadi ajang berbagi pengalaman di antara peserta diklat serta melatih *soft skills* peserta, misalnya kemampuan bekerja dalam tim, aspek kepemimpinan, ke-taat-as-an, disiplin, dan nilai-nilai standar lainnya.

Saran

Diklat teknis seperti ini mungkin juga akan baik jika dilaksanakan secara tidak berkelompok. Jika memungkinkan, diklat teknis spesifik seperti ini dilaksanakan dengan komposisi peserta yang beragam. Dalam arti jika dua atau tiga orang pengelola beasiswa dari Indonesia dapat mengikuti diklat dan bergabung dengan pengelola beasiswa dari negara lain, mungkin akan lebih kaya dengan nuansa keragaman baik dari sisi keorganisasian, norma, dan kebiasaan, serta nilai-nilai lainnya. Ajang berbagi pengalaman juga akan menjadi lebih bervariasi serta dapat memperluas wawasan dari setiap peserta. ■



Ilustrasi: <http://uvmbored.com/>

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Pagu Indikatif

Oleh: Setya Adi Nugraha

Sudah menjadi rutinitas pada setiap awal tahun di semua pemerintahan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional mulai disibukkan dengan proses penyusunan APBD tahun berikutnya (n+1). Proses penyusunan APBD sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sudah dimulai pada bulan Januari.

Kegiatan tersebut diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun (Musrenbangdus) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) oleh Pemerintah Desa. Selanjutnya, secara serentak pada bulan Februari dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec) untuk menyusun prioritas Kecamatan.

Hasil Musrenbangkec selanjutnya dibawa pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota (Musrenbangkab/kota) pada bulan Maret. Selanjutnya, hasil Musrenbangkab/kota dibawa dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) pada bulan April. Pada akhirnya hasil Musrenbangprov dibawa ke dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

Begitu panjang tahapan proses perencanaan pembangunan yang harus dilalui untuk menghasilkan sebuah produk yang bernama APBD. Pelibatan para pelaku perencanaan pembangunan (*stakeholders*), baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dunia usaha (swasta), maupun DPRD seakan menggambarkan betapa pentingnya sebuah proses perencanaan.



Ilustrasi: www.weteachwelearn.org

Indikator keberhasilan sebuah proses perencanaan sering kali hanya dilihat dari persentase kehadiran masyarakat dan *stakeholders* dalam Musrenbang tanpa melihat *output*-nya. Semakin banyak perwakilan masyarakat yang hadir dalam Musrenbang dinilai sebagai kesuksesan Musrenbang tersebut. Artinya, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dinilai berhasil.

Beberapa dekade yang lalu, sebelum berakhirnya program PNPM, masyarakat cukup semangat dan antusias untuk berpartisipasi dalam forum Musrenbang, meskipun sejumlah usulan prioritas hasil Musrenbang tidak terakomodasi dalam APBD. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang cukup tinggi. Mereka merasa dihargai dan dilibatkan dalam sebuah proses perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan alokasi anggaran.

Harapan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat melalui forum Musrenbang mulai membuahkan hasil. Masyarakat telah mampu menginventarisasi permasalahan, potensi, peluang yang dimiliki, serta tantangan yang harus dihadapi dalam mengatasi permasalahan di wilayahnya.

Namun, dalam beberapa periode Musrenbang setelah berakhirnya program PNMP, pergeseran paradigma masyarakat mengenai Musrenbang mulai terjadi. Masyarakat mulai kritis dan berani menyampaikan masukan kepada pemerintah. Mereka memberikan kritikan bahwa selama ini musrenbang terkesan hanya formalitas atau rutinitas yang kurang bermanfaat bagi wilayahnya. Musrenbang hanya dijadikan seremonial agar berkesan sebagai perencanaan partisipatif dan demokratis.

Masyarakat sering kali kecewa ketika prioritas usulan yang sudah dibahas berjenjang dari tingkat

dusun, desa, kecamatan, dan kabupaten tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Mereka mulai menuntut agar prioritas usulan yang telah diperjuangkan dalam forum Musrenbang dapat terakomodasi dalam APBD.

Mengapa Sistem Perencanaan Pembangunan tidak mampu menjamin terakomodasinya prioritas usulan program/kegiatan Musrenbang dalam APBD?

Musrenbang yang semula digadang-gadang sebagai perwujudan atau representasi sinergi pendekatan pembangunan politik, teknokratik, partisipatif, serta *bottom up* dan *top down* belum dapat terwujud sesuai harapan masyarakat.

Usulan prioritas program/kegiatan, yang telah disusun melalui proses yang panjang dan berjenjang dari tingkat paling bawah, belum membuahkan hasil yang sebanding dengan proses yang harus dilalui. Mereka beranggapan persentase usulan hasil Musrenbang yang terakomodasi dalam APBD masih sangat kecil. Sebagai ilustrasi, dalam APBD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017, total belanja langsung sebesar Rp751.105.509.000,00. Adapun total usulan Musrenbang Kecamatan tahun 2016 sebesar Rp346.558.916.800,00, hanya terakomodasi sebesar Rp49.490.000.000,00 atau 6,58% .

Tidak dimungkiri bahwa ada beberapa faktor penyebab rendahnya persentase prioritas usulan hasil Musrenbang kecamatan yang terakomodasi dalam APBD. Sebagai contoh, masih banyak usulan hasil Musrenbang Kecamatan yang berskala lokal desa, yang mestinya bisa dibiayai melalui APBD Desa sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di samping itu, pemerintah juga belum mempunyai regulasi yang menjamin terakomodasinya prioritas usulan hasil Musrenbang Kecamatan dalam APBD.

Inilah alasan perlunya disusun regulasi yang menjamin terakomodasinya prioritas usulan hasil Musrenbang dalam APBD. Harapannya, Musrenbang menjadi lebih bermakna sebagai wahana pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Apakah dampak dari fenomena tersebut ?

Dengan munculnya fenomena rendahnya prosentase hasil Musrenbang Kecamatan yang terakomodasi dalam APBD, tentu saja memunculkan suara-suara sumbang dalam setiap penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan. Masyarakat menganggap tidak perlu lagi mengajukan usulan melalui Musrenbang.

Sebagian masyarakat bahkan meyakini jika mengajukan usulan melalui anggota DPRD akan lebih terjamin untuk terakomodasi dalam APBD dibandingkan melalui Musrenbang. Fenomena ini sungguh ironis. Musrenbang, yang diharapkan menjadi wahana untuk pemberdayaan, menyerap usulan dari bawah (*bottom up*), dan pelibatan dalam perencanaan, dianggap tidak lagi mampu menyuarakan aspirasi mereka. Fenomena ini tentunya perlu segera disikapi oleh pemerintah agar tidak menjadi bumerang bagi pemerintah.

“Ruh” musrenbang harus dikembalikan pada posisi semula sesuai amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Melalui Musrenbang, mereka berharap agar pemerintah memberikan peran penuh sejak proses perencanaan hingga penganggaran.

Apakah rekomendasi yang diperlukan untuk mengatasi fenomena tersebut?

Dalam upaya mengembalikan “Ruh” musrenbang tentunya sangat bergantung dari *political will* pemerintah dan seluruh *stakeholders* pengambil kebijakan. Musrenbang yang selama ini terkesan hanya sebagai wadah partisipasi masyarakat untuk ikut berproses dalam merencanakan program-program pembangunan dari tingkat bawah sudah saatnya “di-setting ulang”.

Mekanisme Musrenbang harus diubah. Mereka harus diberikan peran sejak dari proses perencanaan program/kegiatan hingga pengambilan keputusan pengalokasian anggaran. Dalam pembahasan Musrenbang, jumlah anggaran yang



Foto: istimewa

Peranan Remitansi TKI dalam Perekonomian Nasional

Oleh: Ratna Sri Mawarti M.

Peran tenaga kerja Indonesia (TKI) sebagai tenaga migran di negara lain memberi dampak positif bagi negara tujuan dan Indonesia. Peran pekerja migran menurut *International Labour Organization* (ILO), bagi negara tujuan akan terbantu dalam pembangunan dan pertumbuhannya, sedangkan bagi negara asal akan mendapatkan kiriman remitansi (ILO *Global Estimates on Migrant Workers*, 15 Desember 2015). Demikian juga peran TKI, bagi negara tujuan akan mendapatkan pasokan tenaga kerja pada lapangan kerja yang tidak dapat dipenuhi oleh warga negaranya, sedangkan Indonesia akan mendapatkan pengiriman uang dari para TKI tersebut untuk memperbaiki ekonomi keluarga TKI. Remitansi pekerja adalah bagian penting dari arus modal internasional, terutama di negara-negara pengekspor tenaga kerja.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengirimkan warganya sebagai tenaga kerja migran. Secara umum selama ini diketahui bahwa negara tujuan kerja utama tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah Malaysia dan Arab Saudi. Benar adanya bahwa Malaysia menjadi destinasi utama bagi para TKI. Sejak tahun 2012, TKI yang bekerja di Malaysia mengalahkan Arab Saudi. Meskipun dari tahun ke tahun jumlahnya sudah berkurang, tetapi sampai dengan tahun 2015, Malaysia masih menduduki posisi pertama sebagai tujuan kerja TKI.

Tidak demikian halnya dengan Arab Saudi. Sampai dengan tahun 2011, jumlah TKI di Arab Saudi terbanyak, namun sejak tahun 2012 sudah sangat berkurang bahkan menduduki posisi ke-3 setelah Malaysia dan Taiwan. Penurunan jumlah TKI bukan

hanya terjadi di Malaysia dan Arab Saudi, tetapi hampir di semua negara tujuan sehingga secara total jumlah TKI juga berkurang selama lima tahun terakhir.

Selain ketiga negara tersebut, Uni Emirat Arab, Hongkong, dan Singapura juga merupakan negara tujuan kerja TKI. Namun, belum banyak TKI yang bekerja di negara-negara maju seperti Jepang, Eropa, atau Amerika Serikat (AS). TKI di AS selama lima tahun terakhir jumlahnya menduduki posisi ke-9, dan masih jauh jumlahnya jika dibandingkan dengan enam negara destinasi utama tersebut. Adapun TKI di Jepang, meskipun berada di kawasan Asia, jumlahnya masih di bawah TKI di AS.

Meskipun jumlah TKI menurun, nilai remitansi total cenderung meningkat setiap tahun, sejak tahun 2010 hingga 2015. Selama kurun waktu tersebut, *share* remitansi terbesar berasal dari TKI di Asia (56,3%), Timur Tengah (35,8%), dan Amerika (6,1 %).

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri

Secara total, jumlah TKI pada tahun 2015 menurun 52,1% dibandingkan tahun 2010, dari 575.804 orang menjadi menjadi hanya 275.736 orang (grafik 1). Berkurangnya jumlah TKI yang bekerja di luar negeri diakibatkan turunnya permintaan dari beberapa negara yang biasanya banyak mempekerjakan TKI terutama Malaysia dan Arab Saudi, masing-masing -15,9% dan -90%. Jumlah TKI di Malaysia dan Arab Saudi menurun karena kebijakan kedua negara tersebut semakin membatasi izin kerja bagi tenaga kerja asing (TKA). Pengurangan TKA di Arab Saudi seiring dengan lesunya perekonomian global akibat penurunan harga minyak dunia yang memicu pengangguran di negara tersebut. Dalam mengurangi jumlah TKA, kedua negara tersebut sangat tegas mengeluarkan izin kerja bagi TKA dan melakukan "sweeping" pada TKA yang ilegal. Sebagai implikasi dari kebijakan tersebut, baik Malaysia maupun Arab Saudi, tidak segan melakukan deportasi termasuk pada TKI ilegal.

GRAFIK 1. TKI DI LUAR NEGERI



Sumber: BNP2TKI

Jumlah TKI di Taiwan dan AS pada tahun 2015 lebih besar dari 2010, tetapi sebenarnya jumlah tersebut cenderung menurun selama dua tahun terakhir. Jumlah TKI di AS pada tahun 2015 bahkan menurun drastis (89%) dibandingkan dengan tahun 2014.

Latar belakang pendidikan para TKI sebagian besar adalah tamatan SD dan SMP yang masing-masing mencapai rata-rata 32,6% dan 38,8% per tahun (BNP2TKI, Data Penempatan TKI 2011–2016). Latar belakang pendidikan sebagian besar TKI yang rendah berimplikasi pada profesi TKI yang hanya menjadi pembantu rumah tangga (*domestic worker*) dengan rata-rata 33,3% per tahun selama periode 2011–2015. Namun, sebenarnya angka tersebut telah mengalami penurunan setiap tahunnya dari 45,6% menjadi 22,1%.

Terjadi peningkatan cukup tinggi untuk TKI dengan profesi sebagai operator dari 9,4% menjadi 18,8%, *caregiver* dari 7,6% menjadi 12,8%, dan *plantation worker* dari 6,8% menjadi 14%. Berdasarkan kelompok lapangan usaha (KLUI), pekerja pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan meningkat dari 14,4% menjadi 17,5%; sedangkan industri pengolahan/manufaktur meningkat dari 8,3% menjadi 17,7%. Peningkatan profesi tersebut kemungkinan berkontribusi pada peningkatan persentase TKI formal yang mulai mendominasi dan mencapai 55% pada 2015, sedangkan pada tahun 2010 hanya 45%. Meskipun demikian, untuk tingkat jabatan pimpinan belum mencapai 1% dan profesional belum mencapai 2%.

TKI sebagian besar adalah wanita (TKW) yang mencapai 60% dari total TKI pada tahun 2015. Angka tersebut sudah turun selama lima tahun terakhir yang semula mencapai 78% pada tahun 2010. Dengan besarnya jumlah TKI di Malaysia dan Arab Saudi, kemungkinan besar adalah TKW dan bekerja sebagai pekerja domestik atau pembantu rumah tangga karena sebagian besar hanya berpendidikan setingkat SD dan SMP.

Performa Remitansi

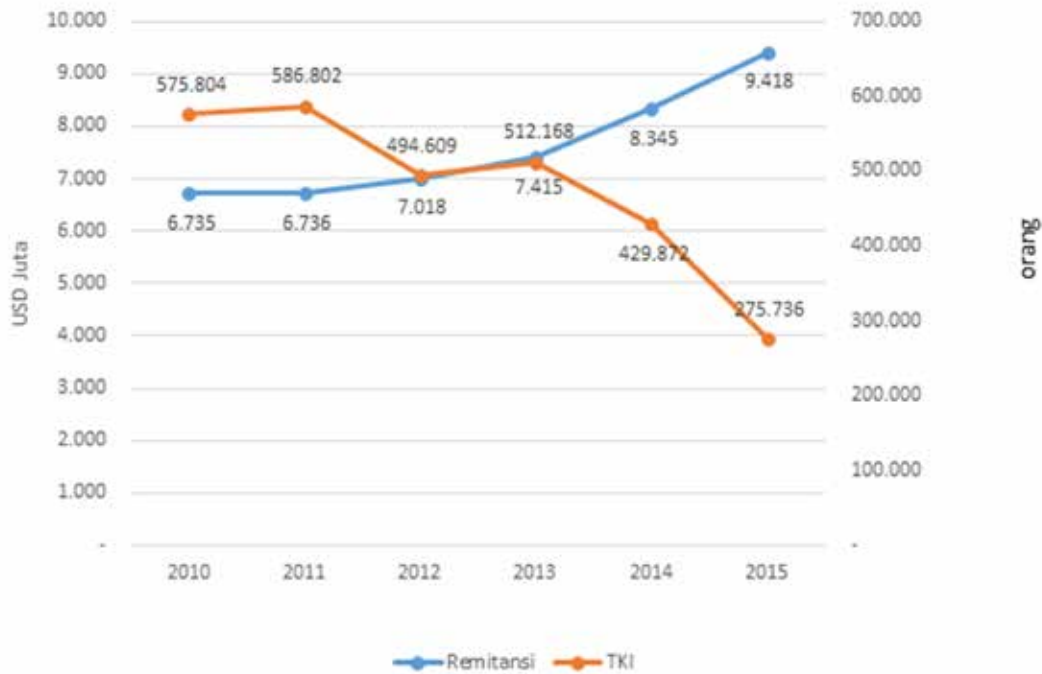
Meskipun jumlah TKI semakin menurun, total remitansi yang masuk ke Indonesia meningkat

setiap tahunnya. Dari tahun ke tahun kesadaran TKI untuk mengirimkan gajinya melalui bank atau jasa formal sudah lebih besar. Realitas remitansi yang masuk ke Indonesia sebenarnya bisa lebih besar dari yang tercatat karena masih banyak TKI yang mengirimkan gajinya melalui jalur formal nonbank dan jalur nonformal atau kurir. Masih adanya pengiriman melalui jalur nonbank dan kurir, antara lain karena sulitnya akses bank nasional akibat tidak adanya perwakilan bank nasional di negara tujuan kerja TKI maupun di daerah asal mereka. Jadi faktor kurangnya *outlet cash-in* (tempat setor) formal yang berada dalam jangkauan TKI dan masih terbatasnya *outlet cash-out* (tempat tarik) sehingga membutuhkan biaya dan waktu. Selain itu, masih rendahnya tingkat literasi keuangan TKI dan keluarganya juga menjadi alasan keengganan TKI belum mengirimkan uang melalui bank.

Pengirim remitansi terbesar tahun 2015 adalah TKI yang bekerja di Arab Saudi, Malaysia, Amerika Serikat (AS), dan Taiwan, meskipun urutan jumlah TKI mulai dari yang terbanyak adalah Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, dan AS. Ditinjau dari negara tujuan utama TKI bekerja, sampai dengan tahun 2015, Malaysia menjadi penerima TKI terbesar, tetapi nilai remitansi yang tercatat tidak sebesar dari Arab Saudi. Berdasarkan beberapa penelitian, sebagian besar TKI yang bekerja di Malaysia telah mengirimkan pendapatannya melalui jalur formal bank seperti BNI, BRI, dan Mandiri, atau jalur formal nonbank seperti perusahaan remitansi lokal khususnya EzMoney (Puslitfo BNP2TKI dan Alvara Research Centre, 2016). Beberapa bank nasional memang sudah membuka perwakilannya di Malaysia sehingga para TKI memanfaatkan BNI, BRI, dan Bank Mandiri. Mata uang remitansi dari Malaysia dikirim dalam ringgit Malaysia.

Arab Saudi menjadi pengirim remitansi terbesar pada tahun 2015, meskipun TKI yang bekerja di sana tidak sebesar di Malaysia. Besarnya remitansi yang masuk kemungkinan karena semakin meningkatnya kesadaran TKI di Arab Saudi yang mulai memilih mengirim gaji melalui bank.

GRAFIK 2. NILAI REMITANSI DAN JUMLAH TKI



Sumber: SEKI BI dan BNP2TKI, diolah

Jumlah TKI di Taiwan pada 2015 merupakan yang ke-2 setelah Malaysia, tetapi remitansi yang masuk justru lebih kecil dari Arab Saudi, bahkan dari Amerika Serikat. Berdasarkan hasil survei, TKI yang bekerja di Taiwan mengirim uang melalui jalur formal nonbank lokal, seperti BNI Express, dan informal nonbank, yakni Toko Indo, karena relatif cepat dan *outlet*-nya banyak di negara tersebut (Puslitfo BNP2TKI dan Alvara Research Centre, 2016). Artinya, TKI di Taiwan memang belum banyak yang mengirimkan uangnya melalui bank karena belum ada perwakilan bank nasional di negara tersebut. Dari hasil survei tersebut ditemukan bahwa TKI juga enggan menggunakan bank Taiwan karena biayanya dinilai cukup mahal. Mata uang yang dikirim berupa dolar Taiwan.

Secara total, nilai remitansi dari AS selama lima tahun terakhir belum sebesar Arab Saudi, Malaysia, dan Taiwan, tetapi pertumbuhannya mencapai 822% pada

2015 dibandingkan 2010. Ketika nilai remitansi dari Taiwan mencapai 96% dan Saudi Arabia 21%, nilai remitansi Malaysia justru turun 5% (grafik 3). Meskipun demikian, pada tahun 2014 dan 2015, remitansi dari AS menduduki peringkat ke-3 setelah Arab Saudi dan Malaysia, yang artinya mampu melampaui Taiwan. Pertumbuhan remitansi dari AS, pada tahun 2015 meningkat 33% dibandingkan tahun 2014, Taiwan 34%, Saudi Arabia 22%, sedangkan Malaysia turun 14%.

Remitansi dari AS dari tahun ke tahun terus meningkat dan nilainya mampu menduduki posisi ke-3 selama dua tahun terakhir. Jika ditinjau dari jumlah TKI yang bekerja di AS masih jauh lebih kecil dibandingkan ketiga negara tersebut dan jumlahnya juga cenderung menurun (grafik 1). Dapat ditarik kesimpulan secara sederhana bahwa TKI yang bekerja di AS cenderung mengirimkan uangnya secara resmi tercatat melalui bank karena jarak yang jauh dan kemungkinan terdapat akses bank nasional

GRAFIK 3. REMITANSI TKI DARI NEGARA UTAMA



Sumber: SEKI Bank Indonesia, diolah

untuk transfer. Selain itu, TKI di AS kemungkinan memperoleh gaji lebih besar karena berpendidikan atau minimal sebagai TKI formal mengingat memasuki negara tersebut sangat sulit tanpa bekal kemampuan bahasa, kepastian tujuan, dan keahlian tertentu.

Dominasi TKI formal tampaknya berdampak positif juga pada penerimaan remitansi yang semakin meningkat. Seiring dengan peningkatan TKI formal yang telah mencapai sebesar 55%, nilai remitansi juga meningkat 40% pada tahun 2015.

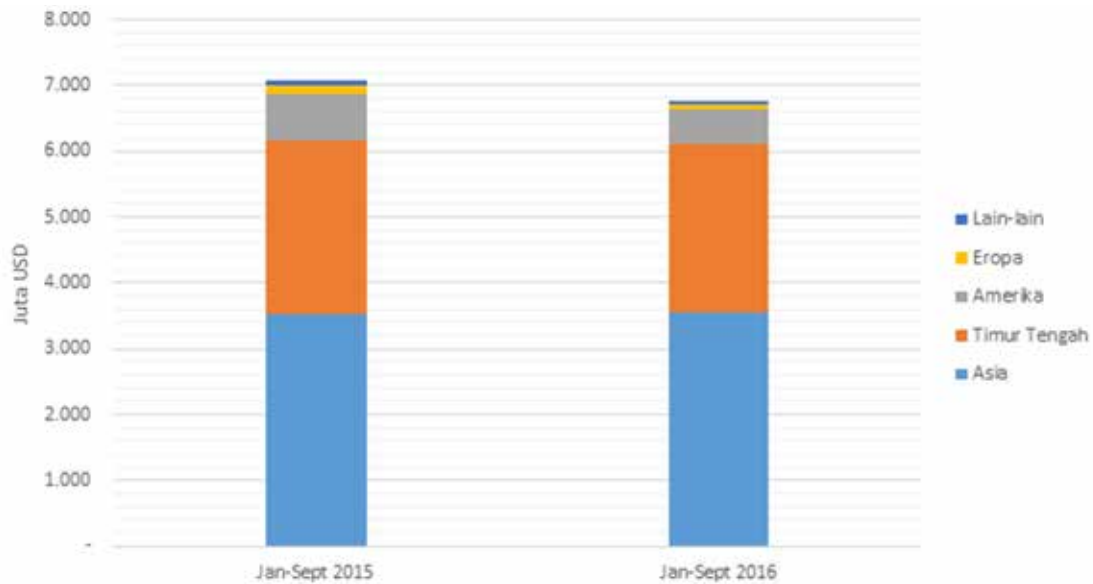
Remitansi 2016 dan Perannya bagi Perekonomian Nasional

Nilai remitansi selama tiga triwulan 2016 (USD 6.761 juta) masih di bawah tahun sebelumnya (USD 7.081 juta) pada periode yang sama, menurun 4,5 persen (grafik 4). Semua kawasan mengalami penurunan pengiriman remitansi kecuali Asia yang meningkat

0,3 persen dari USD 3.531 juta menjadi USD 3.541 juta. Penurunan remitansi terbesar berasal dari AS yang mencapai USD 204 juta (28,5 persen) seiring dengan turunnya jumlah TKI yang sangat drastis dari 1.029 orang (2015) menjadi hanya 249 orang (2016).

Turunnya jumlah TKI di AS sepanjang tahun 2016, kemungkinan karena dampak dari pernyataan Presiden Donald Trump yang akan melarang masuknya pendatang. Seiring dengan kebijakan Presiden Trump yang semakin membatasi masuknya migran maka perlu menjadi perhatian bagi TKI yang sedang dan akan bekerja di AS yang secara umum juga akan mendapatkan imbasnya. Selama kampanye, Trump mengatakan akan menghentikan transfer uang para pekerja Meksiko dari AS kecuali jika Meksiko setuju untuk mendanai dinding perbatasan kedua negara tersebut. Atas pernyataan tersebut maka kebijakan-kebijakan yang terkait pengiriman remitansi ke negara asal termasuk ke

GRAFIK 4. REMITANSI JANUARI-SEPTEMBER 2016



Sumber: SEKI Bank Indonesia, diolah

Indonesia dari para TKI juga perlu diwaspadai pada tahun-tahun mendatang, meskipun kemungkinan tidak seekstrem Meksiko.

Sementara itu, remitansi dari Timur Tengah selama 9 bulan pada tahun 2016 turun USD 49 juta (1,9%), paralel dengan turunnya jumlah TKI di semua negara di kawasan tersebut seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Bahrain (BNP2TKI, 2016).

Di tengah perlemahan ekonomi global yang berimbas pada penurunan ekspor nonmigas selama sembilan bulan pada tahun 2016, masuknya aliran dana (*capital inflow*) dalam bentuk remitansi dapat membantu perekonomian lokal jika dikelola dengan baik. Selama ini, pemanfaatan remitansi bergantung dari besar dan posisi dari TKI tersebut dalam keluarganya.

Jika TKI merupakan sumber penghasilan utama bagi keluarga pekerja migran dan nilai remitansinya tidak terlalu besar maka remitansi cenderung habis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti konsumsi keluarga, pendidikan, dan renovasi/

perbaikan rumah. Namun, jika TKI berasal dari latar belakang ekonomi yang relatif cukup, remitansi dapat dikumpulkan untuk meningkatkan aset keluarga berupa sawah/tanah, disimpan di bank, renovasi/perbaikan rumah, dan hanya sedikit yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari (Anggraeni Primawati, Remitan sebagai Dampak Migrasi Pekerja ke Malaysia, 2011).

Dari penelitian lain ditemukan bahwa remitansi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terutama untuk konsumsi rumah tangga, membangun perumahan, biaya pendidikan, dan modal memulai wirausaha (Cadwell 1969). Selain itu, remitansi juga dimanfaatkan untuk biaya perayaan siklus hidup/upacara-upacara adat, untuk biaya perjalanan bagi pelaku migrasi baru ke tempat migran terdahulu, untuk pembayaran hutang, dan untuk menyumbang pembangunan di desa asal.

Remitansi bersifat stabil dalam arti tidak ada indikasi kemungkinan uang akan ke luar dari



Foto-foto: istimewa

Indonesia karena memang remitansi ditujukan kepada negara asal. Sangat berbeda dengan sifat aliran masuk sektor keuangan lainnya seperti portofolio yang dapat setiap saat keluar dan masuk mengikuti suku bunga yang ditawarkan antarnegara. Dengan demikian, remitansi dapat berperan sebagai sumber keuangan inklusif bagi kelompok *in the bottom of the pyramid* (berpendapatan rendah dan tidak tetap, tinggal di daerah terpencil, menderita cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya *unbanked* (Bank Indonesia, SEKI).

Remitansi minimal menjadi solusi atas kebutuhan dasar bagi masyarakat yang sangat kurang mampu. Remitansi bahkan juga dapat berperan dalam meningkatkan aset keluarga yang bersangkutan dan memberi dampak sosial dan ekonomi dalam membangun daerah asalnya.

Kesimpulan

Dengan menghubungkan beberapa data sekunder tentang TKI dari BNP2TKI, remitansi dari Bank Indonesia, serta beberapa survei dan kajian maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

- Banyaknya jumlah TKI yang bekerja pada suatu negara tidak paralel dengan nilai remitansi yang masuk ke Indonesia. Ini disebabkan faktor ketersediaan *outlet cash-in* formal yang berada dalam jangkauan TKI, masih terbatasnya *outlet cash-out*, dan rendahnya tingkat literasi keuangan TKI serta keluarganya.
- Terjadi korelasi positif antara peningkatan TKI formal dengan peningkatan remitansi.
- Kemungkinan TKI di AS adalah TKI formal sehingga memperoleh gaji lebih besar dibandingkan dengan yang bekerja di negara lainnya. Mereka lebih terliterasi dengan

memanfaatkan jasa bank. Jumlah TKI tidak selalu berkorelasi positif dengan remitansi.

- Pemerintah Indonesia perlu mewaspadai kebijakan Presiden Donald Trump yang membatasi masuknya migran yang kemungkinan juga berdampak terhadap masuknya calon TKI ke negara tersebut.
- Kebijakan Presiden Donald Trump terhadap rencana pemblokiran transfer remitansi pada pekerja dari Meksiko, bukan tidak mungkin diberlakukan terhadap TKA lain, termasuk TKI.
- Remitansi yang dikirim ke Indonesia sesuai mata uang di negara TKI bekerja.
- Remitansi merupakan salah satu sumber dan akses keuangan inklusif bagi kelompok kurang mampu serta menjadi sumber kesejahteraan di daerah asal TKI.

Saran Tindak Lanjut

Mencermati kesimpulan di atas maka diusulkan saran tindak lanjut sebagai berikut.

- Jumlah TKI yang bekerja di luar negeri tidak harus meningkat jumlahnya setiap tahun. Namun, yang perlu ditingkatkan adalah TKI formal untuk meningkatkan daya saing, memberikan jaminan penerimaan gaji yang lebih besar, mendapat perlindungan yang lebih jelas, serta meningkatkan martabat bagi yang bersangkutan dan Indonesia.
- Perlunya literasi yang lebih intens pada TKI dan keluarganya agar memanfaatkan jasa pengiriman formal atau jika dimungkinkan melalui bank untuk kepentingan keamanan dan memperoleh kepastian nilai tukar.
- Mengingat manfaat dan peran bank terkait dengan remitansi lebih menjamin keamanan, pencatatan dan kepastian nilai tukar resmi, maka perlu dibuka cabang bank nasional di negara yang banyak mempekerjakan TKI dan di daerah asal TKI (termasuk anjungan tarik tunai/ ATM di daerah).
- Mengingat remitansi dipastikan bersifat *capital inflow* maka arah pemanfaatan remitansi perlu mendapat pembinaan agar lebih produktif dan mampu berperan dalam pembangunan daerah.

- Dengan semakin ketatnya kebijakan AS terhadap migran maka perlu upaya perlindungan bagi TKI yang masih bekerja di AS dan pendekatan masuknya calon TKI ke AS pada tahun-tahun mendatang.
- Terkait dengan ancaman pemblokiran transfer remitansi bagi pekerja Meksiko, maka perluantisipasi mekanisme terhadap transfer remitansi dari TKI di AS ke Indonesia jika sewaktu-waktu diberlakukan pembatasan terhadap pengiriman remitansi ke negara asal. ■

Daftar Pustaka

- Data Penempatan TKI 2010 sampai dengan 2016, BNP2TKI.
- Data Remitansi, SEKI, Bank Indonesia.
- *Meningkatkan Remitansi TKI: Perlu Bank Nasional di Taiwan, Kinabalu dan Hong Kong*, <http://www.bnp2tki.go.id/read/11030/Meningkatkan-Remitansi-TKI:-Perlu-Bank-Nasional-di-Taiwan-Kinabalu-dan-Hong-Kong>, 28 Januari 2016 08:48 WIB.
- Anggraeni Primawati, *Remitan sebagai dampak Migrasi Pekerja ke Malaysia*, Sosiokonsepsia, Vol. 16 No. 02, Tahun 2011, <http://puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/b38502418839b93f79f07b2814f473a8.pdf>
- Keuangan inklusif, Bank Indonesia, <http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/Indonesia/Contents/Default.aspx>
- Global Estimates on Migrant Workers, ILO, 15 Desember 2015.
- *Donald Trump Mulai Memerintah, Migran Asal Meksiko Mulai Khawatir*, <http://www.beritasatu.com/amerika/407569-donald-trump-mulai-memerintah-migran-asal-meksiko-khawatir.html>

++ Penulis merupakan Fungsional Perencana Madya pada Kedepatian Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Foto: <http://getthehealthy.com>

Kualitas dan Kuantitas Belanja Kesehatan Sebagai Suatu Keharusan

Oleh: Lelih Herawati, S.K.M., M.Kes.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12, mengamanatkan bahwa urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menyatakan bahwa penganggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total APBD di luar gaji. Kualitas kesehatan menjadi salah satu indikator terpenting untuk mengukur kemajuan sebuah bangsa atau suatu daerah. Bagaimana dengan kondisi Provinsi Banten? Indikator kemajuan kualitas kesehatan Provinsi Banten dari tahun ke tahun dikatakan menunjukkan perbaikan. Sarana dan pelayanan kesehatan mengalami peningkatan. Perlu dikemukakan pula, banyak daerah di Indonesia juga berlomba-lomba mendorong peningkatan kesehatan sebagai keniscayaan untuk menciptakan kehidupan bermutu dan bermartabat.

Latar Belakang

Dalam situasi secara nasional, kondisi pembangunan kesehatan Provinsi Banten masih termasuk memprihatinkan karena tertinggal bila dibandingkan provinsi di Pulau Jawa. Menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka kematian ibu mencapai 308/100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi 32/1.000 kelahiran hidup. Ini merupakan angka tertinggi di Pulau Jawa. Begitu pula menurut profil kesehatan Indonesia tahun 2015, cakupan pelayanan K4 85,67%, persalinan oleh tenaga kesehatan 75,87%, kunjungan nifas 86,35%, dan imunisasi dasar lengkap 88,97%. Berdasarkan indikator tersebut, seluruhnya berada di peringkat ke-6 dari enam provinsi di Pulau Jawa.

Dari segi penyakit menular, Banten merupakan salah satu dari dua provinsi di Pulau Jawa yang mengalami KLB Diare. Dari sejumlah kasus yang tercatat,

Provinsi Banten merupakan satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang masih terdapat kematian karena kasus diare. Artinya, *Case Fatality Rate* diare di Provinsi Banten sebesar 5,26%. Untuk penyakit tidak menular juga menjadi masalah bagi pemerintah karena akan berpengaruh pada beban pembayaran pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Berdasarkan data secara nasional, defisit BPJS Kesehatan pada tahun 2014 mencapai 1,8 triliun dan pada tahun 2015 mencapai 3,3 triliun.

Di balik angka-angka itu, sudah pasti terdapat persoalan yang lebih rumit karena masalah kesehatan tidaklah berdiri sendiri. Kualitas kesehatan yang rendah atau buruk sudah pasti terkait dengan kebodohan dan kemiskinan. Tingginya tingkat kematian ibu dan bayi antara lain dikarenakan persoalan kekurangan gizi. Persoalan bertambah kompleks karena banyak

warga yang mengalami kemiskinan, sedangkan peningkatan pelayanan kesehatan masih lambat. Lebih memprihatinkan lagi, komitmen di kalangan pimpinan yang masih kurang untuk mendorong peningkatan pelayanan kesehatan. Ketersediaan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan tidak merata. Tenaga dokter dan tenaga kesehatan lainnya masih sangat kurang, bahkan tidak ada di beberapa Puskesmas di sejumlah kabupaten/kota. Dengan demikian, belanja kesehatan sebaiknya tidak hanya melihat kuantitas, tetapi juga kualitas dari belanja tersebut.

Memperhatikan peraturan dan kondisi kesehatan di Provinsi Banten, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten dengan pendampingan dari Tim Praktisi Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (PKEK



Foto: <http://dinkes.bantenprov.go.id/>

FKM UI) melakukan kajian dengan Pendekatan *Province Health Account (PHA)* dan *District Health Account (DHA)* di provinsi dan empat kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Pandeglang. Tujuannya adalah melakukan analisis capaian indikator kesehatan dengan pola penggunaan anggaran kesehatan menggunakan data pendukung, yaitu data demografi, data status kesehatan, data kinerja program kesehatan, data sistem kesehatan, data pembiayaan kesehatan, dan data realisasi belanja kesehatan selama tahun 2015.

Konsep PHA dan DHA

Health accounting adalah kegiatan mencatat dan memilah-milah belanja kesehatan menurut klasifikasi baku yang dikeluarkan di suatu wilayah (nasional, provinsi, kabupaten/kota). Umumnya kurun waktu pencatatan adalah biaya yang dikeluarkan selama satu tahun. Dengan *health account*, dapat diperoleh gambaran belanja kesehatan secara menyeluruh di suatu wilayah selama 1 (satu) tahun, termasuk diantaranya total belanja kesehatan, total belanja kesehatan per kapita, persentase belanja kesehatan dalam anggaran pemerintah, sumber-sumber biaya kesehatan, konsistensi belanja kesehatan dengan kebijakan, dan efektivitas belanja kesehatan terhadap peningkatan/penurunan kinerja pembangunan kesehatan.

Province Health Account (PHA)

PHA mencakup belanja kesehatan dalam suatu wilayah suatu provinsi. Artinya, PHA mencakup belanja yang dikeluarkan di sejumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut ditambah dengan belanja kesehatan untuk kegiatan-kegiatan di provinsi yang tidak tercatat dalam DHA. Ada sembilan dimensi pokok dalam PHA, yaitu

- sumber pembiayaan;
- pengelola anggaran;
- penyelenggaraan pelayanan kesehatan/ pelaksana program;
- fungsi kesehatan;
- program kesehatan;
- jenis kegiatan;
- mata anggaran (*input*);

- jenjang kegiatan; dan
- penerima manfaat;

Melalui pelaksanaan PHA akan diperoleh gambaran, antara lain

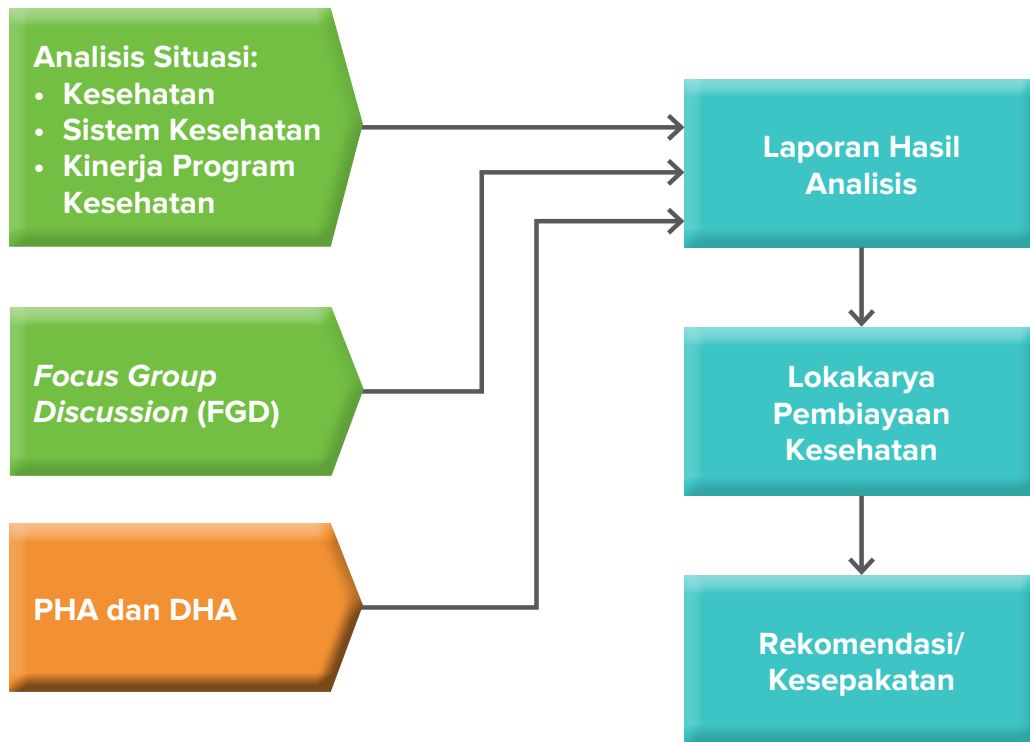
- total biaya kesehatan;
- biaya kesehatan per kapita (yang dapat dibandingkan dengan angka nasional atau daerah lain);
- sumber-sumber biaya kesehatan (pemerintah dan nonpemerintah);
- pengelola biaya kesehatan;
- penyedia layanan kesehatan yang didanai dari biaya kesehatan;
- jenis fungsi pelayanan kesehatan yang dibiayai;
- jenis program kesehatan yang dibiayai, misalnya kegiatan langsung atau tidak langsung;
- mata anggaran (investasi, operasional, pemeliharaan) yang dibiayai;
- jenjang pelaksanaan kegiatan yang dibiayai; serta
- segmen penduduk yang mendapat manfaat dari biaya kesehatan.

District Health Account (DHA)

DHA mencakup belanja kesehatan dalam suatu wilayah kabupaten/kota. Dengan DHA, kabupaten/kota bisa melakukan “diagnosis” kemungkinan adanya masalah dalam sistem pembiayaan kesehatan di kabupaten/kota tersebut. Dengan hasil DHA, kabupaten/kota dapat melakukan perbaikan dan perubahan (*reform*) terhadap sistem pembiayaan.

DHA menghasilkan data yang dipergunakan sebagai bahan advokasi kepada pengambil keputusan dengan tujuan memperbaiki kekurangan sistem pembiayaan, misalnya meningkatkan alokasi anggaran, mengarahkan alokasi dana pada masalah prioritas, mengarahkan dana pada intervensi dan kegiatan yang lebih *cost effective*, mengembangkan sistem asuransi, dan lain-lain.

DHA juga dapat menghasilkan gambaran besar belanja kesehatan rumah tangga, baik untuk pembayaran langsung (*out of pocket payment*) maupun melalui asuransi kesehatan.



Metodologi

Kajian ini menggunakan pendekatan atau metodologi sebagaimana tergambar dalam bagan di atas. Dari kerangka konsep tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahap awal dilakukan analisis situasi melalui studi literatur dokumen (RPJMD, Renstra, dan RPJPD) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Provinsi Banten. Analisis situasi dilaksanakan untuk memotret sistem kesehatan yang saat ini dilaksanakan melalui data pendukung, yaitu data demografi, data status kesehatan, data kinerja program kesehatan, data sistem kesehatan, data pembiayaan kesehatan, dan data realisasi belanja kesehatan selama tahun 2015. Selain itu, juga akan dilaksanakan FGD untuk menggali potensi dan masalah terkait penatalaksanaan program kesehatan di Provinsi Banten. Setelah dua kegiatan tersebut dilakukan maka disusunlah PHA dan DHA Provinsi Banten. Hasil analisis tersebut disampaikan dalam lokakarya yang dihadiri oleh *stakeholder* terkait hingga pada akhir kegiatan ini menghasilkan luaran (*output*) berupa rekomendasi/kesepakatan. PHA dilakukan pada tingkat Provinsi Banten, sedangkan

DHA dilaksanakan di empat kabupaten/kota terpilih, yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Pandeglang.

Hasil Kajian

Dari hasil kajian yang dilakukan maka dihasilkan beberapa hal di bawah ini.

1. Ketentuan APBD untuk urusan kesehatan belum dipenuhi sesuai Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Anggaran Kesehatan tahun 2015 di Provinsi Banten baru mencapai 2,6% (di luar gaji). Adapun di kabupaten/kota (Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon) anggaran kesehatan sudah mencapai 10% APBD (di luar gaji). Alokasi sebesar 2,6% masih jauh dari ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Banten harus meningkatkan kuantitas dan kualitas alokasi belanja kesehatan yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

2. Anggaran kesehatan 2,6% dari APBD Provinsi Banten Tahun 2015 berdasarkan fungsi kesehatan terbagi atas:

Pelayanan Kuratif	4,42%
Layanan Penunjang	7,51%
Alat/Bahan Medis	21,28%
Pelayanan Pencegahan dan Kesehatan Masyarakat	8,76%
Tata Kelola Sistem dan Administrasi Kesehatan	50,7%
Pelayanan Kesehatan Lainnya	7,04%

Secara struktur penganggaran, terdapat ketimpangan dari alokasi anggaran yang dibelanjakan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Pelayanan Pencegahan dan Kesehatan Masyarakat hanya dialokasikan 8,76%. Seharusnya anggaran ini mendapat porsi besar untuk menekan pembiayaan kesehatan individu, belanja modal, dan kuratif.

Belanja Tata Kelola Sistem dan Administrasi Kesehatan mendapat alokasi yang sangat besar (50,7%). Efektivitas kegiatan ini menjadi sebuah pertanyaan apabila ditelisik lebih dalam karena pembiayaan digunakan untuk honor, akomodasi, perjalanan, dan belanja operasional lain yang tidak memberikan dampak langsung dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Jika memperhatikan belanja kesehatan berdasarkan jenis kegiatan maka kegiatan tidak langsung mencapai 79,25% dan kegiatan langsung mencapai 20,75%. Komposisi ini menunjukkan kurangnya keberpihakan terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat.

3. Dalam Perpres No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, pengelolaan kesehatan tersusun oleh 7 (tujuh) komponen utama, yaitu (1) upaya kesehatan; (2) penelitian dan pengembangan kesehatan; (3) pembiayaan kesehatan; (4) sumber daya manusia kesehatan;

(5) sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan; (6) manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan; serta (7) pemberdayaan masyarakat.

Belanja kesehatan berdasarkan jenis program kesehatan di Provinsi Banten dalam Program Penguatan Sistem Kesehatan terbagi atas:

Tata Kelola Sistem Kesehatan	32,96%
Sumber Daya Manusia Kesehatan	4,78%
Farmasi, Alat Kesehatan, Makan-Minum	9,96%
Penelitian dan Pengembangan	1,04%
Pemberdayaan Masyarakat	1,86%
Penguatan Sistem Pembiayaan Kesehatan	1,44%
Upaya Kesehatan: Penguatan Infrastruktur	28,29%

Komposisi berdasarkan jenis program ini kurang seimbang, perlu penguatan pada program pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan agar kasus-kasus seperti KLB diare atau gizi buruk yang disebabkan kekurangan SDM nutrisisionis dan sanitarian bisa dihindari.

Permenkes No. 75 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Puskesmas harus memiliki minimal sembilan tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga farmasi, nutrisisionis, sanitarian, laboratorian, dan tenaga promkes). Komposisi ini belum dipenuhi oleh Puskesmas di kabupaten/kota.

4. Belanja kesehatan Provinsi Banten berdasarkan jenis program kesehatan terbagi atas:

Program Kesehatan Masyarakat	13,82%
Program Kesehatan Individu	5,86%
Program Penguatan Sistem Kesehatan	80,32%



Upaya Mengembangkan Industri Lampu Gentur Cianjur

Oleh: Ir. H. Latief, M.M.

Industri rumah tangga (*home industry*) mulai berkembang di masyarakat karena dianggap dapat dijadikan alternatif pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada umumnya, *home industry* berawal dari usaha keluarga secara turun-menurun yang pada akhirnya meluas dan dapat bermanfaat sebagai salah satu mata pencaharian penduduk di sekitarnya. Secara tidak langsung, sebenarnya industri kecil dan kerajinan rumah tangga mempunyai potensi yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan membantu mengatasi lonjakan jumlah pengangguran.

Latar Belakang

Di Kabupaten Cianjur, terdapat salah satu industri yang sangat berpotensi, yaitu industri kerajinan lampu gentur. Lokasi pengrajin lampu gentur terdapat di Kampung Gentur, Desa Jambudipa, Kecamatan Warungkondang. Di kampung ini banyak

para pengrajin atau produsen lampu gentur yang terkenal sampai ke mancanegara.

Lampu gentur berdiri sejak tahun 1965. Pendirinya adalah bapak Mus'in. Munculnya lampu gentur berawal dari hasil eksperimen yang di padupadankan secara kreatif oleh beliau dengan peralatan seadanya. Saat itu, beliau membuatnya hanya untuk keperluan para santri dan masyarakat setempat karena belum ada akses penerangan listrik di kampung tersebut.

Lampu gentur sudah tidak asing lagi. Hasil kerajinan lampu gentur yang khas seolah menjadi karya utama bagi masyarakat sekitar sekaligus menjadi buah tangan bagi orang yang melintas atau sengaja datang ke Kota Cianjur untuk memesan lampu hias tersebut. Lampu gentur memiliki banyak macam atau jenis dengan harga yang relatif terjangkau untuk ukuran lampu hias antik.

Namun, perkembangan industri ini masih terbilang lamban sehingga belum memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar dan belum bisa menyerap tenaga kerja yang besar pula untuk mengembangkan produksinya.

Tujuan Kajian

Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan eksistensi dan pengembangan industri kerajinan lampu gentur Cianjur, baik dalam pemasaran maupun produktivitas. Melalui promosi dan pemasaran, industri lampu gentur akan dikenal konsumen secara lebih luas, baik dalam skala regional maupun internasional.

Metode Kajian

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif analisis dan induktif analisis. Metode deskriptif adalah metode yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga memberikan gambaran yang jelas atas objek yang dikaji. Metoda induktif adalah metoda yang menganalisis, mempelajari tata cara penarikan kesimpulan, dan memberikan saran mengenai keseluruhan populasi berdasarkan data yang ada di dalamnya.

Metode SWOT digunakan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang akan dilaksanakan selanjutnya (Freedy. R.2015). Selain itu, digunakan

pula referensi dari beberapa literatur untuk mendukung penyajian data-data tersebut.

Kondisi Faktual

Gentur adalah nama sebuah kampung di Desa Jambudipa, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Selain terkenal dengan Pondok Pesantren Gentur, kampung ini juga terkenal dengan sentra kerajinan lampu gentur yang diproduksi oleh masyarakat setempat. Masyarakat yang menekuni kerajinan lampu gentur ini sebanyak 152 orang. Adapun data-data mengenai pengrajin lampu gentur yang tercatat resmi di dinas terkait dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah.

Untuk pengembangannya perlu pertimbangan mengenai manajemen pemasaran. Menurut Cahyono T. B. (1997), efisiensi pemasaran mencakup efisiensi teknologi dan efisiensi ekonomi. Dengan menerapkan efisiensi pemasaran tersebut, kerajinan lampu gentur lambat laun akan banyak disukai dan diminati para kolektor lampu hias atau lampu antik untuk berbagai keperluan, seperti dekorasi ruangan di hotel-hotel dan rumah-rumah mewah atau sekadar untuk dikoleksi. Mereka menyukai karakteristik lampu gentur yang berkesan artistik, klasik, serta menarik. Keahlian pembuatan lampu gentur yang turun-temurun membuat kesulitan untuk berkembang menjadi produk unggulan daerah. Hal tersebut

TABEL 1. DATA PENGRAJIN LAMPU GENTUR DI DESA JAMBUDIPA TAHUN 2017

No.	Nama Perusahaan	KLUI	Jenis Komoditi	Produksi
1	Komarudin	38197	Lampu lentera	7.050 unit
2	Salim	38197	Lampu lemtera	6.000 unit
3	Nahrowi	38197	Lampu lentera	6.000 unit
4	Enang	28997	Lampu kuningan	50.000 unit
5	Berkah Cahaya	28997	Lampu kuningan	7.200 unit
6	Karya Mandiri	28999	Lampu hias	5.000 unit
7	Uni Antique	28999	Lampu kuningan	50 buah
8	Karya Mandiri	28997	Lampu logam	5.000 buah
9	Uni Antique Lamp	28999	Lampu kuningan	50.000 buah

Sumber : Dinas Koperasi Menengah, Kecil, Perdagangan, dan Perindustrian Tahun 2017

disebabkan budaya masyarakat yang tertutup untuk menerima teknologi dari luar. Lampu gentur tidak kalah dengan lampu-lampu hias produksi pabrik yang terus berkembang pada zaman modern ini. Lampu gentur juga memiliki nilai seni dan nilai artistik tersendiri sehingga para turis asing sangat menggemarnya.

Proses pengerjaan satu buah lampu gentur bergantung pada motif dan ukurannya. Jika ukurannya besar, bisa memakan waktu hingga empat hari. Mengenai harga lampu tersebut berkisar antara Rp200 ribu hingga jutaan rupiah (hasil survei lapangan tahun 2017), bergantung pada ukuran dan motifnya. Selain itu, lampu gentur khas Cianjur ini juga mempunyai bentuk lampu yang artistik dan berbagai motif yang unik dan mencolok.

Ada berbagai jenis lampu yang tersedia, mulai dari lampu pijar dan aksesoris untuk lilin hingga lampu taman dan lampu untuk interior hotel, restoran, vila, dan pusat perbelanjaan. Tampilan yang menarik dari lampu ini mampu memikat setiap orang yang melihat. Tidak heran jika lampu gentur ini banyak diminati oleh para turis mancanegara.

Sebagai sentra kerajinan penghasil lampu hias yang memiliki berbagai keunikan, Kampung Gentur, Cianjur, sebenarnya memiliki banyak potensi untuk bisa menembus ke pasar asing atau mancanegara yang lebih luas lagi.

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh pengrajin lampu gentur adalah lambannya perkembangan industri sehingga belum memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar dan belum bisa menyerap tenaga kerja yang besar pula untuk mengembangkan produksinya. Kelambanan ini disebabkan dalam reorganisasi kelompok pengrajin lampu gentur yang lambat untuk bersatu. Hal ini masih terkendala budaya masyarakat setempat yang turun-temurun dan tertutup. Begitu pun mengenai hak paten produksi lampu gentur yang belum dimiliki maupun dipatenkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Analisis Lampu Gentur

Untuk lebih meyakinkan dan memajukan masyarakat pengrajin lampu gentur maka dilakukan analisis atas keberadaan kerajinan lampu gentur tersebut melalui teori SWOT yang mengukur tentang kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang (Freed R., 2015).

1. **Kekuatan (S)**
 - a. Sumber daya manusia (SDM) tersedia
 - b. Ada dukungan (kebijakan) pemerintah
2. **Kelemahan (W)**
 - a. Bahan baku masih dari luar
 - b. Kurangnya promosi
 - c. Organisasi yang kaku
3. **Ancaman (T)**
 - a. *Brand mark* digunakan kota lain
 - b. Regenerasi pengrajin lampu gentur kurang
4. **Peluang (O)**
 - a. Pemasaran masih terbuka luas
 - b. Pemanfaatan kredit UMKM untuk modal
 - c. Lampu gentur diminati di beberapa daerah/negara
 - d. Pelatihan dan pembinaan kerajinan lampu gentur kurang

Dari hasil pengelompokan beberapa kesamaan alternatif solusi maka muncul dua strategi utama dalam rangka mencapai tujuan tersebut:

1. mengadakan peningkatan/pembinaan SDM dalam pengendalian mutu, pemasaran, promosi, dan regenerasi pengrajin lampu gentur untuk lebih berkembang; dan
2. pembuatan hak paten oleh OPD terkait agar *brand mark* tidak ditiru atau diambil alih oleh daerah lain.

Langkah selanjutnya adalah memilih strategi utama yang akan dijalankan dengan kerangka waktu dan tujuan yang hendak dicapai. Metode yang akan digunakan dalam kajian ini adalah metode Bardach (Anonimus, 2015). Metode Bardach tidak jauh berbeda dengan Metode USG, hanya kriteria penilaiannya dilihat dari beberapa aspek pokok, yakni aspek teknis, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek administratif dengan penjelasan sebagai berikut.

1. **Technical feasibility (aspek teknis)**, mengukur keluaran dari kebijakan/program agar mencapai tujuan yang diharapkan serta mengukur berjalan atau tidaknya alternatif yang dipilih dalam konteks teknis.
2. **Economic and financial possibility (aspek ekonomi)**, mengukur evaluasi ekonomis dari kebijakan/program yang meliputi biaya dan keuntungan (*change-in net worth*).
3. **Political viability (aspek politik)**, mengukur fisibilitas politis.
4. **Administrative operability (aspek administratif)**, mengukur evaluasi administratif apabila terdapat kemungkinan dalam implementasi kebijakan/program.

Kriteria penilaian yang digunakan dalam Metode Bardach adalah dengan memberikan penilaian melalui *ranking*. Strategi yang memiliki pengaruh yang paling besar terhadap peningkatan perkembangan industri kerajinan lampu gentur di Kabupaten Cianjur akan diberikan bobot yang

TABEL 2. KERANGKA ANALISIS SWOT INDUSTRI LAMPU GENTUR CIANJUR

SWOT	Kekuatan (S) 1. SDM ada 2. Dukungan pemerintah ada	Kelemahan (W) 1. Bahan baku sulit 2. Promosi kurang 3. Organisasi kaku
Peluang (O) 1. Pemasaran terbuka luas 2. Lembaga permodalan ada 3. Produk digemari daerah lain 4. Lembaga pelatihan yg baik	S-O 1. Peningkatan SDM melalui pelatihan, keterampilan, pemasaran, dan promosi 2. Memanfaatkan kredit UMKM dengan aturan pemerintah daerah	W-O 1. Memanfaatkan lembaga UMKM utk permodalan 2. Mengadakan MOU dengan pihak swasta untuk pemasaran/promosi
Ancaman (T) 1. <i>Brand mark</i> dipakai daerah lain 2. Regenerasi kurang	S-T 1. OPD terkait untuk membuat hak paten 2. Menyelenggarakan bimbingan pelatihan keterampilan agar regenerasi berlanjut	W-T 1. Meningkatkan promosi dan sosialisasi pemasaran 2. Perubahan organisasi

Sumber : Data yang Diolah Tahun 2017

TABEL 3. PENGELOMPOKAN ALTERNATIF SOLUSI MENJADI STRATEGI UTAMA

No	Alternatif Solusi	Strategi Utama
1	Peningkatan SDM	Peningkatan SDM melalui pembinaan dan pelatihan keterampilan
	Pemanfaatan UKM	
2	Mendaftarkan produk untuk mendapatkan hak paten	Pembuatan hak paten
	MOU dengan pihak swasta	

Sumber : Data yang Diolah Tahun 2017

TABEL 4. PEMBOBOTAN *RANKING* PADA STRATEGI UTAMA (MENURUT METODE BARDACH)

No	Strategi	Teknis	Ekonomi	Politik	Sosial	Total
1	Peningkatan SDM pengrajin lampu gentur melalui pembinaan dan pelatihan	4	5	5	4	18
2	Pembuatan hak paten oleh OPD terkait	4	4	4	4	16

Sumber: Data yang Diolah Tahun 2017

terbesar pada masing-masing aspek sebagaimana terlihat pada Tabel 4 di atas.

Dari hasil pembobotan *ranking* maka telah dipilih strategi utama yang paling optimal, yang memiliki nilai terbesar bila dianalisis dari semua aspek, yaitu peningkatan SDM pengrajin lampu gentur melalui pembinaan dan pelatihan, baik mutu maupun penguasaan informasi pasar. Pembinaan dan pelatihan dilakukan oleh OPD terkait atau bekerja sama dengan swasta. Selain itu, hasil produk juga perlu didaftarkan hak paten agar tidak terjadi manipulasi *brand mark* oleh daerah lain.

Strategi Pemecahan Masalah

Ada lima faktor yang memengaruhi perkembangan industri kerajinan lampu gentur, yaitu modal, SDM, organisasi, pemasaran, dan dukungan dari pemerintah. Tiap faktor memiliki permasalahan masing-masing. Berikut ini beberapa strategi yang digunakan untuk pemecahan setiap permasalahan tersebut.

Modal

Perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah khususnya instansi terkait untuk memberikan bantuan modal usaha, membina, dan mengawasi. Dengan adanya modal maka para pengrajin dapat membeli/membuat alat produksi yang lebih modern sehingga dalam proses produksi dapat menghasilkan lampu gentur yang lebih banyak dan berkualitas. Selain itu, mereka dapat mempergunakan sebagian modal untuk keperluan lain, seperti untuk pemasaran dan lainnya.

SDM

Pemerintah melalui dinas terkait diharapkan dapat mengadakan program pembinaan dan pelatihan secara berkala dalam hal cara pembuatan lampu gentur dengan instruktur atau orang yang ahli dalam pembuatan lampu gentur tersebut.

Organisasi

Organisasi merupakan wadah yang statis karena mewadahi seluruh anggota dengan status posisinya atau sebagai *tools of management* (Robbins, S. P. dalam *Perilaku Organisasi*, edisi 8, 2001).

Pemasaran

Hasil produksi berpotensi dapat memberikan keuntungan besar jika sistem sumber daya informasi dalam perencanaan strategis pemasaran memahami bahwa perusahaan dapat mencapai keunggulan atas pesaingnya dengan cara mengelola arus informasi (McLeod Jr., R. dalam *Sistem Informasi Manajemen*, 1995). Adapun penyebaran tersebut dapat dilakukan melalui jalur berikut.

1. Menggunakan media cetak, seperti koran atau majalah
2. Menggunakan radio atau televisi
3. Menggunakan media sosial, seperti membuat situs (*website*) atau media sosial (Facebook, Twitter, dan lain-lain)
4. Pihak Pemerintah Daerah melalui dinas terkait memberikan pendidikan/bimbingan teknis maupun sosialisasi tentang ilmu/teknik pemasaran yang baik untuk pemasaran di dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri.

Dukungan dari Pemerintah

Pemerintah harus membantu para pengusaha/ pengrajin lampu gentur dengan alternatif seperti:

1. memberikan pinjaman modal usaha melalui KUKM;
2. menyelenggarakan pameran kebudayaan untuk regional maupun nasional secara berkala dan kontinyu, yang di dalamnya memamerkan hasil karya atau produksi kerajinan lampu gentur tersebut;
3. bisa juga dengan memasukan ke situs resmi Kabupaten Cianjur sehingga setiap orang yang membuka situs Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tersebut dapat mengetahui bahwa Cianjur memiliki industri kerajinan lampu gentur yang sangat unik dan berkualitas; atau
4. memperkuat jejaring bisnis/usaha dan memahami penggunaan perangkat IT guna menguasai arus informasi yang ada serta mengetahui pemasaran dan kebutuhan kerajinan lampu gentur.

Kesimpulan

Perlunya perhatian pemerintah setempat guna peningkatan *skill* pengrajin untuk memproduksi lampu gentur dalam waktu singkat serta perlunya bimbingan pengetahuan konseptual dan teoretis guna mencapai tujuan umum dalam jangka panjang (Mangkunegara P. A. A., 2002).

Di Kampung Gentur, Desa Jambudipa, Kabupaten Cianjur terdapat banyak pengrajin atau produsen lampu gentur yang perlu dibina dan dilatih agar bisa lebih dikenal sampai ke mancanegara.

Saran

Untuk Pemerintah

1. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian dan dukungan dengan optimal terhadap potensi-potensi industri kerajinan lampu gentur berupa pembinaan, pelatihan, dan keterampilan untuk mencapai penguasaan *skill*, baik untuk waktu singkat maupun panjang.
2. Menjadikan lampu gentur sebagai produk unggulan.

3. Segera dibuatkan hak paten untuk produk lampu gentur.
4. Diadakan program jual-beli agar hasil produksi pengrajin dapat dibeli oleh pemerintah (dinas terkait), demi kesinambungan produksi.

Untuk Para Pengrajin

1. Agar lebih maju, para pengrajin diharapkan dapat meningkatkan kemampuan/*skill* (ide kreativitas, dan inovasi); kemandirian usaha; serta rasa ingin tahu.
2. Menumbuhkan/mengembangkan jiwa pengusaha.
3. Membuat jejaring bisnis untuk memperluas distribusi pemasaran kerajinan lampu gentur dengan cara mengadakan MoU dengan pihak swasta maupun pihak bank serta menguasai informasi dan teknologi (IT).
4. Membuat *outlet*/toko/galeri khusus di sekitar jalan protokol/provinsi.
5. Membuka kebudayaan tertutup dengan mengadakan perubahan organisasi pengrajin lampu gentur untuk kemajuan bersama ke depan sehingga bisa menguasai arus informasi pasar. ■

Daftar Pustaka

- Anonimus, *Modul Diklat Fungsional Perencana Tingkat Madya Angkatan VII*, MAP-UGM, Tahun 2015.
- Bambang Tri Cahyono Ph.D., *Manajemen Pemasaran*, Tahun 1997.
- Dr. A. A. Anwar Prabu Mangkunegara, Drs., M.Si., Psi., *Manajemen Sumberdaya Manusia Perusahaan*, Tahun 2002
- Feedy. R., *SWOT and Balanced Score Card*, Tahun 2015.
- Raymond McLeod, Jr., *Sistem Informasi Manajemen*, Tahun 1995.
- Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior*, Tahun 1999.
- Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi*, Tahun 2001

++ Penulis merupakan Fungsional Perencana Madya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat

Foto: www.aksioprepeiakantoxh.com

Menangkal **HOAX**

Penulis: Nita Agustin

Indonesia termasuk negara pengguna internet terbanyak ke-6 dunia, dengan pengguna aktif internet sebanyak 88,1 juta pengguna internet. Selain itu, Indonesia juga pengguna Facebook terbanyak ke-4 di dunia, setelah Amerika Serikat, India, dan Brasil. Tidak heran jika masyarakat banyak menggunakan internet sebagai sumber informasi. Sayangnya, karena kebebasan di internet, cukup banyak *hoax* yang tersebar dengan cepat di sekitar kita. Awas jangan sampai kita ikut menyebarkan berita *hoax*.

APA ITU HOAX?

Hoax adalah informasi palsu yang dibuat untuk dipercaya secara luas sebagai fakta. *Hoax* merupakan informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menyamarkan kebenaran. Intinya *hoax* adalah kebohongan. Kata *hoax* muncul pertama kali di Abad ke-18 dari kata "*hocus*" yang berarti untuk menipu. Kata *hoax* masuk di kamus Oxford Dictionary, yang diartikan sebagai tipuan atau hal lucu yang berbahaya.

Saat ini, banyak sekali *hoax* di masyarakat, yang berita-beritanya tidak jelas sumbernya. Isi berita *hoax* pada umumnya “*too good to be true*” (terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan) atau “*too bad to be true*” (terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan). *Hoax* juga biasanya menggunakan kalimat (seolah-olah) ilmiah yang keliru, menggunakan kalimat paranoid, dan disampaikan lewat *broadcast* atau media yang kurang kredibel.

CARA MENGIDENTIFIKASI SITUS HOAX

- 1 Periksa halaman "Tentang Kami (*About Us*)" sebuah situs
- 2 Periksa URL situs
- 3 Periksa domain situs lewat situs who.is
- 4 Teliti konten situs, lalu bandingkan dengan situs yang kredibel.

CARA MENGIDENTIFIKASI HOAX DI SOSIAL MEDIA

- 1 *Hoax* biasanya memiliki judul yang heboh dan membuat penasaran.
- 2 *Hoax* juga paling sering ditemukan pada konten dengan muatan agama, politik, tokoh terkenal, dan peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan.
- 3 Foto atau video yang digunakan biasanya berkonteks rendah atau sudah tidak murni karena telah diedit.
- 4 *Hoax* juga menggunakan kata-kata yang provokatif dan sering mengandung unsur "mengemis" *like* dan *share*.

CIRI-CIRI BERITA HOAX

- 1 Berita *hoax* didistribusikan melalui pos-el, forum, Whatsapp, dan Facebook.
- 2 Kalimat yang digunakan bombastis.
- 3 Isi berita kebanyakan menjelek-jelekkan kredibilitas seseorang atau institusi.
- 4 Isi berita tidak sesuai dengan logika dan pengetahuan.
- 5 Berita *hoax* berkesan ilmiah, padahal keliru.
- 6 Sumber berita tidak jelas, hanya sekadar *copy-paste*, dan tidak mencantumkan sumber.
- 7 Penyebar berita sengaja memanfaatkan ketidaktahuan pembaca.

AGAR TIDAK MUDAH TERTIPU HOAX

- 1 Jangan terlalu mudah percaya pada siapa pun.
- 2 Pastikan konten tersebut memiliki kredibilitas dan bukan merupakan satire ataupun sarkasme.
- 3 Pastikan ada banyak sumber terpercaya yang mengatakan hal yang sama.
- 4 Gunakan *search engine* untuk mencari, menggunakan foto, ataupun menelusuri nama instansi atau orang yang namanya dicatut dalam informasi tersebut.
- 5 Jangan mudah terpancing dan selalu mengutamakan fakta di atas asumsi, *be smart and be careful*.

CARA MELAPORKAN BERITA HOAX

Jika kita kerap menjumpai berita *hoax*, jangan ragu untuk segera melaporkannya ke:

- 1 **Situs turnbackhoax.id**
Situs ini dikelola oleh masyarakat anti-*hoax* Indonesia. Konten di situs ini berasal dari arsip grup Facebook "Forum Antifitnah, Hasut, dan *Hoax* (FAFHH)"
- 2 **Aplikasi Mastel**
Aplikasi ini bisa diunduh dari PlayStore atau AppStore.
- 3 **Pos-el Kemenkominfo**
Laporkan konten *hoax* via pos-el ke aduankonten@mail.kominfo.go.id

Saat ini di Indonesia, penyebar *hoax* dapat dituntut dengan UU ITE Pasal 28 ayat 1 dengan ancaman pidana maksimal 1 miliar. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus lebih cerdas dan bijaksana dalam menyikapi berita *hoax* agar kita tidak ikut menyebarkannya karena biasanya *hoax* dapat menimbulkan berbagai kerugian pada kemudian hari. ■

Sumber:

<https://www.youtube.com/watch?v=f3HeLmtG0Ko>
<https://www.youtube.com/watch?v=nZd8D18hiuE>
<https://www.youtube.com/watch?v=P6tMjrxBQNM>
<https://www.youtube.com/watch?v=P6tMjrxBQNM>

AP2I

ASOSIASI
PERENCANA
PEMERINTAH
INDONESIA



ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA

Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) merupakan organisasi profesi yang mewadahi para Pemangku Jabatan Fungsional Perencana baik di pusat maupun di daerah. Organisasi profesi ini dibentuk pada 6 Desember 2005 dan dikukuhkan secara hukum pada 17 Juni 2007 sebagai implementasi Keputusan Menteri PAN No. 16/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.

VISI

Menjadi organisasi profesi yang kredibel, mandiri, dan berdaya guna bagi anggota dan lembaga perencana pusat dan daerah.

MISI

1. Meningkatkan profesionalitas perencana pusat dan daerah
2. Mengembangkan jasa layanan yang berkualitas
3. Membangun *spirit* "sense of belonging" anggota asosiasi
4. Merevitalisasi peran dan fungsi AP2I
5. Mengembangkan media komunikasi, informasi, dan jaringan kerja sama dengan para pemangku kepentingan perencanaan pusat dan daerah

DEWAN PEMBINA

1. **Menteri PPN/Kepala Bappenas** (Ketua)
2. **Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas** (Anggota)
3. **Kepala Pusbindiklatren-Bappenas** (Anggota)

DEWAN PENASEHAT

1. **Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, MSi.** (Ketua)
Deputi Kepala Bappenas Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (PEPP)
2. **Dr. Ir. Leonard V.H. Tampubolon, MA** (Anggota)
Deputi Kepala Bappenas Bidang Ekonomi
3. **Dr. Ir. Oswar Muadzin Mungkasa, MURP** (Anggota)
Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
4. **Dr. Ir. Subandi, M.Sc.** (Anggota)
Deputi Kepala Bappenas Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan
5. **Eko Putro Adijayanto** (Anggota)
Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas

PENGURUS NASIONAL AP2I

1. Ketua Umum:
Dr. Haryanto, M.A.
Kementerian PPN/Bappenas
2. Sekretaris Jenderal:
H. S. Bayu Anggoro, S.T., M.Sc.
Kementerian ESDM
3. Bendahara Umum:
Surinta B. Sembiring, S.Sos., M.M.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

SEKRETARIAT PENGURUS NASIONAL AP2I

Jl. Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat 10320
Telp. (021) 31928280, 31928285,
31928279 ext. 9 | Faks. (021) 3103705
Website: <http://ap2i-nasional.or.id>
E-mail: ap2i.domain@gmail.com,
setjenap2i@yahoo.com, ap2i_2007@yahoo.co.id

MANFAAT

WiFAST Diklatren adalah program yang melibatkan staf dan pejabat Bappenas dalam Diklat Perencanaan yang terlaksana atas kerja sama antara Pusbindiklatren Bappenas dengan Program Studi/pusat/lembaga di universitas sebagai widyaiswara, narasumber, instruktur, fasilitator, dan peran lainnya. WiFAST Diklatren juga merupakan sistem aplikasi pengelola widyaiswara/pengajar Diklat Perencanaan yang cepat, mudah dan transparan.

KETENTUAN

- Diklat perencanaan dapat terdiri atas Program Gelar 2, Diklat Substantif, dan Diklat JFP. Namun, fokus utama akan diutamakan pada Diklat Substantif dan Diklat JFP di beberapa *center* yang telah tersambung dengan perangkat SIPENA.
- Calon pengajar/narasumber harus aktif melakukan registrasi dan *update* data di SIPENA serta mengikuti forum pertemuan.
- Penugasan diberikan kepada calon pengajar/narasumber berdasarkan latar belakang, kompetensi bidang yang dikuasai, dan pengalaman pengajar/narasumber dalam Diklat Perencanaan.
- Pusbindiklatren Bappenas menentukan jadwal yang disusun secara reguler maupun berdasarkan permintaan untuk tenaga pengajar pelaksana diklat atau Pemda/instansi lainnya.

IKUTI

Untuk melaksanakan kegiatan ini diperlukan pendataan meliputi jenis diklat yang membutuhkan pengajar/narasumber dari prodi/*center* serta kesediaan dan minat calon pengajar/narasumber dari Bappenas. Setiap calon pengajar/narasumber wajib mengisi dan memperbarui (*update*) data melalui aplikasi SIPENA di <http://sipena.bappenas.go.id/app/index.php/pengajar/pendaftaran>.

TAHAPAN

PENDAFTARAN/
UPDATE DATA
PENGAJAR

WORKSHOP TEKNIK
PEMBELAJARAN
DIKLAT EFEKTIF DAN
ISU-ISU PERENCANAAN
PEMBANGUNAN

SOSIALISASI
PENGGUNAAN
APILKASI WiFAST

UJI COBA DAN
EVALUASI
APLIKASI WiFAST

PENGGUNAAN
DAN EVALUASI
WiFAST



PUSBINDIKLATREN BAPPENAS

Jl. Proklamasi No. 70 Jakarta 10320

Telp. (021) 31928279, 31928280, 31928285

Faks. (021) 31928281

e-Mail: pusbindiklatren@bappenas.go.id

Website: www.pusbindiklatren.bappenas.go.id

